



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kajian Fiskal Regional

Provinsi Kepulauan Riau



Presented By.
Kanwil DJPb Provinsi Kepri

Triwulan I
2025

Kajian Fiskal Regional

Provinsi Kepulauan Riau

Triwulan I
2025





**Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh,
Para pembaca dan *stakeholders* yang kami
hormati,**

Segenap puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang atas izin dan karunia-Nya sehingga Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. KFR merupakan salah satu output *Regional Chief Economist* (RCE) yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) eksternal maupun internal yang menyajikan potret perkembangan perekonomian daerah, kondisi fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengembangan ekonomi daerah, serta rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi para perumus kebijakan serta seluruh *stakeholders* lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Penyusunan KFR dilakukan melalui sinergi antar *stakeholders* yang bersama-sama berkontribusi dalam mengoptimalkan kualitas perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). KFR triwulan I 2025 mencakup informasi Perkembangan Perekonomian Regional, Kinerja Fiskal Regional (APBN, APBD dan Konsolidasian), serta analisis tematik atas "Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah".

Foreword

Kata Pengantar

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan KFR ini, terutama kepada Gubernur Kepulauan Riau, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah lingkup Kepri, BPS Provinsi Kepri, Kanwil DJP Kepri, Kanwil DJBC Khusus Kepri, KPU BC Batam, KPKNL Batam, Dr. Myrna Sofia selaku Local Expert dan akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan seluruh jajaran pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepri.

Kami berharap, sinergi yang telah terbangun dengan baik ini dapat semakin kita tingkatkan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan KFR ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas kajian kedepannya. Besar harapan kami bahwa KFR yang disusun ini dapat memberikan manfaat untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Kepri pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Tanjungpinang, Mei 2025



Budiman
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri



Drafting Teams”

Tim Penyusun

✓ Penanggung Jawab

Budiman

(Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau)

✓ Ketua Tim

Anisah Alfada

(Kepala Bidang PPA II)

✓ Tim Penulis

Budi Indrawan

(Plt. Kepala Seksi PPA II A dan Kepala Seksi PPA II C)

Muhadi

(Kepala Seksi PPA II B)

Lorensia Kristina Br. S.

(Pelaksana Seksi PPA II A)

Erika Krissanta

(Pelaksana Seksi PPA II B)

Muhammad Rizki Firdaus

(Pelaksana Seksi PPA II C)

✓ Stakeholders Terkait

- *Local Expert* Mitra Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
- Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kepulauan Riau
- Kemenkeu Satu Regional Kepulauan Riau (Kanwil DJP, Kanwil DJBC, KPU BC, PSO BC, Kanwil DJKN)
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
- Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau
- Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Kepri
- Akademisi (UMRAH)
- Dinas Koperasi dan UKM/Tenaga Kerja, Usaha Mikro/Perindustrian & Perdagangan/ESDM dan Dinas PMD/Dukcapil Lingkup Provinsi
- Satuan Kerja dan BLU Wilayah Provinsi Kepri
- BPKP Perwakilan Kepri
- KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang

✓ Design & Layout

Erika Krissanta

(Source: Canva)



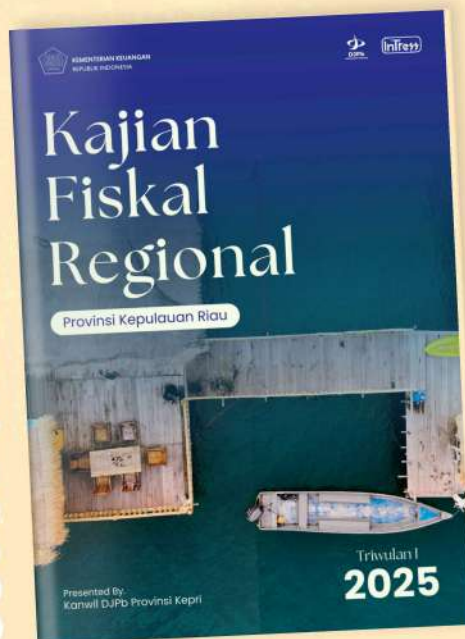
Kajian Fiskal Regional “ Provinsi Kepri Triwulan I – 2025

Local Economic
Development

Fiscal
Growth
Performance

Cooperatives
Roles and
Development

Policy Responses



Berlipat sirih, manis rasanya,
Menarik tangan, indah geraknya
Kami sampaikan salam dan sapa,
Semoga KFR Kepri selalu memberi makna



Korespondensi

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Sultan Muhammad Syah Dompok, Kota Tanjungpinang, Prov. Kep. Riau,
29124. e-mail: djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/

 Kanwil DJPb Kepulauan Riau

 @djpbkepri

 @djpbkepri



Table of Contents”

Daftar isi

- ii Kata Pengantar
- iii Tim Penyusun
- v Daftar Isi
- vii Daftar Tabel

- vii Daftar Grafik dan Gambar
- x Daftar Istilah
- xvi Ringkasan Eksekutif
- xx Dashboard

Bab I

01

Analisis Ekonomi Regional

- 1 Analisis Indikator Makro Ekonomi
- 10 Analisis Indikator Kesejahteraan

Bab II

18

Analisis Fiskal Regional

- 17 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi
- 30 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)

- 17 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
- 40 Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Bab III

51

Analisis Tematik: Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah

- 51 Pendahuluan
- 51 Perkembangan Kondisi Koperasi di Kepri
- 54 Dukungan Pemerintah terhadap Koperasi
- 58 Tantangan Pengembangan Koperasi
- 59 Strategi Pengembangan Koperasi
- 61 Potensi Pengembangan Koperasi

Bab IV

63

Kesimpulan dan Rekomendasi

- 63 Kesimpulan
- 67 Rekomendasi

Daftar Pustaka

Special Box



Fast Response Langkah Antisipasi DJBC Kepri Dalam Menghadapi Kebijakan Tarif Impor oleh Amerika Serikat



Comparative Study Cross Countries - Program Makan Bergizi Gratis Mancanegara



Hubungan Output dan Outcome Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri



Selayang Pandang Kepulauan Riau



Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.



List of Table”

Daftar Tabel

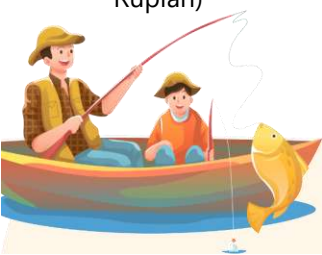
Tabel 1.1 – Pagu dan Realisasi Belanja APBN untuk Penanganan Inflasi di Kepri TA 2025	9
Tabel 2.1– Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	18
Tabel 2.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)	20
Tabel 2.3 – Komposisi Realisasi Perpajakan Menurut Jenisnya di Kepri, Triwulan I 2025 (dalam Miliar Rupiah)	20
Tabel 2.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)	20
Tabel 2.5 – Perkembangan PNBPN di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)	22
Tabel 2.6 – Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun (dalam Miliar Rupiah)	22
Tabel 2.7 – Perbandingan Proporsi Pagu dan Realisasi Belanja Seluruh K/L dan 15 K/L Terbesar, Triwulan I 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)	24
Tabel 2.8 - Realisasi Belanja Lima Belas K/L Pagu Terbesar, Triwulan I 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)	24
Tabel 2.9 - Realisasi Belanja Menurut Fungsi, Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	25
Tabel 2.10 – Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)	27
Tabel 2.11 – Pagu dan Realisasi Belanja TKD di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	28
Tabel 2.12 – Perkembangan I-Account APBD di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	30
Tabel 2.13 – Klaster Kondisi Kemandirian Fiskal	33
Tabel 2.14 – Perkembangan Realisasi Konsolidasi, Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	38
Tabel 2.15 – Matriks Perkembangan Pelaksanaan Program MBG di Kepri	40
Tabel 2.16 - Hasil Analisis Input Output Dampak Program MBG Terhadap Perekonomian di Indonesia	46
Tabel 2.17 - Hasil Analisis Input Output Dampak Program MBG Terhadap Perekonomian di Indonesia	48
Tabel 3.1 - Jumlah Koperasi di Lingkup Provinsi Kepri (hingga tahun 2024)	58



List of Graph”

Daftar Grafik

Grafik 1.1 – Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2019 – Q1 2025 (%yoy)	2
Grafik 1.2 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2019 – Q1 2025 (%qtq)	2
Grafik 1.3 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2019 – Q1 2025 (%ctc)	3
Grafik 1.4 – Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan I 2025 (%ctc)	3
Grafik 1.5 – Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kepri Tahun 2020-Q1 2025 (dalam Miliar Rupiah)	3
Grafik 1.6 – Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan I 2025 (%yoy)	4
Grafik 1.7 – Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan I 2025 (%yoy)	6
Grafik 1.8 – Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Rill Ekonomi Kepri Triwulan I 2025	7
Grafik 1.9 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2023-Maret 2025 (%yoy)	8
Grafik 1.10 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2023-Maret 2025 (%mtm)	8
Grafik 1.11 – Inflasi pada Provinsi di Regional Sumatera per Maret 2025 (%ytd)	9
Grafik 1.12 – Neraca Perdagangan Internasional Bulanan Provinsi Kepri Tahun 2023-2025 (Juta US\$)	10
Grafik 1.13 – Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Kepri, Jan-Mar 2025 (Juta US\$)	10
Grafik 1.14 – Perkembangan NTP di Kepri Tahun 2023-2025	11
Grafik 1.15 – Perkembangan NTN di Kepri Tahun 2023 – 2025	12
Grafik 1.16 - Perkembangan IPM Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2024	13
Grafik 1.17 - Perkembangan IPM Provinsi Kepri, Nasional, dan Regional Sumatera Tahun 2020-2024	13
Grafik 1.18 – Nilai IPM Kabupaten/Kota di Kepri per Kategori IPM Tahun 2020 – 2024	13
Grafik 1.19 – Nilai Komponen Pembentuk IPM di Kepri Tahun 2020-2024	14
Grafik 1.20 – Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kepri Tahun 2020-2024 (ribu jiwa)	15
Grafik 1.21 – Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Kepri Tahun 2020-2024	15
Grafik 1.22 – Perkembangan Indeks P1 dan P2 Kepri Tahun 2020-2024 (persen)	16
Grafik 1.23 – Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Regional Sumatera Tahun 2020-2024 (persen)	16
Grafik 1.24 – Rasio Gini di Kepri Tahun 2020-2024	17
Grafik 1.25 – Ketimpangan di Regional Sumatera per September 2024 (persen)	17
Grafik 1.26 – Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri per Tahun 2020-2025 (persen)	18
Grafik 1.27 – Angka TPT Per Provinsi di Regional Sumatera bulan Februari 2025 (persen)	18
Grafik 2.1 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)	19
Grafik 2.2 – Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	19
Grafik 2.3 – Tax Ratio Pemerintah Pusat Triwulan I, 2024-2025 (persen)	21
Grafik 2.4 – Target dan Realisasi PNPB di Kepri Triwulan I, 2024-2025 (dalam Miliar Rupiah)	21
Grafik 2.5 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)	23
Grafik 2.6 – Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I, 2024 s.d. 2025	23
Grafik 2.7 – Kontribusi Belanja Negara terhadap PDRB Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam miliar Rupiah)	26
Grafik 2.8 – Pagu dan Realisasi Belanja Prioritas Nasional Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam miliar Rupiah)	27
Grafik 2.9 – Pagu dan Realisasi Dana Alokasi Umum Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)	28
Grafik 2.10 – Pagu dan Realisasi Dana Bagi Hasil Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)	29
Grafik 2.11 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Fisik Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	29
Grafik 2.12 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	29



List of Graph”

Daftar Grafik

Grafik 2.13 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Insentif Fiskal Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	30
Grafik 2.14 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Desa Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	30
Grafik 2.15 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Defisit APBN Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	30
Grafik 2.16 – Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	32
Grafik 2.17 – Perkembangan Target dan Realisasi PAD di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	32
Grafik 2.18 – Perkembangan Rasio PAD Terhadap PDRB (%)	33
Grafik 2.19 – Jumlah PAD dan Pendapatan Daerah Pemda Lingkup Kepri, Triwulan I 2025 (dalam miliar Rupiah)	34
Grafik 2.22 – Jumlah PAD+DBH dan Pendapatan Daerah Pemda Lingkup Kepri, 2024 (dalam Miliar Rupiah)	34
Grafik 2.20 – Indeks Kemandirian Fiskal I Triwulan I, 2023 s.d. 2025	34
Grafik 2.21 – Indeks Kemandirian Fiskal II Triwulan I, 2023 s.d. 2025	34
Grafik 2.24 – Target dan Realisasi LLPDyS Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	35
Grafik 2.23 – Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	35
Grafik 2.25 – Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	35
Grafik 2.26 – Pagu dan Realisasi Belanja Operasi Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	36
Grafik 2.27 – Pagu dan Realisasi Belanja Modal Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	36
Grafik 2.28 – Pagu dan Realisasi Belanja Tak Terduga Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	36
Grafik 2.29 – Target dan Realisasi Belanja Transfer Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	37
Grafik 2.30 – Realisasi Belanja Menurut Fungsi, 2024 dan 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	37
Grafik 2.32 – Target dan Pembiayaan Daerah Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	38
Grafik 2.31 – Target dan Realisasi Surplus/Defisit APBD Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	38
Grafik 2.34 –Realisasi Belanja Konsolidasian, Triwulan I 2024 dan 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	39
Grafik 2.33 –Realisasi Pendapatan Konsolidasian, Triwulan I 2024 dan 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	39
Grafik 2.35 –Realisasi Defisit Konsolidasian, Triwulan I 2024 dan 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	39
Grafik 2.36 –Realisasi Pembiayaan Konsolidasian, Triwulan I 2024 dan 2025 (Dalam Miliar Rupiah)	40
Grafik 2.37 – Penerima Manfaat MBG Kota Batam per SPPG	41
Grafik 2.38 – Penerima Manfaat MBG Kota Batam per Jenis Penerima	42
Grafik 2.39 – Penerima Manfaat MBG Kota Batam per Jenis Penerima	42
Grafik 2.40 – SPPG di Kabupaten Karimun	43
Grafik 2.41– SPPG di Kabupaten Karimun	43
Grafik 2.42 – Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan I 2025 (%yoy)	44
Grafik 2.43 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%yoy)	44
Grafik 2.44 – Inflasi Kepri per Kelompok Pengeluaran Maret 2024 (%yoy)	45
Grafik 2.45 – Perkembangan NTP di Kepri Tahun 2022 - 2024	45
Grafik 3.1 – Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi yang Memiliki Sertifikat di Kepri Tahun 2019-2023	52
Grafik 3.2 – Jumlah Anggota Koperasi di Kepri Tahun 2019-2023	52
Grafik 3.3 – Nilai Aset Koperasi di Kepri Tahun 2021-2023 (dalam Juta Rupiah)	53
Grafik 3.4 – Jumlah Volume Usaha Koperasi di Kepri Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)	53
Grafik 3.5 – Anggaran Belanja Kemenko UKM di Kepri (dalam Miliar Rupiah)	55
Grafik 3.6 – Output Belanja Kemenko UKM di Kepri tahun 2020 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	56



List of Graph”

Daftar Grafik

Grafik 3.7 – Perkembangan Realisasi TKD DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (dalam miliar Rupiah)	56
Grafik 3.8 – Pagu dan Realisasi TKD DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil per Pemda (dalam miliar Rupiah)	57
Grafik 3.9 - Alokasi Anggaran APBD Kepri dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Rp Juta Rupiah)	57

Daftar Gambar:

Gambar 2.1 – Pelaksanaan MBG di Kota Batam	41
Gambar 2.2 – Pelaksanaan MBG di Kota Tanjungpinang	42
Gambar 2.3 – SPPG di Kabupaten Karimun	42



Abbreviations”

Daftar Istilah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD, perubahan APBD (APBD-P), dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN (APBN-P), dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Badan Layanan Umum (BLU) instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLU Perguruan Tinggi Negeri, BLU Rumah Sakit Pemerintah, dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

Bea Masuk (BM)/Import Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pengenaan bea masuk biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, memberikan proteksi terhadap produksi local, dan/atau untuk menghukum negara tertentu dengan mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk negara tersebut.

Bea Keluar (BK)/Export Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean. Saat ini, pengenaan bea keluar sudah jarang diterapkan karena tidak sejalan dengan kebijakan berorientasi ekspor yang membutuhkan harga kompetitif di pasar internasional.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Contoh: minuman beralkohol dan tembakau).

Cumulative to Cumulative (ctc) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2021)

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik. (Contoh penggunaan: gedung sekolah, infrastruktur irigasi, energy skala kecil, prasarana pemerintah daerah, infrastruktur jalan, transportasi perdesaan sarpras pasar, dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu



Abbreviations”

Daftar Istilah

mendanai kegiatan non fisik. (Contoh penggunaan: bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan profesi guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM,

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu

Defisit/Surplus Anggaran adalah kebijakan atau realisasi pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran lebih besar dari penerimaan disebut sebagai defisit anggaran, sedangkan pengeluaran lebih kecil dari penerimaan disebut sebagai surplus anggaran.

Free Trade Zone (FTZ)/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPNBM, dan Cukai.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKD) merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

High Base-effect adalah kecenderungan pertumbuhan dari nilai yang kondisi awalnya tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Industri Kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri Menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang



Abbreviations”

Daftar Istilah

meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Special Economic Zone (SEZ) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu..

Ketimpangan Fiskal Vertikal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Ketimpangan Fiskal Horizontal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPAD) merupakan pos penganggaran penerimaan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKD. LLPAD meliputi jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi, denda pajak, denda retribusi, pendapatan BLUD, dan lain sebagainya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) merupakan pos penerimaan Pemda untuk menampung penerimaan selain PAD dan Dana Perimbangan. Pos LLPD meliputi hibah, dana darurat, DBH dari provinsi, bantuan keuangan, dan lain sebagainya.

Month to Month (mtm) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis bulanan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada bulan September 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada bulan Agustus 2022.

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Property Tax adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pajak Daerah/Local Tax adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan Pemerintah Daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan sebagainya.

Pajak Penghasilan (PPh)/Income Tax adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Pajak Perdagangan Internasional (PPI) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value Added Tax (VAT)/Goods and Services Tax (GST) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.



Abbreviations”

Daftar Istilah

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kelompok pendapatan pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan LLPAD.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pengeluaran Konsumsi - Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT.

Pengeluaran Konsumsi – Rumah Tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu negara pada periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada periode waktu tertentu

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya berdasarkan harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, PDRB ADHK murni menghitung nilai tambah output tanpa memperhitungkan kenaikan/penurunan harga.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB/Kapita) merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB/Kapita digunakan sebagai indikator standar hidup penduduk suatu wilayah.

Quarter to Quarter (qtoq) mengacu pada perubahan atau pertumbuhan antara satu kuartal dengan kuartal sebelumnya. Contohnya adalah pada saat melihat pertumbuhan PDRB dari Triwulan II ke Triwulan III.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi terminal dan sebagainya.



Abbreviations”

Daftar Istilah

Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam konteks akuntansi, kata Satker ini bisa dipersamakan dengan entitas.

Scatterplot adalah diagram matematika yang menggunakan koordinat Cartesius untuk menampilkan nilai dari dua variabel yang khas dalam satu kumpulan data.

Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selisih positif (sisa lebih) dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Skala Ekonomi/Economy of Scale merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi (output). Dalam konteks industrialisasi, skala ekonomi menciptakan efisiensi bagi suatu unit produksi sampai dengan titik tertentu.

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Tax Ratio adalah rasio yang membandingkan antara realisasi pajak dengan PDB/PDRB pada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalan potensi pajak.

Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin/Head Count Index (HCI-Po) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak peluang pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah atau industri pada suatu waktu tertentu.

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk pelaksanaannya, diberikan dana tugas pembantuan dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran.



Abbreviations”

Daftar Istilah

Vokasional dalam konteks pendidikan/pelatihan merupakan pendidikan/pelatihan yang lebih terfokus pada sisi keahlian atau kemahiran praktis dalam bekerja dibandingkan sisi akademik. Di era cepatnya perubahan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan keahlian seorang pekerja seringkali berubah-ubah sehingga permintaan akan pendidikan/pelatihan vokasional terus meningkat.

Volatilitas/Volatility dalam konteks ekonomi merupakan kecenderungan suatu variabel untuk berubah-ubah. Semakin tinggi volatilitas, semakin sering suatu variabel berubah-ubah.

Year on Year (yoy) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2021).



Executive Summary

Ringkasan Eksekutif

Analisis Ekonomi Regional

Ditengah dinamika dan pelemahan ekonomi global, kinerja perekonomian Kepri pada triwulan I 2025 (yoy) tetap stabil dan bahkan tumbuh positif menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera. Indikator kesejahteraan rata-rata mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut.

Pada triwulan I 2024, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat tumbuh 5,16 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut menggambarkan kestabilan perekonomian di Kepri yang tetap menunjukkan kinerja positif. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut menjadikan Kepri dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera (ctc), Pertumbuhan ekonomi ini dorong oleh fenomena meningkatnya jumlah kunjungan wisman dan wisnus yang meningkatkan permintaan barang dan jasa dan mendukung produktivitas ekonomi Kepri.

Berdasarkan Pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi dengan share sebesar 43,43 persen. Dari sisi Lapangan Usaha, struktur PDRB Kepri masih didominasi sektor industri pengolahan dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 42,51 persen.

Tekanan inflasi Kepri pada bulan Maret 2025 mencapai 2,01 persen (yoy), angka inflasi Kepri lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional 0,38 (yoy), namun tetap stabil dan masih dalam rentang target Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2025 sebesar $2,94 \pm 1$ (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan iklim di daerah produsen beras yang menyebabkan gagal panen, sedangkan Provinsi Kepri masih mengimpor beras dari daerah produsen beras dalam negeri (pulau jawa) dan luar negeri.

IPM Kepri tahun 2024, yang dihitung dengan metode perhitungan baru sebesar 79,89, tumbuh sebesar 0,81 persen (yoy). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama enam tahun berturut-turut.

Tingkat kemiskinan Kepri pada September 2024 tercatat 124,96 ribu jiwa atau 4,78 persen dari total penduduk Kepri. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan Kepri turun sebanyak $\pm 13,3$ ribu jiwa (yoy). Sementara itu Gini Ratio Kepri, per September 2024 tercatat sebesar 0,357 atau naik 0,008 persen point jika dibandingkan dengan periode Maret 2024. Gini ratio tersebut masih berada dibawah gini ratio Nasional yang berada di angka 0,381. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di Kepri tidak dirasakan secara merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri bulan Februari 2025 tercatat 6,89 persen. Angka TPT tersebut turun sebesar 0,05 persen poin (yoy). Kepri berada pada peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan tertinggi ke-dua tertinggi Nasional. Di sisi lain, persentase penurunan TPT Kepri juga menjadi yang terbesar di



Executive Summary

Ringkasan Eksekutif

Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi angkatan kerja cukup tinggi, masih terdapat tantangan besar dalam penyediaan lapangan kerja di Kepri.

NTP Kepri pada bulan Maret 2025 sebesar 106,16 dan menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,68 persen (yoy). Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (123,72). NTP tersebut telah mencapai target NTP dalam RPJMD Kepri yang di targetkan mencapai 99,98 persen di tahun 2025. Namun NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (123,72).

NTN Kepri pada Maret 2025 sebesar 102,64 lebih tinggi jika dibandingkan dengan NTN nasional dengan angka 103,53. Namun demikian, capaian NTN tersebut masih berada di bawah sasaran NTN Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri tahun 2024 ditargetkan sebesar 116,10. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan belum optimalnya produksi para nelayan Kepri yang masih tradisional dan kurangnya akses terhadap metode teknologi perikanan modern.

Analisis Fiskal Regional

Kinerja pelaksanaan APBN Kepri menunjukkan adanya kontraksi realisasi Pendapatan dan Belanja. Maka dari itu diperlukan *extra effort* yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menggali potensi pendapatan dan mengoptimalkan belanja APBN di Kepri.

Pendapatan Negara tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp18.054,79 miliar yang seluruhnya merupakan Penerimaan Dalam Negeri, terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp15.381,79 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.672,99 miliar. Pada triwulan I 2025, **realisasi penerimaan perpajakan** mencapai Rp1.638,26 miliar (10,65 persen dari Target), terkontraksi 26,12 persen (yoy). Penurunan penerimaan perpajakan sebagai dampak perubahan sistem administratif serta tarif. **Realisasi PNBP** pada triwulan I 2025 sebesar Rp657,45 miliar (24,60 persen dari Target) dan tumbuh sebesar 4,44 persen (yoy). Realisasi ini disumbang oleh PNBP Aset khususnya yang dikelola oleh BP Batam

Alokasi Belanja APBN pada tahun 2025 sebesar Rp16.499,90 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp8.048,50 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.451,40 miliar. Sampai dengan 31 Maret 2025, **Realisasi Belanja Pemerintah Pusat** pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.041,85 miliar (12,94 persen dari Pagu) dan tumbuh sebesar minus 30,84 persen (yoy). Pertumbuhan minus disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sehingga memangkas belanja barang dan modal dalam jumlah besar. Sedangkan, **Realisasi Belanja TKD** pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.586,49 miliar (18,77 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar minus 18,62 persen (yoy). Penurunan belanja TKD sebagai dampak pemda yang masih berhati-hati dalam melakukan kontrak belanja sebagai dampak efisiensi belanja. **Surplus dianggarkan** sebesar Rp1.554,89 miliar namun pada triwulan I 2025 terealisasi Defisit sebesar Rp332,62 miliar.



Executive Summary

Ringkasan Eksekutif

Pelaksanaan APBD di Kepri terus menggali potensi pendapatan daerah. Pendapatan Daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp14.606,41 miliar, terdiri dari PAD sebesar Rp5.257,44 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp9.317,12 miliar, dan LLPDyS sebesar Rp31,85 miliar.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp1.068,54 miliar (20,32 persen dari Target) dan mengalami pertumbuhan 21,26 persen (yoy). Pertumbuhan PAD didongkrak oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga mendorong PAD tumbuh positif. **Realisasi Pendapatan Transfer** pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.734,78 miliar (18,62 persen dari Target) dan tumbuh minus 0,50 persen (yoy). Penurunan Pendapatan Transfer sebagai dampak efisiensi belanja TKD pada pemerintah pusat. **Realisasi LLPDyS** s.d. triwulan I 2025 masih belum terdapat realisasi.

Pada tahun 2025, Belanja APBD dianggarkan dengan Pagu sebesar Rp15.096,81 miliar, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp11.612,99 miliar, Belanja Modal sebesar Rp2.005,08 miliar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp242,39 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp1.236,35 miliar. Total Realisasi Belanja APBD per 31 Maret 2025 telah mencapai Rp2.157,11 miliar. **Realisasi Belanja APBD** tumbuh 20,68 persen (yoy), ditopang oleh besarnya realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.261,24 miliar yang disebabkan adanya penerimaan PNS pada tahun 2024 yang mulai bekerja di tahun 2025

Konsolidasian pelaksanaan anggaran pusat dan daerah lingkup Kepri menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Konsolidasi sampai dengan 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp3.542,57 miliar dan mengalami terkonsentrasi 13,95 persen (yoy). Total realisasi Belanja Konsolidasi sebesar Rp3.441,62 miliar dan terkonsentrasi 11,59 persen (yoy), sehingga terjadi Surplus sebesar Rp100,96 miliar.

Analisis Tematik: Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah

Provinsi Kepri yang terdiri dari 275 desa dan 144 kelurahan (total 419 desa/kelurahan), tercatat memiliki sebanyak 1.977 unit koperasi. Dari jumlah tersebut, hanya 741 koperasi yang berstatus aktif, sementara sisanya sebanyak 1.236 koperasi tergolong nonaktif.

Kota Batam dan Kab. Lingga menempati posisi tertinggi dalam jumlah koperasi tidak aktif, masing-masing mencatatkan 759 dan 151 unit koperasi yang tidak menjalankan kegiatan operasional. Kondisi ini menunjukkan tantangan struktural dan manajerial dalam pengelolaan koperasi. Meskipun secara kuantitatif tinggi, kualitas dan keberlanjutan koperasi masih rendah.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Kepri telah mengarahkan sejumlah program strategis dalam RPJMD 2025–2029, seperti pelatihan perkoperasian, pengawasan kelembagaan, dan penilaian kesehatan koperasi. Dukungan fiskal juga disiapkan melalui alokasi belanja **Kemenko UKM** sebesar Rp2,99 miliar di 2024, meskipun realisasi anggaran baru 84,07%. Tambahan belanja melalui **DAK Non Fisik** mencapai Rp5,11 miliar, tumbuh 35,28% dibanding tahun sebelumnya.



Executive Summary

Ringkasan Eksekutif

Sebagai bentuk akselerasi kelembagaan, Pemprov Kepri telah mengalokasikan Rp2,25 miliar dari APBD untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mencakup biaya notaris, pelatihan manajer, hingga insentif bagi koperasi unggulan. Dukungan lintas sektor turut menguatkan upaya ini, antara lain melalui program Desa Cantik (BPS), pelatihan SDM (Kemenparekraf), inkubasi bisnis koperasi (Kemenko UKM), hingga kemitraan BUMN/BUMD.

Namun demikian, tantangan strategis tetap ada, seperti kondisi geografis kepulauan, terbatasnya SDM yang kompeten, serta keterbatasan anggaran. Kepri memiliki peluang besar dalam pengembangan koperasi berbasis potensi lokal seperti hasil laut, pariwisata bahari, kawasan FTZ/KEK, dan pertanian kelapa. Inovasi model koperasi seperti Koperasi Digital Maritim, Koperasi Ekspor UMKM, dan Koperasi Energi Terbarukan menjadi strategi kunci untuk mendorong ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan pada Triwulan I 2025 Provinsi Kepri

Rekomedasi pada KFR triwulan I 2025 Provinsi Kepri berfokus pada proses pembangunan perekonomian Kepri yang selaras dengan pembangunan nasional melalui perbaikan kinerja fiskal pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil analisis makroekonomi, kinerja APBN dan APBD, serta reuiu tematik atas Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah, Kanwil DJPb Prov. Kepri menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada para pemangku kepentingan. Rekomendasi ditujukan kepada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kepri, Pemerintah Pusat, serta internal Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan di wilayah.

Fokus rekomendasi mencakup aspek perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pendapatan dan belanja negara. Melalui koordinasi lintas instansi, peningkatan kualitas data, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan fiskal menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepri.



Dashboard

Perkembangan Ekonomi Regional



Pertumbuhan Ekonomi

5,16% yoy

-2,78 qtr 5,16% ctc

3 %ctc
in Sumatera

PERTUMBUHAN EKONOMI - Q1 2025



Distribusi PDRB di Regional Sumatera

7,26%

Share PDRB

Share by Production (%yoy)



Industri Pengolahan
42,51%



Konstruksi
20,04%



Perdagangan Besar & Eceran
9,49%

Share by Expenditure (%yoy)



PMTB
43,43%



PK-RT
41,9%



Net Ekspor
11,8%

Nominal PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku
Rp91,29 T

Atas Dasar Harga Konstan
Rp53,85 T

INFLASI, NTP & NTN - Mar 2025



Tingkat Inflasi

2,01% yoy

0,38% mtm



Perhiasan Emas
0,56%



Sewa Rumah
0,14%



Minyak Goreng
0,13%



Nilai Tukar Petani

106,16

↓ 1,75% (mtm)
↑ 0,68% (yoy)



Nilai Tukar Nelayan

102,64

↓ 1,04% (mtm)
↓ 2,96% (yoy)

NERACA PERDAGANGAN - Q1 2025

Nilai Ekspor



▲ 31,36 yoy

USD 6.025,27 juta

Nilai Impor



▲ 44,60% yoy

USD 5.356,21 juta

Neraca Perdagangan



US\$670,07 juta

Pangsa Ekspor Kepri

1 25,79

2 19,25%

3 8,89%

INDIKATOR KESEJAHTERAAN

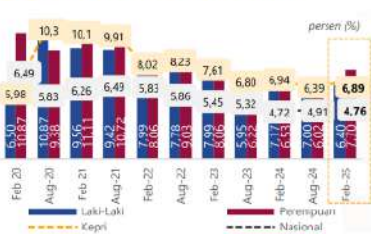
Tingkat Pengangguran Terbuka



3 in Indonesia

Feb 2025 6,89%

▼ 0,05 persen poin yoy



Tingkat Kemiskinan

124,96
Ribu Jiwa



Sep 2024 4,78%

↓ 0,59 poin persen
Mar 2024 - Sep 2024

Pedesaan: 8,55%

26,03
Ribu Jiwa

Perkotaan: 4,36%

102,23
Ribu Jiwa



Tingkat Ketimpangan



0,357
Sep 2024



Indeks Pembangunan Manusia 79,89



0,81
persen poin
yoy



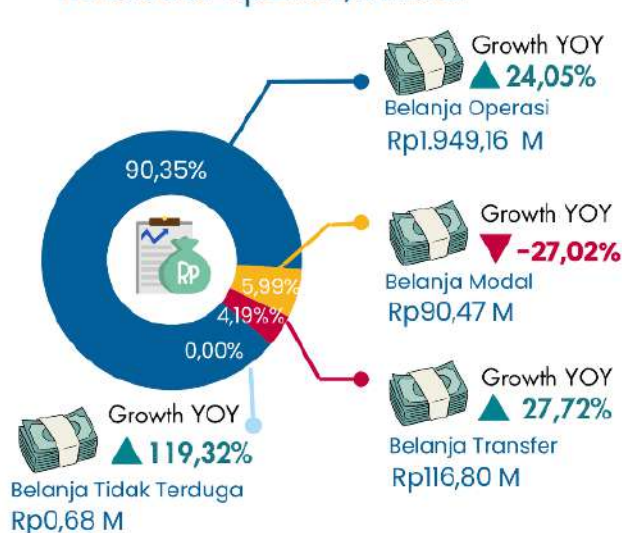
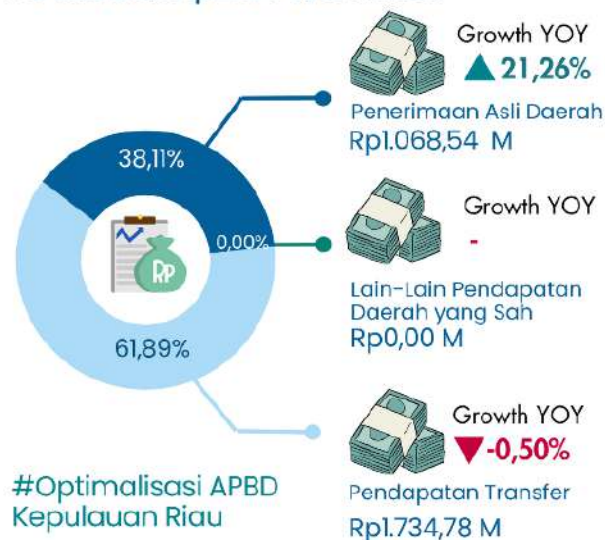
3 in Indonesia

Dashboard Kinerja Fiskal Regional

PAGU DAN REALISASI APBN - Q1 2025



PAGU DAN REALISASI APBD - Q1 2025



Dashboard Analisis Tematik

Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi

DATA KOPERASI DI KEPRI



Provinsi Kepulauan Riau

5 Kabupaten
2 Kota
275 Desa
144 Kelurahan



Jumlah Koperasi di Provinsi Kepri



Wilayah



Jumlah Koperasi



Koperasi Aktif



Koperasi Tidak Aktif

1. Kota Tanjungpinang	196 Koperasi	72 Koperasi	124 Koperasi
2. Kota Batam	1.021 Koperasi	262 Koperasi	759 Koperasi
3. Kab. Bintan.	181 Koperasi	181 Koperasi	(Data Unavailable)
4. Kab. Karimun	135 Koperasi	135 Koperasi	(Data Unavailable)
5. Kab. Lingga	189 Koperasi	38 Koperasi	151 Koperasi
6. Kab. Natuna	175 Koperasi	43 Koperasi	132 Koperasi
7. Kab. Kep. Anambas	80 Koperasi	11 Koperasi	69 Koperasi
Provinsi Kepri	1.977 Koperasi	742 Koperasi	1.235 Koperasi

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM/Tenaga Kerja, Usaha Mikro/Perindustrian & Perdagangan/ESDM dan Dinas PMD/Dukcapil Lingkup Kepri, 2025 (diolah)



Beberapa Tujuan Utama Pendirian Koperasi di Kepulauan Riau

WHY?

- ✓ Mengatasi keterbatasan akses permodalan
- ✓ Mengatasi kendala rantai distribusi pasokan yang panjang
- ✓ Mengurangi praktik tengkulak di pasar (*middleman*)
- ✓ Mendukung pengembangan sektor perikanan dan pertanian masyarakat

Komoditas Unggulan Hasil Pertanian di Kepulauan Riau



Kelapa



Perikanan



Rumput Laut



Durian



Rambutan



Karet



Cengkeh





PERKEMBANGAN, ISU, DAN DUKUNGAN TERHADAP KOPERASI DI KEPRI



Kondisi Koperasi di Kepri per tahun 2023

**Jumlah Anggota:**

69.510 Orang

▲ 1,21% (yoy)

**Total Nilai Aset:**

Rp926.423 Juta Rupiah

▲ 14,45% (yoy)

**Total Volume Usaha:**

Rp371.117 Juta Rupiah

▼ -9,82% (yoy)

Tantangan Pengembangan Koperasi di Kepri



Kondisi geografis kepri yang antar kabupaten/kota yang terpisah oleh lautan



Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan koperasi



Pendanaan pengembangan koperasi yang Masih Terbatas



Terbatasnya akses teknologi dan pemasaran atas koperasi

Dukungan Pemerintah dalam Mengembangkan Koperasi di Kepri



Dukungan APBN untuk Pengembangan Koperasi di Kepri

- Alokasi pada Belanja K/L melalui Kemenko UKM di Kepri pada tahun 2024 **mencapai Rp2,99 miliar.**
- Alokasi pada DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil **mencapai Rp5,11 miliar.**



Dukungan APBD untuk Pengembangan Koperasi di Kepri

Alokasi awal untuk percepatan pendirian KDMP mencapai **Rp2,25 miliar**, yang diperuntukan untuk:

- Penyediaan Biaya Akta Notaris Rp715 juta
- Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp285 juta
- Pelatihan dan Sertifikasi calon manajer koperasi sebesar Rp250 juta
- Insentif bagi koperasi unggul dan potensial sebesar Rp1miliar (untuk 5 koperasi).



Dukungan Pemerintah Lainnya untuk Pengembangan Koperasi di Kepri



BPS: Pilot Project Desa Cantik (Cinta Statistik)



Kemenparekraf: Eskalasi SDM, dukungan KKP terhadap koperasi nelayan dan perikanan,



Kemenko UKM: Program Inkubasi Bisnis Koperasi (INKOP), serta BUMN dan BUMD melalui SCR dan kemitraan ekonomi.

BAB I

Kemajuan ekonomi daerah
mendorong kesejahteraan
masyarakat melalui pertumbuhan
yang stabil dan inklusif.

ANALISIS EKONOMI REGIONAL





Pulau Senua, Kabupaten Natuna

- Pertumbuhan Ekonomi
- Produk Domestik Regional Bruto
- Tingkat Inflasi
- Nilai Tukar Petani
- Nilai Tukar Nelayan
- Gini Ratio
- Tingkat Pengangguran
- Indeks Pembangunan Manusia
- Tingkat Kemiskinan



BAB I – Analisis Ekonomi Regional

1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran dan Sektor/Lapangan Usaha

OVERVIEW

Kepri mencatatkan PDRB per kapita sebesar USD10.174, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran USD5.000 sehingga menempatkan Kepri sejajar dengan negara-negara besar. Capaian ini setara dengan Brasil yang saat ini memiliki PDRB per kapita USD 10.214 dan bahkan melampaui Thailand sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar di Asia Tenggara.

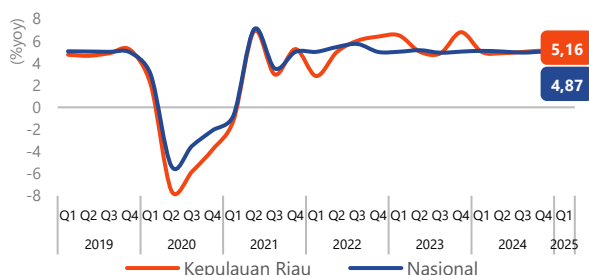
Pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan 1 tahun 2025 sebesar 5,16 persen menempatkan Kepri di posisi ke-13 dari 38 provinsi secara nasional. Kabupaten Bintan tumbuh paling tinggi 8,9 persen dengan dominasi sektor industri pengolahan. Struktur ekonomi kepri yang didominasi oleh industri mendorong perekonomian Kepri lebih produktif karena sektor industri selain merupakan sektor padat karya juga mampu menghasilkan nilai tambah dan memiliki faktor pengungkit yaitu teknologi. Teknologi memberikan fondasi yang kuat dan stabil bagi perekonomian di Kepri.

A. Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*)

Mengawali tahun 2025, kondisi perekonomian global dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian. Eskalasi perang tarif impor antara US dan China, konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung, volatilitas nilai tukar dan suku bunga *The Fed* yang bertahan pada level tinggi di kisaran 4,25%-4,5%, serta melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi global turut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian domestik.

Meskipun dibayangi oleh *outlook* perekonomian global yang cenderung *stagnan*, kondisi perekonomian Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap mampu menunjukkan kinerja positif. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kepri yang mampu melanjutkan tren yang positif.

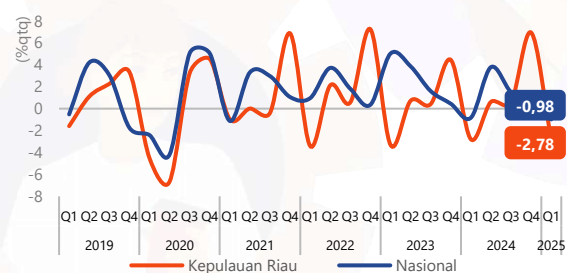
Grafik 1.1 – Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2019 – Q1 2025 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat tumbuh positif sebesar 5,16 persen (yoy). Selama tiga tahun terakhir, perekonomian Kepri terus menunjukkan kinerjanya dengan angka pertumbuhan positif. Apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh 4,87 persen (yoy), pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh lebih tinggi sebesar 0,19 persen poin (yoy).

Grafik 1.2 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2019 – Q1 2025 (%qtq)



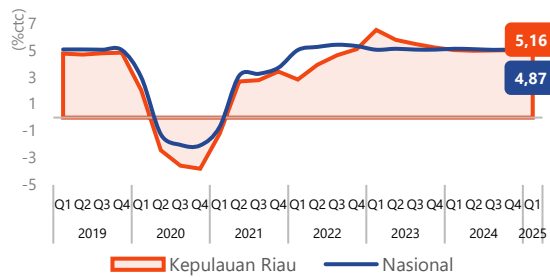
Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Jika dilihat secara triwulanan (qtq), pertumbuhan ekonomi Kepri menunjukkan tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perekonomian Kepri mengalami kontraksi sebesar -2,78 persen (qtq), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi perekonomian nasional -0,98 persen (qtq).

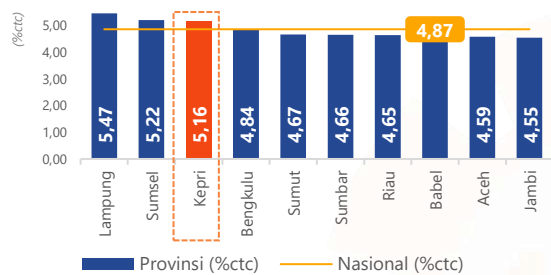




Grafik 1.3 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2019 – Q1 2025 (%ctc)



Grafik 1.4 – Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan I 2025 (%ctc)



Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

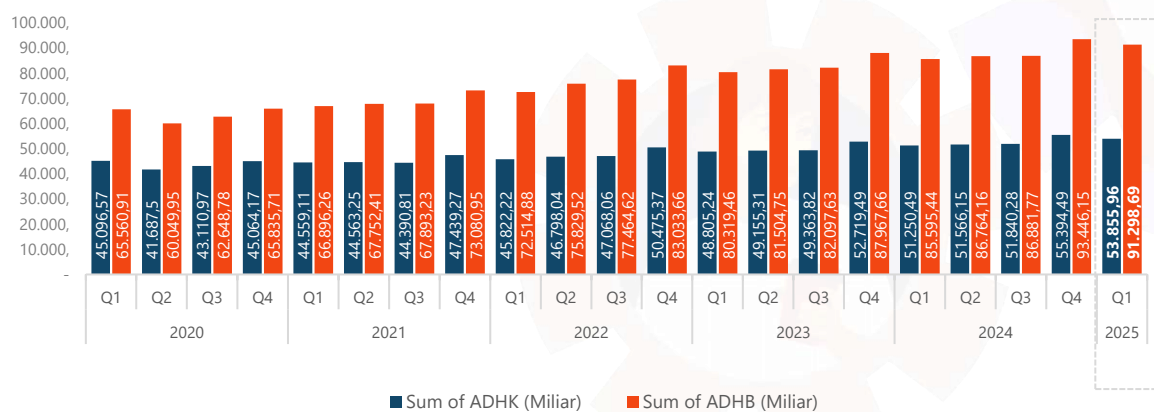
Dengan capaian pertumbuhan ekonomi kumulatif di triwulan I 2025 sebesar 5,16 persen (ctc), Kepri berhasil menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan angka pertumbuhan tertinggi ke-tiga di regional Sumatera. Perekonomian tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,26 persen dari total pertumbuhan ekonomi di Regional Sumatera, turun 0,16 persen poin dibandingkan dengan triwulan I 2025.

Menurut Badan Pemeringkat **Global Fitch**, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 menjadi 4,9% dan tahun 2026 menjadi 4,6%. Perang dagang global dan pelemahan belanja konsumen menjadi faktor terbesar pelemahan tersebut. Menurut Thomas Rookmaaker kepada Reuters “akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% tahun 2025 ini karena banyak ketidakpastian global terutama terkait perang tarif.

Pelemahan pendapatan negara membatasi kemampuan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan 5,2% tahun 2025, naik dari pertumbuhan 5,03% tahun lalu. Ekonomi tumbuh sebesar 4,87% (yoy) pada triwulan I 2025, angka terendah sejak triwulan 3 tahun 2021. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tarif baru Amerika Serikat dapat mengurangi PDB sebesar 0,3 hingga 0,5 poin persentase bila tidak ditemukan kesepakatan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat pada bulan Juli 2025 ini.

B. Nominal dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha

Grafik 1.5 – Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kepri Tahun 2020-Q1 2025 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu tertentu. Secara nominal, PDRB diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Pada triwulan I 2025, perekonomian Kepri tumbuh 5,16 persen (yoy) dengan nominal **PDRB ADHK sebesar Rp53.855,96 miliar dan PDRB ADHB sebesar Rp91.298,69 miliar.**





1) PDRB berdasarkan Pengeluaran

PDRB berdasarkan pengeluaran dihitung berdasarkan penjumlahan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengguna akhir. Pada triwulan I 2025, PDRB Kepri dari sisi pengeluaran secara signifikan didominasi oleh **Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi dengan share 43,43 persen** dari total PDRB. Komponen PMTB tersebut tumbuh 3,27 (yoy) dan berkontraksi 4,97 persen (qtoq).

Grafik 1.6 – Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan I 2025 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

a) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Dengan **share kontribusi sebesar 43,43 persen (yoy)**, PMTB atau investasi mendominasi komponen PDRB Kepri dari sisi pengeluaran pada triwulan I 2025. Berbeda dengan profil PDRB pada provinsi lain maupun nasional yang mayoritas ditopang oleh konsumsi rumah tangga, Kepri justru ditopang dari sisi investasi yang menunjukkan Kepri bergerak lebih produktif melalui sektor-sektor yang menghasilkan.

Indikator kinerja sektor manufaktur adalah **Purchasing Managers Index (PMI)**. Berdasarkan S&P Global Indonesia Manufacturing PMI turun pada April 2025 sebesar 46,7 dari 52,4 di Maret 2025, menandakan penurunan pertama kegiatan pabrik selama 6 bulan terakhir. Kinerja dari usaha manufaktur juga mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir. Indikator PMI menjadi krusial untuk diperhatikan karena Kepri didominasi oleh kegiatan industri manufaktur terutama di Kota Batam dan sekitarnya.

Penurunan PMI harus dapat diantisipasi oleh Pemda dengan melakukan beberapa cara seperti kemudahan perizinan berusaha, kemudahan masuknya investasi dalam dan luar negeri ke area *Free Trade Zone* (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di wilayah Tanjungpinang, Bintan dan Tanjung Balai Karimun sehingga *center of economy* tidak terpusat di Kota Batam.

Kontribusi PMTB di Kepri didorong oleh kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang secara keseluruhan mencapai Rp13,22 triliun dan tumbuh 28,6 persen (yoy) pada triwulan I 2025. Investasi tersebut mayoritas berada di Kota Batam dengan realisasi investasi Rp8,62 triliun atau 65,20 persen dari total penanaman modal di Kepri.

Dari total realisasi PMA Kepri triwulan I 2025 sebesar Rp9,53 triliun, Singapura menjadi negara investor terbesar dengan realisasi investasi yang tercatat Rp6,30 triliun atau 66,10 persen dari total PMA di Kepri. Melalui penanaman modal yang ada, Kepri berhasil menyerap 11.499 tenaga kerja dari PMA dan 51.996 tenaga kerja pada triwulan I 2025.

b) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

PK-RT pada triwulan I 2025 berkontribusi 41,90 persen dari PDRB Kepri dan tumbuh 3,15 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada komponen PK-RT sejalan dengan meningkatnya mobilitas aktivitas ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisman dan wisnus di Kepri yang masing-masing tumbuh 8,26 persen (yoy) dan 4,77 persen (yoy). Pemberian THR bagi para pekerja swasta dan ASN juga turut mendorong meningkatkan pengeluaran pada PK-RT di triwulan I 2025.





Wisman berkebangsaan Singapura, Malaysia dan Tiongkok menjadi tiga tertinggi yang berkunjung ke Kepri. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang 1 di Kepri mencapai 53,20 persen dan Bintang 5 sebesar 32,30 persen.

TPK bulan Maret 2025 di Kepri lebih tinggi 7,33 poin dibandingkan nasional yang sebesar 33,56 persen. Letak geografis Kepri yang berdampingan dengan Singapura dan Malaysia dapat dioptimalkan dengan mengembangkan objek wisata yang sesuai sehingga Kepri dapat menjadi alternatif tempat wisata di Asia Tenggara

Hal tersebut turut mendorong peningkatan permintaan di berbagai sektor usaha karena tingginya mobilitas masyarakat sehingga menjadi stimulus aktivitas ekonomi, khususnya pada kelompok transportasi, komunikasi, serta hotel dan restoran. Pergerakan ekonomi pada PK-RT juga tercermin melalui Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bulan Maret 2025 yang tetap ebrada di level optimis sebesar 121,1.

c) Net Ekspor

Komponen net ekspor pada triwulan I 2025 berkontribusi 11,8 persen (yoy) dari total PDRB Kepri. Bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, net ekspor menjadi komponen dengan *growth* tertinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu tumbuh positif 29,25 persen (*qta*). Pertumbuhan tersebut turut didorong oleh meningkatnya permintaan luar negeri, khususnya terhadap kelompok mesin dan elektronik ke pasar Asia dan Amerika.

Secara kumulatif, nilai ekspor Kepri pada triwulan I 2025 tercatat sebesar US\$6.026,28 juta, dengan aktivitas yang didominasi oleh kelompok industri, berkontribusi sebesar 82,65 persen dari total nilai ekspor di Kepri. Dominasi kelompok industri ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Selanjutnya, nilai impor Kepri pada triwulan I 2025 tercatat sebesar US\$5.356,21 juta. Capaian tersebut juga didominasi oleh kelompok industri dengan kontribusi sebesar

81,81 persen. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan bahan baku dan barang modal di Kepri untuk mendukung kegiatan produksi pada sektor industri.

d) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)

PK-P Kepri pada triwulan I 2025 mencatat kontribusi sebesar 3,31 persen (yoy) terhadap total PDRB Kepri. PK-P menjadi salah satu komponen yang mengalami kontraksi terdalam sebesar 50,39 persen (yoy). Penurunan kegiatan apda PK-P dipengaruhi oleh efisiensi Belanja Pemerintah yang dilakukan sejak akhir tahun 2024 hingga triwulan I 2025.

Realisasi Belanja Negara pada triwulan I 2025 sebesar Rp2.628,34 miliar mengalami kontraksi 23,95 persen (yoy), dengan penurunan terbesar pada Belanja Modal dan Belanja Barang. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah hingga triwulan I 2025 mencapai RRp2.084,30 miliar turut mengalami kontraksi 8,52 persen (yoy).

Pemprov Kepri mengembangkan kerjasama dengan Norpac Fisheries Export untuk kerja sama ekspor komoditas kelautan dan perikanan menuju pasar Amerika Serikat.

Peluang ekspor bukan hanya produk mentah tapi juga pengolahan hasil perikanan secara lokal untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*).

2) PDRB berdasarkan Lapangan Usaha

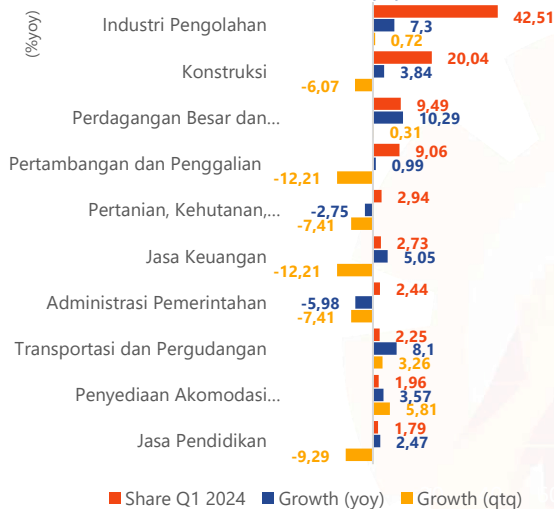
PDRB menurut Lapangan Usaha (LU) dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri. Pada Triwulan I 2025, secara umum lapangan usaha di Kepri tumbuh positif (yoy).





Dengan kontribusi sebesar 42,51 persen (yoy) pada triwulan I 2025, sektor industri pengolahan konsisten menjadi **leading sectors** perekonomian Kepri. Selanjutnya, sektor konstruksi dan perdagangan besar turut mendominasi kegiatan ekonomi di Kepri dengan kontribusi masing-masing 20,04 persen (yoy) dan 9,49 persen (yoy).

Grafik 1.7 – Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan I 2025 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

a) Industri Pengolahan

Pada triwulan I 2025, industri pengolahan berkontribusi sebesar 42,51 persen (yoy) terhadap nilai PDRB di Kepri. Pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan ditopang dari konsistensi permintaan barang tingkat domestik dan mancanegara. Hal tersebut kemudian meningkatkan aktivitas ekonomi di Kepri.

Perkembangan LU industri didukung oleh peningkatan aktivitas produksi melalui indikator penjualan listrik segmen industri yang tumbuh 15,39 persen (yoy) di Triwulan I 2025 (PLN Batam, 2025). Investasi pada industri pengolahan di Kepri turut didorong oleh peran penting Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif fiskal, terutama di **Zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** serta perkembangan infrastruktur di Kepri. Hadirnya *Foreign Direct Investment* (FDI) dari negara tetangga, khususnya Singapura,

Tiongkok, dan Jepang yang turut memperkuat momentum perkembangan LU industri pengolahan di Kepri.

PDRB Kab. Bintan sebesar 8,9 persen didominasi oleh industri pengolahan seperti:

1. **Industri Elektronik.** PT. CCI Bintan Indonesia merupakan pabrik elektronik yang besar dengan manajemen di bawah Singapura
2. **Industri Pengolahan Mineral.** PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang beroperasi dengan pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina.
3. **Industri Perikanan.** PT. Bintan Intan Gemilang (BIG) adalah pabrik pengolahan ikan dan fasilitas *cold storage* dengan kapasitas ekspor.
4. **Industri Pengolahan Limbah.** PT. Multi Hanna Kreasindo Tbk. Menyediakan solusi pengolahan limbah industri.

b) Konstruksi

LU konstruksi pada triwulan I 2025 memberikan kontribusi sebesar 20,04 persen (yoy) terhadap PDRB Kepri. Perkembangan LU konstruksi di Kepri sejalan beberapa output strategis APBN di Kepri, seperti dilaksanakannya Pembangunan *Rempang Eco City* di Kota Batam, revitalisasi objek wisata Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, penataan 9 ruas jalan di Kota Batam, serta proyek pembangunan strategis Kepri lain yang sedang dibangun.

Kegiatan pengembangan energi hijau dan transisi energi, serta kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diproyeksikan akan semakin menggerakkan sektor industri dan konstruksi di Kepri.

c) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor berkontribusi 9,49 persen (yoy) terhadap PDRB Kepri pada Triwulan I 2025. Perdagangan besar berhasil menjadi sektor dengan





pertumbuhan tahunan terbesar yaitu tumbuh 10,29 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh volume perdagangan dan konsumsi barang di Kepri yang tetap terjaga. Sektor ini juga menjadi sangat penting karena mampu menyerap banyak tenaga kerja.

d) Pertambangan dan Penggalian

LU pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi 9,06 persen (yoy) terhadap PDRB Kepri. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kepri didorong oleh perusahaan migas yang kembali beroperasi di Perairan Kepri sejak akhir tahun 2024. Produk unggulan pertambangan Kepri didominasi oleh timah, bauksit, dan pasir kuarsa.

1.1.2 Kontribusi Fiskal Pemerintah terhadap Pembentukan PDRB

Dalam menghadapi tekanan dan perubahan dinamis di tingkat global, peran fiskal hadir sebagai penggerak utama roda perekonomian. Melalui belanja negara dan daerah, stimulus ekonomi diwujudkan secara nyata dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan aktivitas ekonomi lainnya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

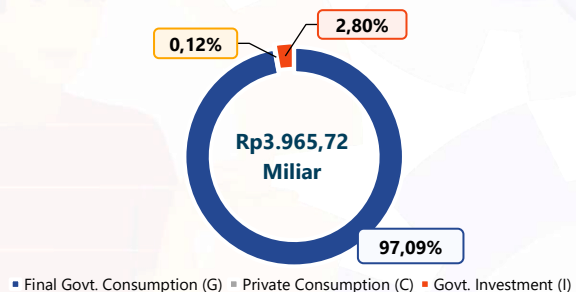
Mengacu pada kerangka pemikiran Keynesian, Output ekonomi suatu daerah atau PDRB dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), serta net ekspor (NX). Formula ini tercermin dalam persamaan $Y = C + I + G + NX$, yang menegaskan bahwa setiap dorongan pada konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan perdagangan luar negeri akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan wilayah.

Dalam hal ini, kontribusi fiskal melalui Belanja APBN dan APBD memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil *mapping* atau *proxy*

konsolidasi Belanja APBN dan APBD Regional Kepri triwulan I 2025, diperoleh kontribusi fiskal terhadap perekonomian sebesar Rp3.965,72 miliar. Apabila dirinci lebih lanjut, diperoleh hasil relasi kontribusi fiskal terhadap pembentukan PDRB pada sektor riil Kepri sebagai berikut.

Kontribusi fiskal yang berasal dari peran pemerintah pusat dan daerah tercermin melalui Belanja APBN dan Belanja APBD yang berfungsi sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pembentukan PDRB.

Grafik 1.8 – Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Kepri Triwulan I 2025



Sumber: Laporan ALCo Regional Kepri Maret 2025, Kanwil DJPb Provinsi Kepri, (diolah)

- 1) Belanja Pegawai, serta belanja lain seperti Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga/Belanja Lain-Lain, dan Transfer ke Daerah, yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pengeluaran Pemerintah (G) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp3.761,29 miliar (94,85 persen).
- 2) Belanja Barang, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Konsumsi Pemerintah (C) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp93,51 miliar (2,36 persen).
- 3) Belanja Modal yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Investasi (I) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp110,90 miliar (2,80 persen).

Tidak hanya melalui Realisasi Belanja APBN dan APBD, kontribusi fiskal terhadap perekonomian juga didukung oleh kebijakan fiskal. Pemberian insentif pajak, dukungan





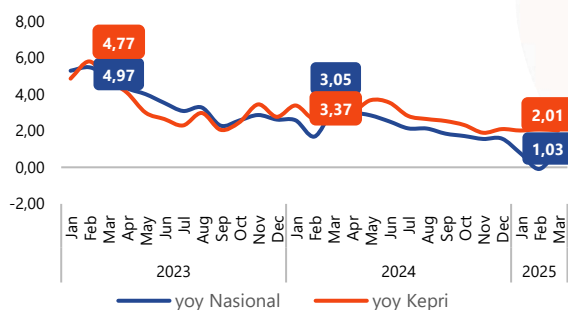
pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta peningkatan investasi infrastruktur turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kepri.

1.1.3 Tingkat Inflasi

Pergerakan tekanan inflasi Kepri menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan tren inflasi tersebut, terlihat terjadinya inflasi atas permintaan (*demand side*) pada pada bulan-bulan yang bertepatan dengan perayaan hari besar keagamaan, seperti Bulan Puasa, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, serta masa liburan sekolah. Selain itu, faktor penawaran (*supply side*) seperti tingginya curah hujan dan berakhirnya masa panen juga berkontribusi terhadap inflasi, terutama akibat **terbatasnya pasokan bahan makanan di Kepri yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau-pulau.**

Tekanan inflasi Kepri di triwulan I 2025 menunjukkan tren yang menurun. Inflasi menjadi alat untuk memahami stabilitas ekonomi di suatu wilayah, khususnya dalam melihat potensi dan kemampuan daya beli masyarakat. Pada tahun 2025, tekanan inflasi di Kepri dihitung dari 2 kota dan 1 kabupaten (Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun).

Grafik 1.9 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2023-Maret 2025 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2025, (diolah)

Pada bulan Maret 2025, Kepri mengalami inflasi sebesar 2,01 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,07. Tekanan inflasi di Kepri tetap terjaga dan

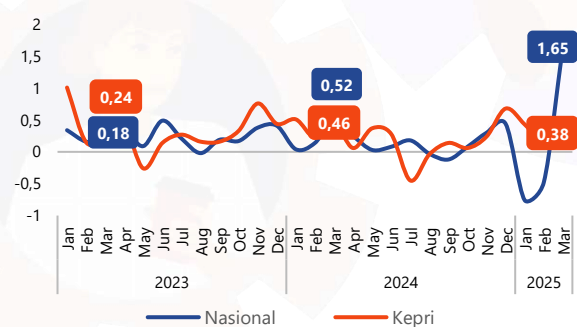
stabil sesuai RPJMD Kepri tahun 2025 yang menargetkan inflasi pada angka $2,94 \pm 1$.

Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 2,52 persen dengan IHK sebesar 108,80 dan terendah terjadi di Kota Tanjungpinang dengan inflasi 0,07 persen dengan IHK 105,05. Sementara untuk Kabupaten Karimun, inflasi tercatat sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 105,77.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terbesar bulan Maret 2025 (yoy) adalah emas perhiasan (0,56 persen), sewa rumah (0,14 persen), minyak goreng (0,13 persen), sigaret kretek mesin (0,10 persen), dan beras (0,09 persen).

Jika dilihat secara lebih rinci, tiga kelompok terbesar yang dominan menyumbang inflasi Kepri di bulan Maret 2025 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi 2,31 persen (yoy) dan memberi andil inflasi 0,69 persen poin dari total inflasi di Kepri. Selanjutnya, inflasi Kepri didominasi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Grafik 1.10 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2023-Maret 2025 (%mtm)



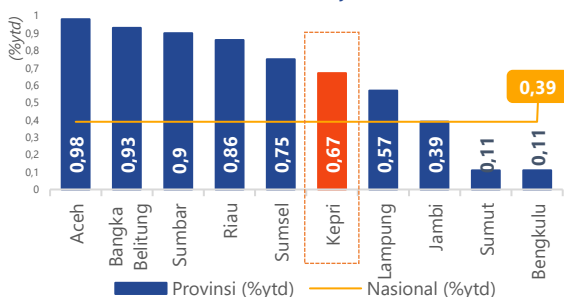
Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2025, tekanan inflasi Kepri di bulan Maret 2025 tercatat mengalami inflasi 0,38 persen (mtm). Inflasi ini terjadi karena adanya peningkatan IHK dari 107,66 di Februari 2025 menjadi 108,07 pada Maret 2025.





Grafik 1.11 – Inflasi pada Provinsi di Regional Sumatera per Maret 2025 (%ytd)



Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Di sepanjang triwulan I 2025, Kepri menempati peringkat keenam di regional Sumatera, dengan tingkat inflasi 0,67 persen (ytd). Tekanan inflasi di Kepri terutama muncul akibat tantangan logistik dan hambatan distribusi yang masih menjadi persoalan utama di wilayah Kepulauan (*archipelagic region*).

Selain itu, terbatasnya pasokan juga dipicu oleh faktor geografis serta cuaca ekstrem, seperti tingginya curah hujan, yang memperlambat arus distribusi dan mempersempit ketersediaan barang di pasar lokal. Kendala tersebut kerap mendorong kenaikan harga barang, khususnya bahan makanan dan kebutuhan pokok.

Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi dalam menekan laju inflasi di Kepri. Pengendalian inflasi menjadi krusial dalam merespons peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik khususnya menjelang hari raya Idul Fitri di Kepri yang rentan terpengaruh cuaca ekstrem yang mengganggu ketersediaan barang di pasar.

Sejumlah strategi yang dilakukan oleh TPID tertuang dalam kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan antara lain:

- 1) **Keterjangkauan Harga** Pemerintah dilakukan dengan mengadakan 144 pasar murah di seluruh kabupaten/kota serta mendukung penyaluran SPHP oleh Bulog sebanyak 1.559 kali di Batam dan 705 kali di

Natuna, guna menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau.

- 2) **Ketersediaan Pasokan Dukungan terhadap produksi pangan** dilakukan melalui penyaluran traktor, solar dome, 3 unit *greenhouse*, serta 5 rumah pemasaran untuk meningkatkan produksi, hilirisasi, dan ketahanan pasokan.
- 3) **Kelancaran Distribusi Pangan** diperkuat melalui KAD B2B antara Pelabuhan Karimun dan Bulog, pengiriman cabai antarwilayah, serta fasilitasi distribusi berupa bantuan kendaraan dan bongkar muat untuk mendukung pasar murah dan program subsidi.
- 4) **Komunikasi Efektif Penguatan** koordinasi dilakukan lewat 39 forum kelembagaan, 4 kegiatan *capacity building*, digitalisasi data melalui *dashboardtpi.com*, serta edukasi publik melalui site visit, siaran pers, dan *talkshow*.

Selain dari kegiatan oleh TPID, penanganan inflasi di Kepri juga didukung oleh APBN sebagai instrument fiskal. Pada tahun 2025, diperoleh pagu dan realisasi belanja APBN untuk pengendalian inflasi di Kepri sebagai berikut:

Tabel 1.1 – Pagu dan Realisasi Belanja APBN untuk Penanganan Inflasi di Kepri TA 2025

K/L	Program	Pagu (Rp M)	Real (Rp M)	Real (%)
Kemenhub	Infrastruktur Konektifitas	115,45	6,09	5,28
Kemen PU	Ketahanan Sumber Daya Air	40,13	4,50	11,22
BPS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	0,52	0,05	10,01
BPN	Ketersediaan, Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	0,44	0,00	0,00
Kemen ATR	Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	0,20	0,00	0,00
Kementan	Ketersediaan, Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	0,11	0,00	0,00

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Alokasi Belanja APBN di atas menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan stabilisasi di Kepri. Meskipun realisasi anggaran pada triwulan I 2025 masih





tergolong rendah, khususnya di sektor infrastruktur konektivitas dan ketahanan sumber daya air, alokasi pagu anggaran akan terus dioptimalkan. Kolaborasi antara Belanja Pemerintah Pusat dan program TPID Kepri diharapkan mampu memperkuat stabilitas harga dan menjamin distribusi pasokan pangan secara merata di Kepri.

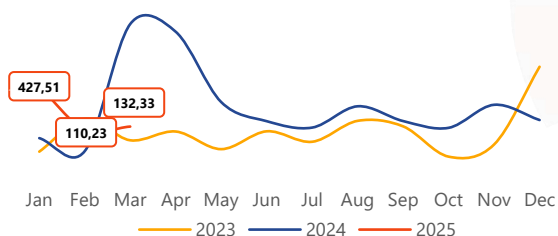
1.1.4 Neraca Perdagangan

Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan luar negeri Kepri periode triwulan I 2025 mengalami Surplus Perdagangan US\$670,07 Juta. Angka tersebut diperoleh dari total nilai ekspor Kepri hingga bulan Maret 2025 yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impornya, khususnya dari golongan Non Migas.

Untuk mendorong kinerja neraca perdagangan internasional, Pemerintah Pusat bersama Pemda terus mengupayakan penguatan infrastruktur Hub Logistik. Langkah ini ditujukan untuk mendukung kemajuan ekonomi daerah serta kelancaran aktivitas ekspor dan impor. Dukungan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara arus barang impor dan ekspor guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 1.12 – Neraca Perdagangan Internasional Bulanan Provinsi Kepri Tahun 2023-2025 (Juta US\$)

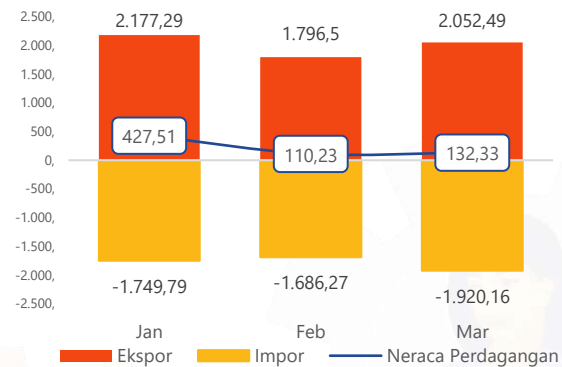


Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Ekspor

Total nilai ekspor Kepri di triwulan I 2025 senilai US\$6.025,27 Juta dan tumbuh 31,36 persen (ctc).

Grafik 1.13 – Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Kepri, Jan-Mar 2025 (Juta US\$)



Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Secara kumulatif, sektor Migas dan Non Migas tumbuh 5,36 persen (mtm) dan 38,30 persen (ctc) secara berturut-turut. Penurunan terbesar secara dominan dipengaruhi oleh meningkatnya volume ekspor sektor industri dan peningkatan pada tarif ekspor di awal tahun 2025.

Berdasarkan negara tujuan, Singapura menjadi negara pangsa ekspor terbesar Kepri dengan total ekspor di triwulan I 2025 sebesar US\$1.554,07 juta atau 25,79 persen dari total ekspor Kepri. Kemudian, pangsa ekspor terbesar disusul oleh USA US\$1.159,82 juta, dan Saudi Arabia US\$532,92 juta. Ekspor tersebut didominasi oleh Produk Bahan Bakar Mineral 36,88 persen, Mesin/Peralatan Listrik 24,75 persen, serta Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik 9,42 persen, dan sisanya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata *share* <5 persen.

Apabila dilihat dari sisi fiskal, pertumbuhan pada nilai ekspor di triwulan I 2025 turut memberi pengaruh positif terhadap realisasi Pendapatan Bea Keluar. Sampai dengan 31 Maret 2025, realisasi Bea Keluar mencapai Rp159,44 miliar yang tumbuh secara signifikan sebesar 1677,10 persen (yoy).

Impor

Secara kumulatif, nilai impor Kepri pada triwulan I 2025 tercatat US\$5.356,21 Juta, tumbuh 44,60 persen (ctc). Peningkatan impor





tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pada sektor migas sebesar 93,79 persen (*ctc*) dan sektor non migas sebesar 36,87 persen (*ctc*).

Berdasarkan negara pemasok impor, impor di Kepri didominasi oleh Tiongkok dengan nilai impor US\$1.881,19 juta atau 25,12 persen dari total impor Kepri yang setelahnya disusul oleh Singapura yang menyumbang 11,68 persen dan Malaysia yang menyumbang 9,82 persen dari total impor di Kepri.

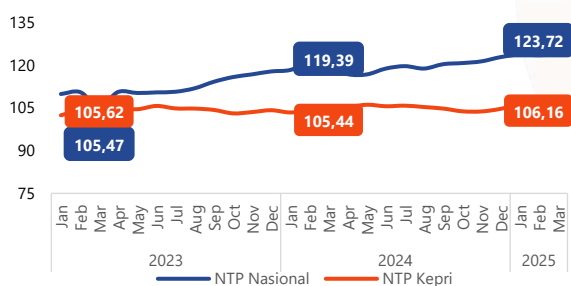
Dari sisi golongan penggunaan barang, impor di Kepri masih didominasi oleh Barang Baku dan Penolong (82,09 persen), yang disusul oleh Barang Modal (13,57 persen) dan Barang Konsumsi (4,34 persen). Barang Baku dan Penolong yang menjadi mayoritas produk impor ke Kepri mencerminkan bahwa sektor unggulan di Kepri, ada pada sektor industri manufaktur, khususnya pada produk mesin dan peralatan listrik yang nantinya akan kembali di ekspor ke luar negeri.

Peningkatan nilai impor di Kepri turut memberi pengaruh positif terhadap penerimaan APBN regional. Hingga 31 Maret 2025, realisasi Pendapatan Bea Masuk di Kepri mencapai Rp109,82 miliar dan tumbuh 30,65 persen (*yoy*).

1.2 Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan/Pembangunan

1.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

Grafik 1.14 – Perkembangan NTP di Kepri Tahun 2023-2025



Sumber Data: BPS, 2025 (diolah)

NTP Kepri pada bulan Maret 2025 tercatat sebesar 106,16, turun 1,75 persen (*mtm*) sejak bulan Februari 2025, namun tumbuh 0,68 persen (*yoy*). Capaian NTP tersebut telah

melebihi target pada RPJMD Kepri tahun 2021-2026 yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 99,98. **NTP Kepri juga masih berada di bawah rata-rata NTP nasional** yang pada bulan Maret 2025 mencapai 123,72.

Apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2025, **Indeks Harga yang Diterima Petani (It)** di Kepri per Maret 2025 mengalami kontraksi 0,81 persen (*mtm*). Pada bulan Maret 2025 tiga dari lima subsektor mengalami penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It).

Subsektor yang mengalami penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) di Kepri secara berturut-turut adalah subsektor hortikultura yang turun 6,50 persen, subsektor peternakan yang turun 0,86 persen, dan subsektor perikanan yang turun 0,77 persen. Di sisi lain, subsektor yang mengalami kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) adalah subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat yang naik 4,35 persen dan 0,27 persen secara berturut-turut.

Sebagai provinsi kepulauan, Kepri menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan sektor pertanian. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya kapasitas sumber daya manusia akibat kondisi geografis, serta minimnya pemanfaatan teknologi. Di samping itu, keterbatasan lahan pertanian turut menjadi kendala utama dalam mengembangkan sektor pertanian di Kepri.

Pada tahun 2025, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Pagu Belanja APBN pada Kementerian Pertanian sebesar Rp6,91 miliar yang hingga bulan Maret 2025 telah terealisasi sebesar Rp611,81 juta atau 8,84 persen dari Pagu 2025. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk melaksanakan kegiatan: 1) Perlindungan dan penyediaan lahan; 2) Fasilitasi pupuk dan pestisida; 3) Penyuluhan pertanian; 4) Pengelolaan sistem penyediaan dan



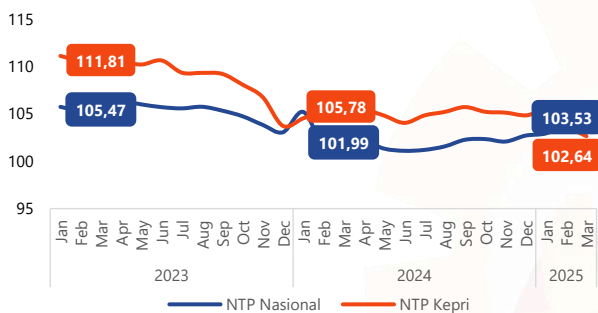


pengawasan alsintan, serta kegiatan lain yang mendukung sektor pertanian di Kepri.

1.2.2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dengan 98 persen wilayah yang berupa lautan, Kepri menjadi salah satu provinsi maritim yang memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, serta sektor lain yang berkaitan dengan ekonomi maritim dan pesisir.

Grafik 1.15 – Perkembangan NTN di Kepri Tahun 2023 – 2025



Sumber Data: BPS, 2025 (diolah)

NTN Kepri di bulan Maret 2025 sebagaimana tergambar pada Grafik 1.15 mencapai 102,64. NTN tersebut ternyata belum mencapai target NTN Kepri pada RPJMD 2021-2026 yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 116,1. NTN tersebut juga berada di bawah NTN nasional yang pada bulan Maret 2025 mencapai 103,53.

Pada bulan Maret 2025, NTN Kepri mengalami penurunan sebesar 1,04 persen (*mtm*) dan turun 2,96 persen (*yoy*). Penurunan NTN Kepri di bulan Maret 2025 (*yoy*) dipengaruhi oleh penurunan indeks harga yang diterima nelayan tangkap sebesar 0,77 persen. Beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga antara lain adalah komoditi ikan cakalang sebesar 4,79 persen; ketamba sebesar 3,54 persen; kuwe sebesar 2,65 persen; kakap sebesar 2,64 persen; kurisi sebesar 2,46 persen; kerapu sebesar 1,80 persen; selar sebesar 1,68 persen; dan kembung sebesar 1,65 persen.

Meskipun merupakan wilayah Kepulauan, capaian NTN di Kepri masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI), fasilitas penyimpanan berpendingin (*cold storage*), serta akses terhadap BBM, menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas kegiatan penangkapan dan distribusi hasil laut. Selain itu, kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan nelayan, seperti birokrasi perizinan yang rumit atau minimnya subsidi dan perlindungan harga, turut membatasi ruang gerak nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan di Kepri.

Di samping itu, sektor perikanan Kepri juga menghadapi beberapa tantangan lain. Tantangan tersebut antara lain adalah: 1) maraknya *illegal fishing* di wilayah perbatasan Natuna yang mengurangi hasil laut bagi nelayan lokal; 2) pencemaran laut oleh limbah kapal internasional di Selat Malaka; 3) terbatasnya teknologi pengolahan hasil perikanan yang belum berstandar ekspor; 4) kondisi cuaca buruk dan degradasi ekosistem yang berdampak pada penurunan hasil tangkapan. Maka dari itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengupayakan perkembangan sektor perikanan di Kepri yang dilaksanakan melalui beberapa program.

Pada tahun 2025, alokasi Pagu Belanja APBN pada **Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kepri** adalah sebesar Rp69,05 miliar. Sampai dengan triwulan I 2025, Belanja tersebut telah direalisasikan sebesar Rp9,84 miliar atau 14,24 persen dari pagu TA 2025.

Belanja tersebut ditujukan untuk melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung sektor perikanan Kepri, antara lain: 1) Operasi armada dan pengembangan prasarana dan sarana; 2) pemantauan dan pengawasan sumber daya laut; 3) dukungan pengelolaan budi daya ikan air laut, air tawar, dan rumput laut; 4) pemasaran hasil kelautan; 5) pengelolaan perizinan dan kenelayanan; 6) pengelolaan sumber daya ikan serta kegiatan



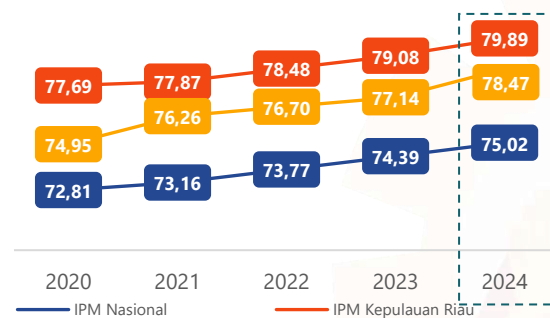


lainnya yang membantu para nelayan untuk meningkatkan kualitas produksinya.

1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2024, IPM Kepri tercatat sebesar 79,89, meningkat sebesar 0,81 persen point (yoy). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu daerah atau negara.

Grafik 1.16 - Perkembangan IPM Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2024

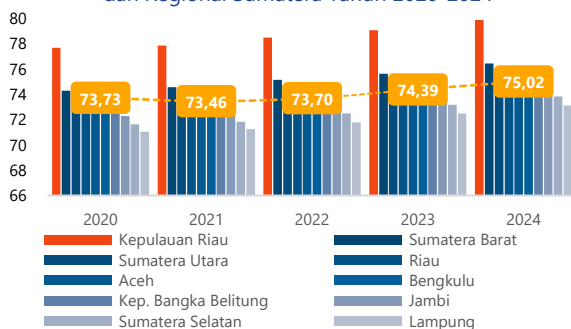


Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan IPM Nasional di tahun 2024 dengan capaian indeks 75,02, IPM Kepri lebih tinggi 4,87 poin. IPM Kepri juga telah melampaui target IPM yang tertuang di RPJMD Kepri 2021-2026 dengan target 77,58 di tahun 2024.

IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, IPM < 60 (rendah), $60 \leq \text{IPM} < 70$ (sedang), $70 \leq \text{IPM} < 80$ (tinggi), $\text{IPM} \geq 80$ (sangat tinggi). Sejak tahun 2010, status pembangunan manusia di Kepri sudah berada di level "tinggi".

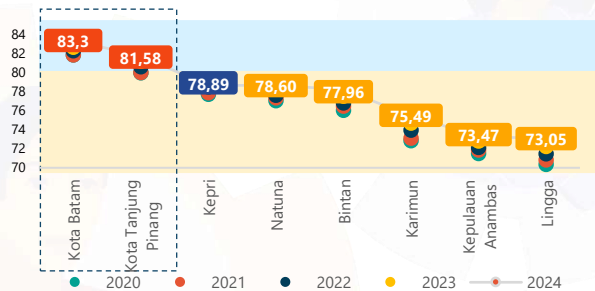
Grafik 1.17 - Perkembangan IPM Provinsi Kepri, Nasional, dan Regional Sumatera Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, IPM Kepri berada pada peringkat tertinggi selama enam tahun berturut-turut. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Aceh, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung secara berturut-turut.

Grafik 1.18 – Nilai IPM Kabupaten/Kota di Kepri per Kategori IPM Tahun 2020 – 2024

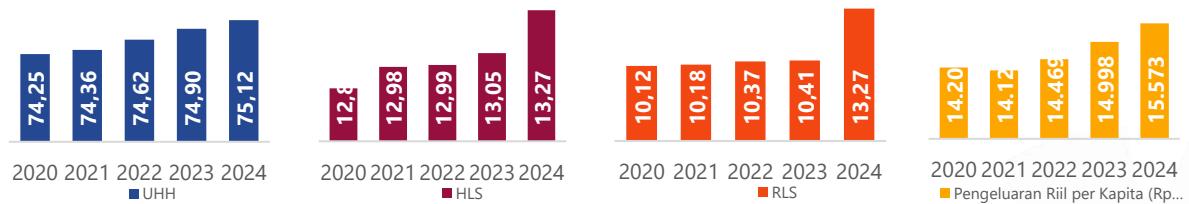


Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Berdasarkan IPM yang terdapat pada Grafik 1.18, dapat dilihat bahwa capaian IPM di seluruh kab/kota di Provinsi Kepri pada tahun di sepanjang tahun 2020-2024 berada pada rentang kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang berada pada kategori IPM "Sangat Tinggi" ≥ 80 dengan IPM di tahun 2023 masing-masing sebesar 83,32 dan 81,58. Keberlanjutan peningkatan IPM Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Kepri.

IPM terbentuk dari tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pendidikan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi ini diukur menggunakan beberapa indikator: dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup layak diukur dari pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) di wilayah yang bersangkutan, atau melalui pengeluaran per kapita.




Grafik 1.19 – Nilai Komponen Pembentuk IPM di Kepri Tahun 2020-2024


Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Pada tahun 2024, UHH penduduk Kepri mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen (yoy), menjadi 75,12 dari sebelumnya 74,90. Peningkatan UHH ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 75,12 tahun.

HLS di Kepri pada tahun 2024 tumbuh 1,69 persen menjadi 13,27 tahun dari yang sebelumnya 13,05 tahun. Peningkatan HLS ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun ke atas berpeluang untuk mengenyam pendidikan selama 13,27 tahun.

Sementara itu, **RLS di Kepri tahun 2024 juga mengalami peningkatan yang telah mencapai 10,50 persen,** tumbuh 0,86 persen (yoy). Pertumbuhan ini mencerminkan perubahan positif dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi di Kepri sosial budaya dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk mengakses pendidikan dalam jangka waktu yang lebih lama, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Peningkatan juga terjadi pada unsur **pengeluaran per kapita** yang tumbuh sebesar 3,83 persen di tahun 2024 (yoy). Pertumbuhan ini menandakan adanya peningkatan aktivitas pengeluaran masyarakat Kepri, baik dalam bentuk konsumsi maupun sisi investasi.

Dalam mendukung pertumbuhan IPM pemerintah mengalokasikan Belanja APBN di Kepri, secara khusus dialokasikan untuk mendukung Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Pada tahun 2025, Belanja Fungsi Kesehatan dialokasikan sebesar Rp181,43 miliar. Sampai dengan 31 Maret, belanja tersebut telah direalisasikan sebesar Rp31,61 miliar atau 17,43

persen dari total Pagu 2025. Belanja tersebut difokuskan pada Program Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan dan JKN, Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pada tahun 2025, Belanja Fungsi Pendidikan dialokasikan sebesar Rp723,74 miliar. Hingga bulan Maret 2025, belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp92,99 miliar atau 12,84 persen dari total Pagu 2025. Belanja tersebut difokuskan pada peningkatan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi, serta Program Perpustakaan dan Literasi. Sementara itu, Belanja Fungsi Pendidikan di Kepri difokuskan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi.

Dukungan pada bidang pendidikan juga disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah telah mengalokasikan DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dengan Pagu masing-masing sebesar Rp607 miliar, Rp24,79 miliar, dan Rp11,62 miliar.

Sampai dengan 31 Maret 2025, penyaluran Dana BOS di Kepri telah mencapai Rp295,57 miliar atau 48,69 persen dari Pagu. Selanjutnya realisasi Dana BOP PAUD telah terealisasi sebesar Rp12,17 miliar atau 49,12 persen dari Pagu, dan realisasi Dana BOP Kesetaraan mencapai Rp5,57 miliar atau 47,99 persen dari Pagu tahun 2025.





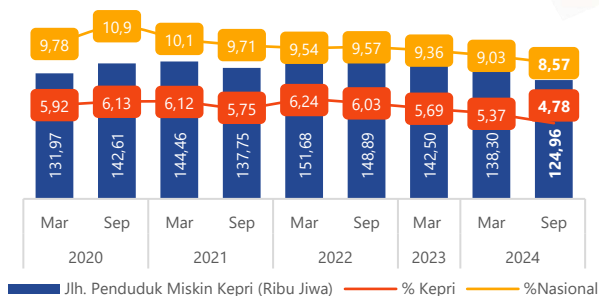
Pada tahun 2025, Pemda Kepri melalui APBD turut melaksanakan beberapa kebijakan untuk mendukung kualitas pendidikan di Kepri. Kebijakan tersebut antara lain adalah: 1) adanya dukungan jalur afirmasi bagi calon murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas oleh Disdik Kepri; 2) dibangunnya 58 ruang kelas baru dengan alokasi anggaran Rp25 miliar; dan 3) peluncuran program beasiswa gratis dengan alokasi Rp3 miliar yang diperuntukkan bagi 1176 mahasiswa mulai dari jenjang DIII hingga S2.

Dukungan pada bidang Pendidikan juga dilakukan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kepri. Secara umum BPMP Kepri berfokus pada empat program prioritas yaitu pelatihan guru, pengembangan kurikulum, penjaminan mutu pembelajaran, dan penelitian pendidikan.

1.2.4 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan di suatu daerah diukur melalui persentase jumlah penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan ambang minimum pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan non makanan agar tidak dikategorikan miskin. Pada bulan September 2024, garis kemiskinan di Kepri sebesar Rp807.602 per kapita/per bulan. Garis tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp65.076 atau 8,76 persen (yoy).

Grafik 1.20 – Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kepri Tahun 2020-2024 (ribu jiwa)



Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Tingkat kemiskinan Kepri periode September 2024 tercatat sejumlah 124,96 ribu jiwa atau 4,78 persen dari total penduduk Kepri. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan Kepri telah menurun ±13,3 ribu jiwa (yoy).

Angka kemiskinan Kepri berada di bawah angka kemiskinan Nasional sebesar 8,57 persen. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kepri yang menargetkan persentase penduduk miskin di Tahun 2024 sebesar 5,69 persen, persentase penduduk miskin di Kepri (4,78 persen) telah mencapai target yang diharapkan dan bahkan lebih baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 1.21 – Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Kepri Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Pada periode bulan September 2024, penduduk miskin yang tinggal di perkotaan sejumlah 102,23 ribu atau 4,36 persen dari total penduduk di perkotaan, turun 0,51 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024. Sedangkan, jumlah penduduk miskin di Kepri yang tinggal di pedesaan sebanyak 22,72 ribu orang atau 8,55 persen dari total penduduk di Pedesaan, turun 41 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024.

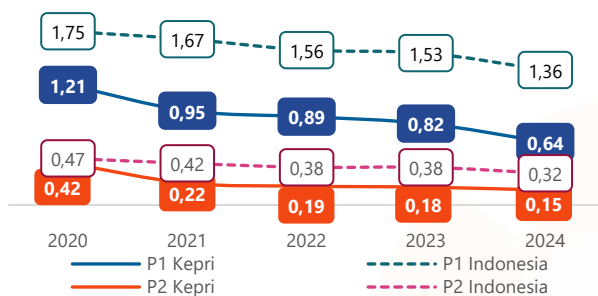
Indikator kemiskinan makro suatu wilayah juga dapat dilihat dari Tingkat Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P2). P1 menjelaskan tentang ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi P1, semakin jauh rata-rata





pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan, P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P1 dan P2, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 1.22 – Perkembangan Indeks P1 dan P2 Kepri Tahun 2020-2024 (persen)

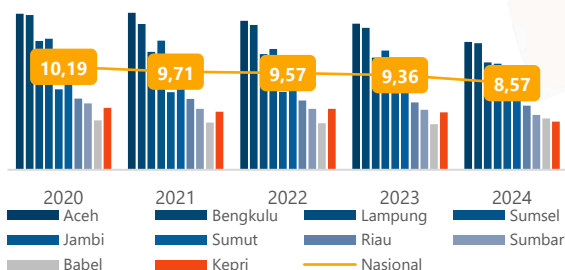


Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Pada bulan September 2024, **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kepri** sebesar 0,635, turun 0,063 poin dibandingkan dengan periode Maret 2024. Kemudian, **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kepri** periode September 2024 sebesar 0,143 juga turun 0,003 poin dibandingkan dengan periode Maret 2024.

Penurunan indeks P1 menggambarkan semakin dekatnya jarak antara rata-rata pengeluaran dengan garis kemiskinan. Kemudian, **penurunan pada P2** menunjukkan semakin dekatnya nilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepri.

Grafik 1.23 – Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Regional Sumatera Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Pada periode September 2024, Kepri berhasil mencapai kinerja sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah Sumatera (4,78 persen), disusul oleh Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (5,08 persen) dan Sumatera Barat (5,42 persen).

Tidak hanya di lingkup Regional Sumatera, tingkat kemiskinan **Kepri per September 2024 juga menjadi tingkat kemiskinan terendah ke-empat nasional** dari 38 provinsi di Indonesia. Posisi tiga terendah diisi oleh Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta dengan tingkat kemiskinan 3,80 persen, 4,02 persen, dan 4,14 persen secara berurutan.

Dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Bantuan Sosial melalui APBN yang berperan sebagai stabilisasi perekonomian. Pada tahun 2025, terdapat alokasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11,14 miliar. Alokasi tersebut tumbuh 42,45 persen (yoy) dibandingkan dengan tahun 2024.

Realisasi Belanja Bansos hingga Maret 2025 mencapai Rp4,56 miliar atau 40,94 persen dari total Pagu Belanja Bansos tahun 2025. Belanja tersebut disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan kepada peserta didik penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Bantuan pemerintah dalam menangani kemiskinan juga dilakukan dengan memberikan program subsidi permodalan UMKM, meningkatkan akses pelatihan dan pendampingan usaha, serta pembangunan fasilitas umum yang memberikan *multiplier effects* bagi masyarakat. Pemerintah Pusat juga turut mendorong daya beli masyarakat, khususnya dari pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui Dana Desa. Pada tahun 2025, **Dana Desa di Kepri** dialokasikan sebesar Rp227,05 miliar yang diberikan kepada kepada 275 desa di 5 Kabupaten di Kepri (Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, dan Anambas).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat alokasi Dana Desa *Earmark* berupa (1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp26,48 miliar





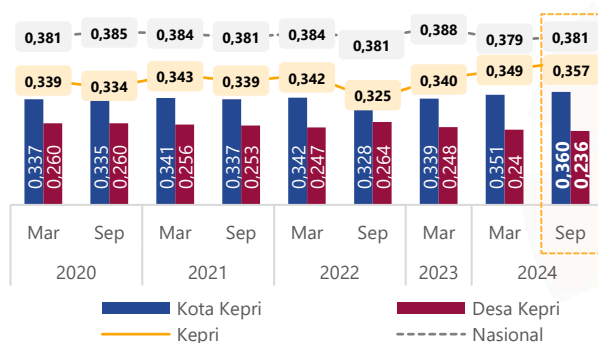
(12,14 persen dari Pagu Dana Desa *Earmark*); (2) Ketahanan Pangan Rp47,67 miliar (21,86 persen dari Pagu Dana Desa *Earmark*); dan (3) *Stunting* Rp30,67 miliar (27,27 persen dari Pagu Dana Desa *Earmark*).

Sampai dengan akhir Maret 2025, penyerapan BLT Desa telah terealisasi sebesar Rp2,80 miliar kepada 9.342 KPM. BLT Desa tersebut disalurkan kepada masyarakat desa di kabupaten Bintan, Karimun dan Kepulauan Anambas. Selain itu, Pemda Kepri juga menyiapkan 4 (empat) upaya pengentasan kemiskinan antara lain:

1. Penanganan Infrastruktur Dasar (Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, Sanitasi, Air Bersih, dan Listrik);
2. Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (JKN, Pemberian Beras Bersubsidi, dan Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Posyandu, RT/RW, BUMdes, UMKM, Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
4. Program Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu.

1.2.5 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

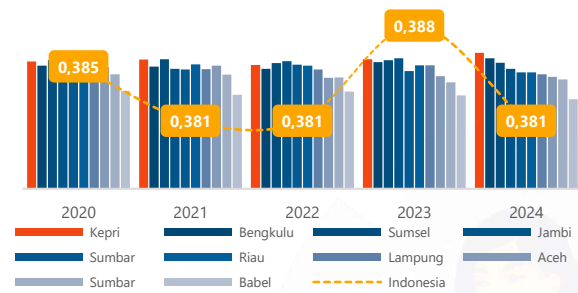
Grafik 1.24 –Gini Ratio di Kepri Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2025 (diolah)

Pada periode September 2024, Gini Ratio Kepri sebesar 0,357, naik 0,008 poin dibandingkan dengan Maret 2025. Gini ratio Kepri masih berada di bawah capaian gini ratio Nasional yang pada September 2024 berada di angka 0,381.

Grafik 1.25 – Ketimpangan di Regional Sumatera per September 2024 (persen)



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Per September 2024, gini ratio Kepri tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Sumatera. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren positif, hal tersebut belum sepenuhnya mampu menekan tingkat ketimpangan sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap hasil pembangunan ekonomi.

Sebagai bentuk hadirnya negara dalam mengurangi kesenjangan pendapatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program untuk menurunkan gini ratio di Kepri. Upaya tersebut mencakup penyaluran bantuan sosial secara berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja melalui percepatan pembangunan, serta peningkatan standar pengupahan guna memperkuat daya beli masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan.

Pemerintah turut memberikan subsidi pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan UMKM. Pada periode triwulan I 2025, program KUR telah disalurkan sebesar Rp338,72 miliar kepada 4.973 debitur dan tumbuh 108,49 persen (yoy).

Program tersebut juga didukung oleh APBN meliputi program pemberdayaan UMKM juga diberikan dalam pemberian subsidi pembiayaan usaha UMKM baik melalui KUR/UMi/dan Program Pembiayaan Bunga nol





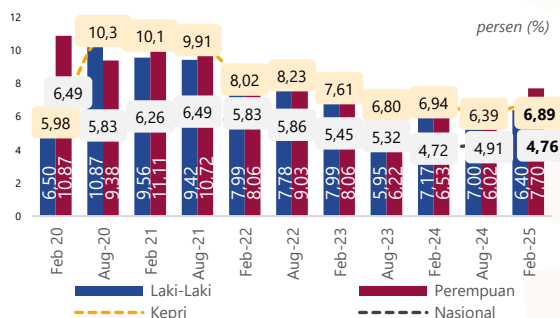
persen dari Pemprov Kepri. Kemudian, **sebagai bantalan sosial, APBN juga telah memberikan BLT** kepada para KPM baik melalui TKD ataupun belanja K/L.

Selain itu, program pendidikan dan pelatihan juga terus diberikan baik oleh Pempus maupun Pemda. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan Balai Latihan kerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja lokal.

1.2.6 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Pada bulan Februari 2025, **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri tercatat sebesar 6,89 persen** atau turun 0,05 persen point (yoy) dibandingkan dengan Februari 2024. Angka TPT tersebut lebih rendah dibandingkan dengan RPJMD Kepri 2021-2026 yang pada tahun 2025 ditargetkan ditargetkan sebesar 8,10 persen. TPT Kepri juga lebih tinggi dibandingkan dengan TPT nasional sebesar 4,76 persen pada bulan Februari 2025.

Grafik 1.26 – Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri per Tahun 2020-2025 (persen)



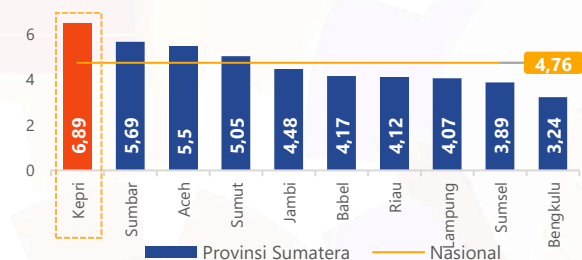
Sumber Data: BPS, 2025 (diolah)

Pada bulan Februari 2025, **tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kepri tercatat mencapai 1.091,75 ribu orang atau 66,84 persen** dari total penduduk usia kerja di Kepri. Jumlah TPAK tersebut tumbuh 13,59 ribu orang (yoy), hal tersebut mencerminkan adanya pemulihan yang berkelanjutan dalam sektor ketenagakerjaan di Kepri.

Selanjutnya, **penyerapan tenaga kerja di Kepri** selama periode satu tahun terakhir (Feb 2024 – Feb 2025), didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha yaitu sektor Industri Pengolahan (20,81 persen), Administrasi Pemerintahan (17,17 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran (14,96 persen).

Berdasarkan jenis lapangan usaha, **sektor konstruksi mencatatkan penurunan penyerapan tenaga kerja paling signifikan**, dengan pertumbuhan negatif sebesar 13,83 persen (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh pergeseran struktur kegiatan konstruksi yang semakin berfokus pada proyek-proyek padat modal dan berteknologi modern, serta kecenderungan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja dari luar Kepri guna menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek yang dijalankan.

Grafik 1.27 – Angka TPT Per Provinsi di Regional Sumatera bulan Februari 2025 (persen)



Sumber Data: BPS, 2025 (diolah)

Meskipun TPT Kepri pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan (yoy), TPT Kepri masih menjadi yang tertinggi di Regional Sumatera. Kepri bahkan menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di tertinggi ke-dua di tingkat nasional setelah Papua dengan TPT 6,92 persen.

Struktur TPT Kepri menunjukkan perbaikan yang tercermin dari tren penurunan TPT sejak Februari 2024 (yoy). Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di Kepri kini memiliki akses dan peluang yang lebih baik untuk memperoleh pekerjaan serta berperan dalam aktivitas perekonomian.



Fast Response Langkah Antisipasi DJBC Kepri Dalam Menghadapi Kebijakan Tarif Impor oleh Amerika Serikat



Komoditi Ekspor dari Batam Q1 2025

No	Komoditi Q1 2025	Jml Eksportir	Jml Dokumen	Tonase	Devisa (Juta USD)	Devisa (Rp M)	%
1	Bagian elektrik dari mesin	174	8,273	96,109	1,378	22,498	29.29
2	Bagian kendaraan	88	958	57,997	775	12,632	16.45
3	Mesin & peralatan mekanis	244	4,709	27,335	500	8,174	10.64
4	Produk dari logam	249	2,847	128,235	377	6,138	7.99
5	Perangkat telepon, audio, video, penyiaran & bagiannya	64	2,452	3,649	376	6,13	7.98
6	Produk industri kimia	103	1,979	158,679	300	4,902	6.38
7	Produk kakao	5	745	25,301	240	3,922	5.11
8	CPO & turunannya	9	682	182,324	221	3,614	4.71
9	Peralatan listrik rumah tangga & industri	84	2,605	9,953	201	3,276	4.26
10	Motor & transformator listrik	68	1,384	2,426	83	1,348	1.76
11	Produk dari plastik & karet	242	4,221	47,503	77	1,254	1.63
12	Peralatan optik & bagian dari jam	106	2,184	3,179	76	1,242	1.62
13	Bermacam-macam barang hasil pabrik	87	1,284	10,397	47	770	1.00
14	Produk tembakau	18	345	3,552	18	298	0.39
15	Tekstil dan barang tekstil	67	583	1,304	9	151	0.20
16	Barang dari kayu & kertas	102	936	18,036	9	141	0.18
17	Produk hewani & nabati	30	378	4,631	7	113	0.15
18	Perkakas & produk logam lainnya	100	567	1,368	4	71	0.09
19	Produk dari batu, keramik, & kaca	57	198	2,038	4	71	0.09
20	Produk olahan makanan & minuman	29	305	1,75	2	30	0.04
21	Produk dari kulit (tas dan sejenisnya)	25	92	94	1	15	0.02
22	Produk mineral	21	84	1,071	1	9	0.01
Total		815	29,423	786,931	4,705	76,800	100



Top 10 Komoditi Ekspor dari Batam Q1 2025

No	Kelompok Komoditi 2025	US		
		Tonase	Devisa (Juta USD)	%
1.	Bagian elektrik dari mesin	74,983	620	45.0
2.	Perangkat telepon, audio, video, penyiaran & bagiannya	1,623	169	44.9
3.	Produk kakao	5,233	65	27.2
4.	Peralatan listrik rumah tangga & industri	3,052	70	34.9
5.	Motor & transformator listrik	616	22	27.2
6.	Bermacam-macam barang hasil pabrik	8,261	28	58.4
7.	Tekstil dan barang tekstil	569	5	56.6
8.	Perkakas & produk logam lainnya	1,244	2	54.8
9.	Produk dari batu, keramik, & kaca	1,447	1	20.6
10.	Produk dari kulit (tas dan sejenisnya)	37	0	44.1
Total		97,065	982	100

Top 10 Negara Importir ke Kepri TA 2024 s.d. Tahun 2025

No	Negara	Devisa (USD)	%
1	China	6.727.364.048,86	34,08
2	Singapore	2.827.865.519,93	14,32
3	Japan	1.404.526.482,22	7,11
4	Taiwan	1.183.448.446,75	5,99
5	Malaysia	1.155.075.887,76	5,85
6	Korea	807.196.254,07	4,09
7	United States	644.811.363,40	3,27
8	Philippines	569.593.491,04	2,89
9	Germany	545.309.398,47	2,76
10	Italy	330.262.065,58	1,67



- US secara total devisa (USD) impor berada pada posisi 7 teratas (3,27%)
- Komoditas terbanyak dalam importasi dari Amerika Serikat berupa Elektronik





Hubungan Neraca Perdagangan Nasional dan Batam

Total Neraca Nasional		Total Neraca Batam	
Ekspor	26,31 (Miliar USD)	Ekspor	4,11 (Miliar USD)
Ekspor	11,97 (Miliar USD)	Ekspor	0,44 (Miliar USD)
Surplus Indonesia ke US	14,34 (Miliar USD)	Surplus Batam ke US	3,67 (Miliar USD)
% Surplus Indonesia ke US	37,5%	% Surplus Batam ke US	80,7%

- Dari total surplus Indonesia ke US sebesar 14,34 Miliar USD, Batam menyumbang 3,67 Miliar USD
- *Share* Surplus Perdagangan Batam ke US lebih besar dibandingkan dengan *share* Surplus Perdagangan Nasional terhadap transaksinya dengan US.



Trade Diversion: Peluang dan

No.	Sektor	Komoditas	Negara (Peluang)	Negara (Ancaman)
1.	Tekstil & Produk Garmen	Pakaian jadi, kaus, sepatu olahraga	Vietnam, Bangladesh, China	India
2.	Elektronik & Komponen	Semikonduktor, peralatan listrik, suku cadang elektronik	China, Vietnam,	Korsel
3.	Alas Kaki & Produk Kulit	Sepatu kulit, sandal, sepatu olahraga	Vietnam, China	India
4.	Produk Kayu & Furnitur	Mebel kayu, produk rotan, panel kayu	China, Vietnam	Malaysia
5.	Karet & Produk Karet	Ban kendaraan, sarung tangan karet	Thailand, Vietnam	Malaysia
6.	Makanan & Minuman Olahan	Produk ikan olahan, mi instan, kopi instan	Thailand, Vietnam	Filipina
7.	Produk Perikanan	Udang, tuna, kepiting olahan	Vietnam, Thailand	India
8.	Otomotif & Suku Cadang	Suku cadang dan komponen kendaraan	Thailand, Jepang, Meksiko	Jepang, Meksiko
9.	Produk Logam & Baja	Baja, aluminium, Nikel	Tiongkok, Korea Selatan	India



Peluang *take over* porsi ekspor dari:

1. Vietnam (tarif 46%)
2. Bangladesh (tarif 37%)
3. Thailand (tarif 36%)
4. China (tarif 34%)



Ancaman daya saing ekspor dari:

1. Filipina (tarif 17%)
2. Malaysia (tarif 24%)
3. Korea Selatan (tarif 25%)
4. India (tarif 26%)



Strategi dan Respons Pemerintah Indonesia

1. Implementasi *Coretax*: Pemerintah mengotomasi layanan perpajakan dengan fokus pada percepatan, pemeriksaan, dan keberatan, melalui sistem validasi yang terintegrasi antar lembaga.
2. Percepatan Pemeriksaan Pajak: Ditetapkan dalam PMK 15/2025 (berlaku mulai 10 Februari 2025), untuk mempercepat proses audit perpajakan.
3. Penyederhanaan Proses Restitusi Pajak: Juga diatur dalam PMK 15/2025, untuk mempercepat pengembalian pajak yang lebih efisien.
4. Penetapan Nilai Pabean: Menggunakan sistem rentang harga (*Price Range*) berbasis bukti valid sebagai dasar penetapan nilai pabean.
5. Penyederhanaan Perizinan dan Tata Niaga Impor: Pemerintah sedang menyusun peraturan teknis (pertek) bersama kementerian/lembaga terkait.
6. Implementasi Hico *X-ray* Berbasis AI: Teknologi ini memperkuat pengawasan kepabeanan non-intrusif di pelabuhan laut dan bandar udara.
7. Penguatan *National Logistic Ecosystem* (NLE): NLE didesain berbasis digital dan lintas kementerian/lembaga untuk menurunkan biaya logistik, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses logistik di 53 pelabuhan dan 7 bandara.
8. Kebijakan Lainnya: 1) Harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan–kepabeanan atas impor dan ekspor. 2) Perbaikan prosedur kerja perlindungan perdagangan untuk menjaga daya saing pelaku usaha. 3) Fasilitasi aktivitas impor dengan penyederhanaan kuota dan perizinan teknis.

Strategi dan Respons dari KPU BC Tipe B Batam

1. Analisis dan Pemantauan: KPU BC Batam aktif mendengar masukan pengguna jasa, serta memetakan kegiatan ekspor-impor dari FTZ Batam yang berpotensi terdampak kebijakan baru.
2. Perbaikan Layanan Ekspor-Impor: Perluasan Program EPIC (*Excellence Partners In Customs*) Batam 100. Penyesuaian aturan penjualan merah terhadap impor asal Amerika Serikat.
3. Pemberian *special treatment* untuk impor dari AS (misalnya untuk barang kiriman dari luar kawasan pabean). Peningkatan Layanan Ekspor 24/7: KPU BC Batam mempercepat proses ekspor melalui integrasi layanan antarinstansi, mendorong percepatan investasi baik untuk proyek baru maupun perluasan usaha. Penguatan Pengawasan: Fokus pada potensi risiko dari peredaran barang dan pengawasan *transshipment*.



BAB II

APBN dan APBD berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional dan daerah.

ANALISIS FISKAL REGIONAL





Pantai Trikora, Kabupaten Bintan

- Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi
- Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)
- Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
- Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)



BAB II – Analisis Fiskal Regional

2.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara menjalankan tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi stabilisasi dijalankan melalui peran **APBN sebagai shock absorber** untuk menstabilkan harga. Pada fungsi alokasi, APBN berperan untuk membuat ekonomi

semakin efisien dan tidak distortif.

Pada fungsi distribusi, APBN berperan sebagai alat pemerataan keadilan. Ketiga fungsi tersebut tak hanya dijalankan dalam skala nasional, tetapi juga pada tingkat regional. APBN dianggarkan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan masyarakat Kepri yang sejahtera melalui peningkatan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan APBN di Kepri tergambar pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1– Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2024			TA 2025			Growth
	Pagu	Real. Tw I	% Real	Pagu	Real. Tw I	% Real	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	14.923,24	2.847,02	19,08%	18.054,79	2.295,71	12,72%	-19,36%
Penerimaan Perpajakan	12.216,15	2.217,51	18,15%	15.381,79	1.638,26	10,65%	-26,12%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.707,09	629,51	23,25%	2.672,99	657,45	24,60%	4,44%
BELANJA NEGARA	18.635,93	3.455,95	18,54%	16.499,90	2.628,34	15,93%	-23,95%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	10.454,64	1.506,43	14,41%	8.048,50	1.041,85	12,94%	-30,84%
Belanja Pegawai	2.263,90	573,67	25,34%	2.200,00	600,79	27,31%	4,73%
Belanja Barang	4.780,26	714,46	14,95%	4.050,78	408,68	10,09%	-42,80%
Belanja Modal	3.147,76	215,39	6,84%	1.539,72	27,82	1,81%	-87,09%
Bantuan Sosial	7,82	2,91	37,23%	11,14	4,56	40,94%	56,69%
Belanja Lainnya	254,91	0,00	0,00%	246,86	0,00	0,00%	0,00%
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	8.181,29	1.949,52	23,83%	8.451,40	1.586,49	18,77%	-18,62%
Dana Transfer Umum	5.966,57	1.506,33	25,25%	6.075,81	1.103,03	18,15%	-26,77%
Dana Alokasi Umum	1.149,18	172,49	15,01%	1.056,34	124,23	11,76%	-27,98%
Dana Bagi Hasil	4.817,40	1.333,84	27,69%	5.019,47	978,80	19,50%	-26,62%
Dana Transfer Khusus	1.893,68	340,36	17,97%	2.045,77	371,20	18,14%	9,06%
Dana Alokasi Khusus Fisik	648,36	0,00	0,00%	619,87	0,00	0,00%	0,00%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	1.245,31	340,36	27,33%	1.425,90	371,20	26,03%	9,06%
Dana Insentif Fiskal	93,99	0,00	0,00%	111,82	0,00	0,00%	0,00%
Dana Desa	227,05	102,83	45,29%	218,00	112,26	51,50%	9,17%
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	-3.712,69	-608,93	16,40%	1.554,89	-332,62	-21,39%	45,38%

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pada tahun 2025, **penetapan surplus APBN lingkup Kepri sebesar Rp1.544,89 miliar** merupakan keputusan pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal kontraktif yang bertujuan untuk menekan inflasi dan menstabilkan perekonomian. Pendapatan dan Hibah ditargetkan sebesar Rp18.054,79 miliar dengan Pagu Belanja sebesar Rp16.499,90 miliar.

Target Pendapatan dan Hibah pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini berbanding terbalik dengan

penurunan Pagu Belanja Negara tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Secara spesifik, penurunan terjadi di Pagu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) khususnya Belanja Barang dan Belanja Modal sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran. Fenomena ini lebih lanjut berdampak pada **Defisit anggaran pada tahun 2024 justru menjadi Surplus anggaran pada tahun 2025.**

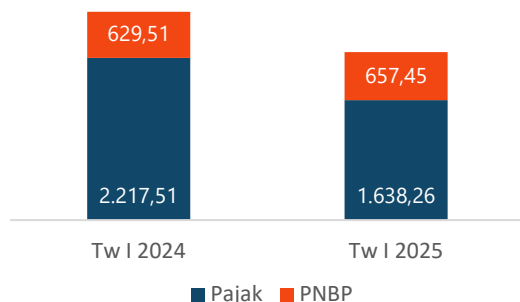




2.1.1 Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dan Hibah telah terealisasi sebesar Rp2.295,71 miliar (12,72

Grafik 2.1 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

persen dari Target) mengalami kontraksi sebesar 19,36 persen (yoy) sebagaimana tergambar pada Grafik 2.1 berikut.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas **Penerimaan Perpajakan yang memberikan kontribusi dominan yaitu 71,36 persen (Rp1.638,26 miliar)** terhadap total pendapatan APBN regional dan PNB yang memberikan kontribusi sebesar 28,64 persen (Rp657,45 miliar).

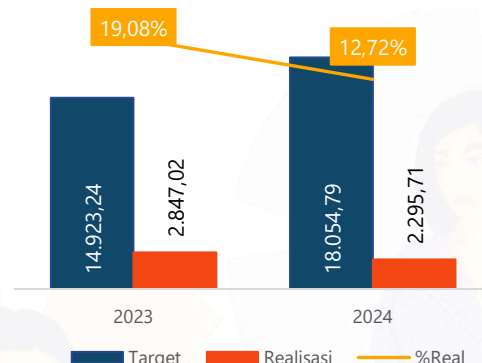
2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Coretax, Sistem baru Perpajakan Indonesia merupakan reformasi Perpajakan yang dimulai awal tahun 2025. Melalui Coretax pemerintah menargetkan penurunan tax gap, peningkatan tax ratio, serta perbaikan kualitas data perpajakan. Coretax berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integritas data perpajakan di Indonesia.

Penerimaan Perpajakan direalisasikan sebesar Rp1.638,26 miliar (10,65 persen dari Target) dan tumbuh minus 26,12 persen (yoy).

Realisasi triwulan I 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2024

Grafik 2.2 – Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

(Rp2.217,51 miliar) meskipun terdapat peningkatan Target sebagaimana Grafik 2.2 berikut.

Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. **Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Perpajakan** yaitu 84,92 persen (Rp1.391,25 miliar), sedangkan Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi sebesar 15,08 persen (Rp247,01 miliar).

Pada triwulan I 2025, Penerimaan Perpajakan tumbuh sebesar minus 26,12 persen disumbang oleh pertumbuhan minus pada hampir seluruh jenis Pajak Dalam Negeri yaitu PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Cukai. Pajak Perdagangan Internasional tumbuh positif namun demikian jumlahnya yang kecil tidak mampu menopang kontraksi Pajak Dalam Negeri. Secara rinci, Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan tersaji pada Tabel 2.2 berikut.



**Tabel 2.2** – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2024			2025			Growth
	Target	Real Tw I	%	Target	Real Tw I	%	
Penerimaan Perpajakan	12.216,15	2.217,51	18,15%	15.381,79	1.638,26	10,65%	-26,12%
Pajak Dalam Negeri	11.656,95	2.129,61	18,27%	14.945,52	1.391,25	9,31%	-34,67%
Pajak Perdagangan Internasional	559,20	87,89	15,72%	436,28	247,01	56,62%	181,04%

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Analisis kinerja perpajakan terbagi menjadi analisis kinerja perpajakan menurut komposisi per jenisnya dan analisis kinerja perpajakan sektoral menurut lapangan usaha. Kedua jenis analisis ini dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1.1.1 Analisis Kinerja Perpajakan Menurut Jenisnya

Tabel 2.3 berikut menyajikan komposisi perpajakan menurut jenisnya.

Tabel 2.3 – Komposisi Realisasi Perpajakan Menurut Jenisnya di Kepri, Triwulan I 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Real Tw I 2025 (Rp M)	Kontribusi (%)
Pajak Dalam Negeri	1.391,25	82,52%
PPh	1.178,00	69,87%
PPN dan PPNBM	-91,16	-5,41%
PBB	0,17	0,01%
Cukai	9,51	0,56%
Pajak Lainnya	294,73	17,48%
Pajak Perdagangan Internasional	294,73	17,48%

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2025 (diolah)

Berdasarkan jenisnya, kinerja perpajakan didominasi oleh PPh sebesar **Rp1.178,00 miliar**. Jumlah ini mendominasi sekitar 69,87 persen dari total Penerimaan Perpajakan di Kepri. Sumbangan terkecil diberikan oleh PPN dan PPNBM sebesar minus 5,41 persen (Rp91,16 miliar).

Terjadi penurunan pada dua komponen pajak terbesar yaitu PPh dan PPN/PPNBM.

Tabel 2.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Nama Sektor	Realisasi		Growth (yoy)	Kontribusi
	Tw I 2024	Tw I 2025		
Industri Pengolahan	1.003,52	1.378,27	37,34%	53,49%
Pengangkutan dan Pergudangan	149,56	282,93	89,17%	10,98%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	276,98	244,25	-11,82%	9,48%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	173,42	134,20	-22,61%	5,21%
Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	105,09	111,11	5,73%	4,31%
Konstruksi	191,75	67,94	-64,57%	2,64%

Realisasi PPh triwulan I 2025 terkontraksi akibat adanya lebih bayar atas Implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 per Januari 2024 dan aplikasi Coretax yang masih berkembang. Di samping itu, realisasi PPN dan PPNBM triwulan I 2025 terkontraksi akibat adanya restitusi pajak oleh WP di Kota Batam dan turunnya harga beberapa komoditas.

2.1.1.1.2 Analisis Kinerja Perpajakan Menurut Sektor/Lapangan Usaha

Pada triwulan I 2025, **Industri Pengolahan menjadi sektor penyumbang penerimaan Perpajakan terbesar** yaitu Rp1.378,27 miliar dengan kontribusi sebesar 53,49 persen, kemudian berturut-turut oleh Pengangkutan dan Pergudangan Rp282,93 miliar (10,98 persen), Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yaitu Rp244,25 miliar (9,48 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp134,20 miliar (5,21 persen), dan Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja sebesar Rp111,11 miliar (4,31 persen). Sedangkan sisanya merupakan gabungan dari Penerimaan Perpajakan di luar sektor dominan dengan rincian sebagaimana Tabel 2.4 berikut.





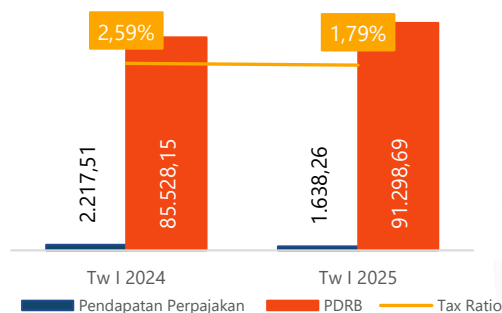
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	119,46	65,95	-44,79%	2,56%
Real Estate	57,76	52,73	-8,71%	2,05%
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	66,32	51,63	-22,15%	2,00%
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	32,27	41,91	29,89%	1,63%
Aktivitas Jasa Lainnya	25,23	29,30	16,14%	1,14%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	36,47	29,09	-20,22%	1,13%
Informasi dan Komunikasi	17,87	22,34	25,06%	0,87%
Pertambangan dan Penggalian	46,51	17,17	-63,08%	0,67%
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	24,65	16,77	-31,96%	0,65%
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	11,84	11,87	0,25%	0,46%
Pendidikan	6,76	7,50	10,96%	0,29%
KLU Tidak Diketahui	0,00	5,94	100,00%	0,23%
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	4,62	5,72	23,66%	0,22%
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	4,77	4,68	-1,84%	0,18%
Jasa Perorangan uang Melayani Rumah Tangga	0,44	0,54	23,94%	0,02%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,33	-4,96	-167,75%	-0,19%
Total	2.362,61	2.576,89	18,34%	100,00%

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2025 (diolah)

2.1.1.1.3 Analisis Tax Ratio

Tax ratio pemerintah pusat mengalami penurunan, yaitu pada triwulan I 2024 sebesar 2,59 persen menjadi 1,79 persen pada triwulan I 2025 sebagaimana tersaji pada Grafik 2.3 di bawah. Berbeda dengan provinsi lain, di Kepri penurunan Pendapatan Perpajakan tidak berbanding lurus dengan peningkatan PDRB

Grafik 2.3 – Tax Ratio Pemerintah Pusat Triwulan I, 2024-2025 (persen)



Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan BPS (diolah)

Kinerja perpajakan pemerintah pusat yang menurun dikarenakan isu administratif seperti penerapan aplikasi Coretax dan NITKU, di samping itu kekhususan Kepri sebagai wilayah FTZ juga menyebabkan sedikitnya penerimaan perpajakan.

Jika dilihat dari jenis pajaknya, **realisasi PPh** triwulan I 2025 berkontraksi akibat adanya lebih bayar atas Implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 per Januari 2024. Di samping

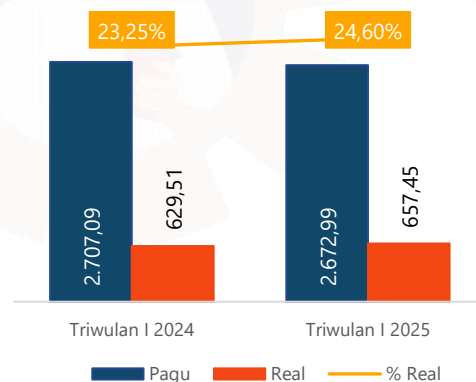
itu, realisasi PPN dan PPnBM triwulan I 2025 berkontraksi akibat adanya restitusi pajak oleh WP di Kota Batam dan turunnya harga beberapa komoditas.

2.1.1.1.4 Analisis Kinerja Bea dan Cukai

Terdapat beberapa current issue atas kinerja realisasi Bea dan Cukai triwulan I 2025. **Realisasi Bea Masuk di Kepri mengalami kontraksi** yang dipengaruhi oleh turunnya produksi MMEA dan aktivitas komoditas impor yang menurun. Sementara itu, **realisasi Bea Keluar di Kepri tumbuh signifikan** yang dipengaruhi oleh tarif CPO yang meningkat tajam pada awal tahun 2025.

2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Grafik 2.4 – Target dan Realisasi PNBP di Kepri Triwulan I, 2024-2025 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri (diolah)

Target PNBP lingkup Kepri pada 2025 sebesar Rp2.672,99 miliar. Target ini lebih





rendah dibandingkan dengan Target pada tahun sebelumnya yaitu Rp2.707,09 miliar. Meskipun demikian, realisasi PNBPN pada triwulan I 2025 (Rp657,45 miliar) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2024 (Rp629,52 miliar). Kinerja realisasi Penerimaan PNBPN cukup optimal dengan pertumbuhan sebesar 20,38 persen (yoy). Target dan realisasi PNBPN sebagaimana disajikan pada Grafik 2.4 di atas.

Realisasi PNBPN didominasi sebesar 64,40 persen oleh **PNBPN Pendapatan BLU** Rp423,42 miliar, sedangkan sisanya disumbang oleh PNBPN lainnya (Rp234,03 miliar). Pendapatan BLU ditopang oleh BP Batam dan tiga BLU muda (kurang lebih berumur 1-2 tahun) di Kepri, yaitu Poltek Negeri Batam, BLU RS Bhayangkara Batam dan BLU RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang. Pertumbuhan PNBPN BLU didorong oleh BLU yang telah melakukan pencatatan pendapatan pada secara triwulanan.

Dari sisi **PNBPN lainnya**, tingginya lalu lintas keluar masuk Indonesia oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal berdampak pada pertumbuhan realisasi akun PNBPN Lainnya. Realisasi PNBPN Lainnya didorong oleh peningkatan layanan pada Pendapatan Visa dan Pendapatan Paspor yang mulai naik dibulan Desember 2024.

Data dari KPKNL Batam merincikan PNBPN lingkup Kepri di luar Penerimaanss BLU menjadi **PNBPN Aset, PNBPN Piutang Negara,**

dan PNBPN Lelang dengan rincian Target dan Realisasi sebagaimana dirinci pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 – Perkembangan PNBPN di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Target	Real	%
PNBPN Aset	118,24	519,46	439,31%
PNBPN			
Piutang Negara	0,004	0,02	509,83%
PNBPN Lelang	2,05	2,39	117,09%
Total	120,29	521,87	433,84%

Sumber: KPKNL Batam, 2025 (diolah)

Target PNBPN pada triwulan I 2025 didominasi oleh PNBPN Aset sebesar Rp118,24 miliar dengan realisasi sebesar Rp519,46 miliar atau 439,31 persen dari target. Seluruh jenis PNBPN mengalami realisasi di atas 100 persen.

2.1.1.3 Penerimaan Hibah

Pada triwulan I tahun 2025 **tidak terdapat penerimaan Hibah** pada lingkup provinsi Kepri.

2.1.1.4 Prognosis Pendapatan Negara

Kanwil DJPb Kepri melakukan prognosis atas Pendapatan Negara yang dibagi ke dalam Pajak, Bea dan Cukai dan PNBPN. Adapun data realisasi pada triwulan I 2025 diperoleh dari Kanwil DJP Kepri (data realisasi pajak), Kanwil DJBC Kepri (data Bea dan Cukai), dan Kanwil DJPb Kepri (data PNBPN). Prognosis dan realisasi Pendapatan Negara sebagaimana tersaji pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 – Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun (dalam Miliar Rupiah)

TW	Pajak			Bea Cukai			PNBPN		
	Prognosis	Realisasi	Deviasi	Prognosis	Realisasi	Deviasi	Prognosis	Realisasi	Deviasi
Tw I	2.549,55	2.576,89	27,33	105,92	279,04	173,12	478,21	657,45	179,24
Tw II	3.844,42	0,00		112,88	0,00		687,69	0,00	
Tw III	3.324,29	0,00		126,70	0,00		662,33	0,00	
Tw IV	5.193,95	0,00		124,09	0,00		843,81	0,00	

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Proyeksi Penerimaan Perpajakan triwulan I sebesar Rp2.549,55 miliar dengan realisasi sebesar Rp2.576,89 miliar sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp27,33 miliar. Hal tersebut di dorong oleh *extra efforts* yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP dalam merealisasikan pendapatan perpajakan. Deviasi penerimaan

pajak masih terjaga dengan penyesuaian target yang dilakukan di awal tahun 2025.

Proyeksi Bea Cukai triwulan I sebesar Rp105,92 miliar dengan realisasi sebesar Rp279,04 miliar sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp173,12 miliar. Penerimaan pada Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang lebih tinggi





dibandingkan dengan proyeksi disebabkan oleh tarif CPO yang meningkat tajam serta meningkatnya permintaan pita cukai di dalam wilayah Kepri.

Penerimaan PNPB yang dikelola oleh DJKN pada triwulan I 2025 diproyeksikan sebesar Rp478,21 miliar dengan realisasi sebesar Rp657,45 miliar sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp179,24. Penerimaan PNPB di Kepri yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi disebabkan oleh meningkatnya PNPB pada layanan satker, khususnya atas peningkatan pendapatan pada pengurusan paspor.

Kinerja optimal realisasi Perpajakan, Bea dan Cukai, dan PNPB perlu untuk dijaga, sehingga realisasi pendapatan dapat mencapai kondisi optimal hingga akhir tahun anggaran.

2.1.1.5 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan Negara

1. Kanwil DJP Kepri agar meningkatkan *extra effort* melalui edukasi, kerjasama, layanan langsung terkait Coretax terhadap perusahaan-perusahaan besar dalam rangka meningkatkan pajak atas WP Orang Pribadi, serta berkolaborasi dengan asosiasi industri dan bisnis untuk memastikan kepatuhan pengumpulan pajak
2. Pendekatan dengan pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan Bea Masuk, dan menggali potensi Penerimaan Perdagangan Internasional.
3. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT), Kanwil DJBC Khusus Kepri dan KPU BC Batam agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan inspeksi pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah Kepri.
4. KPKNL Batam agar meningkatkan penerimaan PNPB melalui identifikasi *idle asset* BMN, serta menjaga koordinasi dengan BP Batam yang mengelola aset dalam jumlah besar di Kepri.

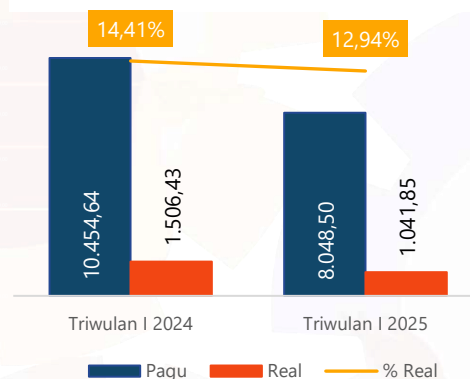
2.1.2 Belanja Negara

Belanja Negara dalam hal ini merupakan realisasi Belanja Pemerintah Pusat lingkup provinsi Kepri.

2.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.041,85 miliar atau 12,94 persen dari Pagu. BPP mengalami penurunan bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 dan menyebabkan pertumbuhan minus 30,84 persen (yoy). Rincian Pagu dan realisasi BPP tergambar dalam Grafik 2.5 berikut.

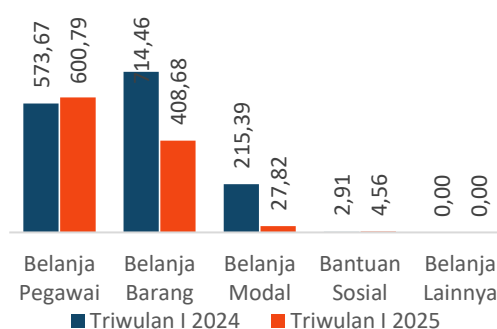
Grafik 2.5 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

2.1.2.2 Berdasarkan Jenis Belanja

Grafik 2.6 – Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I, 2024 s.d. 2025



Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri (diolah)





Berdasarkan jenis Belanja, **BPP didominasi oleh Belanja Pegawai Rp600,79 miliar** kemudian secara berturut-turut realisasi terbesar ada pada Belanja Barang Rp408,68 miliar, Belanja Modal Rp27,82 miliar, dan Bantuan Sosial Rp4,56miliar (0,08 persen) sedangkan Belanja Lainnya tidak ada realisasi. Secara rinci realisasi BPP tersaji pada Grafik 2.6 di atas.

Realisasi Belanja Pegawai dan Bantuan Sosial mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya, sedangkan Belanja Lainnya mengalami penurunan realisasi. Penurunan pada Belanja Barang dan Belanja Modal sebagai

dampak efisiensi anggaran di lingkup satker vertikal K/L di Kepri.

2.1.2.3 Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

Terdapat 15 (lima belas) K/L dengan Pagu Belanja terbesar dengan total Pagu Rp7.282,34 miliar atau 93,27 persen dari total Pagu seluruh satuan kerja lingkup Kepri. Pada triwulan I 2025, realisasi lima belas K/L tersebut mencapai Rp970,56 miliar atau sebesar 13,33 persen dari Pagu. Nilai realisasi ini jika dibandingkan dengan total realisasi Belanja seluruh K/L lingkup Kepri mencapai 91,24 persen. Secara rinci Pagu dan realisasi tersaji dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 – Perbandingan Proporsi Pagu dan Realisasi Belanja Seluruh K/L dan 15 K/L Terbesar, Triwulan I 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2025			Growth
	Pagu	Real. Tw I	%	Pagu	Real. Tw I	%	
15 K/L Pagu Terbesar	7.191,16	1.022,94	14,23%	7.282,34	970,56	13,33%	-5,12%
Seluruh K/L	9.226,14	1.518,58	16,46%	7.807,70	1.063,73	13,62%	-29,95%
Proporsi 15 K/L terhadap seluruh	77,94%	67,36%		93,27%	91,24%		

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Pada tahun 2025, Pagu belanja K/L mengalami penurunan sebagai dampak efisiensi anggaran guna membiayai program prioritas. Penurunan Pagu diikuti dengan

penurunan realisasi belanja baik dari lima belas K/L dengan Pagu terbesar maupun secara keseluruhan. Adapun rincian Belanja lima belas K/L Pagu terbesar tersaji pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 - Realisasi Belanja Lima Belas K/L Pagu Terbesar, Triwulan I 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)

K/L	TA 2024			TA 2025			Growth
	Pagu	Real. Tw I	% Real	Pagu	Real. Tw I	%Real	
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	2.676,77	145,07	5,42%	2.062,64	101,36	4,91%	-30,13%
Kementerian Pertahanan	1.155,45	281,32	24,35%	1.085,97	255,03	23,48%	-9,35%
Kepolisian Negara Republik Indonesia	776,23	197,10	25,39%	798,25	201,55	25,25%	2,26%
Kementerian Pekerjaan Umum	N/A	N/A	N/A	753,16	12,58	1,67%	N/A
Kementerian Perhubungan	716,81	82,86	11,56%	587,41	73,35	12,49%	-11,48%
Kementerian Agama	320,86	73,50	22,91%	374,08	74,19	19,83%	0,94%
Kementerian Keuangan	333,98	65,73	19,68%	371,72	57,41	15,45%	-12,66%
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi	610,46	48,47	7,94%	362,81	35,03	9,65%	-27,73%
Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan	N/A	N/A	N/A	257,21	42,76	16,63%	N/A
Kejaksaan Republik Indonesia	96,82	22,09	22,82%	148,69	30,41	20,45%	37,66%
Kementerian Kesehatan	149,90	27,78	18,53%	135,34	21,42	15,83%	-22,89%





Mahkamah Agung	117,80	34,68	29,44%	116,04	25,35	21,85%	-26,90%
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn	72,53	15,56	21,45%	95,14	16,23	17,06%	4,31%
Kementerian Kelautan Dan Perikanan	106,07	15,56	14,67%	69,06	9,84	14,25%	-36,76%
Badan Pusat Statistik	57,47	13,24	23,03%	64,81	14,04	21,67%	6,04%
Total	7.191,16	1.022,94	14,23%	7.807,70	1.063,73	13,62%	3,99%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP KPBPB Batam) merupakan satuan kerja (satker) BLU dengan Pagu Belanja terbesar yaitu Rp2.062,64 miliar dengan realisasi belanja sebesar Rp101,36 miliar atau 4,91 persen dari Pagu.

Kementerian Pertahanan menjadi K/L dengan realisasi belanja terbesar yaitu sebesar Rp255,03 miliar dari Pagu sebesar Rp1.085,97 miliar.

Kepolisian Negara RI merupakan K/L dengan persentase realisasi anggaran terbesar yaitu sebesar 25,25 persen dengan nominal realisasi belanja sebesar Rp201,55 miliar dari Pagu sebesar 798,25 miliar.

Satker dengan growth realisasi Belanja terbesar (yoy) yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebesar 37,66 persen. Peningkatan realisasi belanja yang signifikan pada Kejaksaan RI didukung oleh adanya

kenaikan Pagu sebesar lebih dari lima puluh persen.

2.1.2.4 Berdasarkan Fungsi

Ditinjau dari fungsi pemerintahan, pada tahun 2025, tiga fungsi dengan pagu Belanja tertinggi terdapat pada fungsi **Ekonomi (Rp3.359,64 miliar)**, Ketertiban dan Keamanan (Rp1.387,00 miliar), dan Pertahanan (Rp1.085,97 miliar). Adapun urutan realisasi belanja terbesar yaitu fungsi Ketertiban dan Keamanan (Rp310,54 miliar), Pertahanan (Rp255,03 miliar), dan Ekonomi (Rp221,47 miliar).

Jika ditinjau dari **persentase realisasi terhadap Pagu**, maka fungsi **Pertahanan menjadi peringkat pertama kategori realisasi persentase terbesar (23,48 persen)**, disusul oleh Ketertiban dan Keamanan (22,39 persen), dan Agama (21,10 persen). Adapun rincian Pagu dan realisasi masing-masing fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 - Realisasi Belanja Menurut Fungsi, Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

Fungsi	TA 2024			TA 2025			Growth
	Pagu	Real. Tw I	%	Pagu	Real. Tw I	%	
Agama	96,49	23,36	24,21%	98,48	20,78	21,10%	-2,68%
Ekonomi	4.498,66	425,39	9,46%	3.359,64	221,47	6,59%	-4,53%
Kesehatan	213,43	39,14	18,34%	181,43	31,62	17,43%	-3,52%
Ketertiban Dan Keamanan	1.303,90	317,23	24,33%	1.387,00	310,54	22,39%	-0,51%
Pariwisata	1,54	0,01	0,79%	0,00	0,00	0,00%	-0,79%
Pelayanan Umum	9.096,51	2.249,67	24,73%	9.309,19	2.086,07	22,41%	-1,80%
Pendidikan	889,03	110,87	12,47%	723,75	92,99	12,85%	-2,01%
Perlindungan Lingkungan Hidup	91,94	18,30	19,91%	104,82	16,23	15,48%	-2,26%
Pertahanan	1.155,45	281,32	24,35%	1.085,97	255,03	23,48%	-2,28%
Perumahan Dan Fasilitas Umum	177,27	14,35	8,09%	257,67	1,07	0,42%	-7,49%
Total	17.524,21	3.479,64	19,86%	16.507,96	3.035,80	18,39%	-2,53%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Dari sepuluh fungsi yang ada, pada tahun 2025 hanya terdapat sembilan fungsi

belanja. Adapun belanja fungsi Pariwisata tidak ada di Kepri untuk tahun 2025. Seluruh fungsi





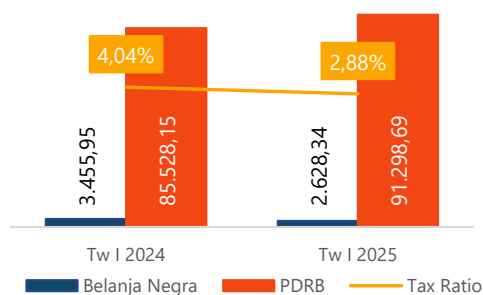
belanja mengalami pertumbuhan minus (yoy), dengan minus terbesar ada pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar minus 7,49 persen (yoy) dan yang terkecil ada pada fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar minus 0,51 persen (yoy).

2.1.2.5 Kontribusi Belanja Terhadap PDRB

Kontribusi Belanja Negara terhadap PDRB triwulan I 2025 sebesar 2,88 persen tersaji pada Grafik 2.7 di bawah. Nilai ini lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 sebesar 4,04 persen. Penurunan kontribusi Belanja Negara pada PDRB disebabkan oleh peningkatan PDRB Kepri yang lebih didominasi komponen PMTB dan konsumsi rumah tangga.

Percepatan realisasi Belanja Pemerintah harus menjadi perhatian dikarenakan pemerintah tidak hanya memiliki peran untuk memberikan layanan kepada masyarakat, namun juga membantu roda perekonomian melalui peran fiskal yang cukup besar.

Grafik 2.7 – Kontribusi Belanja Negara terhadap PDRB Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam miliar Rupiah)



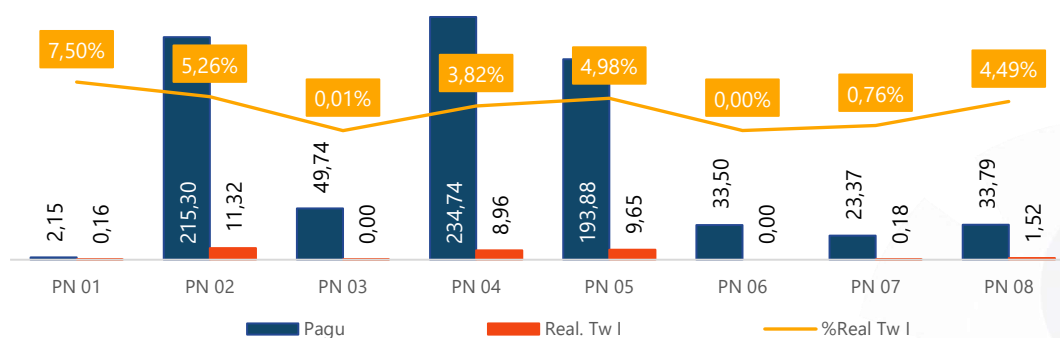
Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri dan BPS (diolah)

2.1.2.6 Capaian Prioritas Nasional

Terdapat **delapan program strategis pemerintah dalam bentuk belanja program**

Prioritas Nasional (PN) yaitu: i) **PN 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM; ii) **PN 2:** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; iii) **PN 3:** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi; iv) **PN 4:** Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas; v) **PN 5:** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; vi) **PN 6:** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan; vii) **PN 7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan viii) **PN 8:** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Pagu dan realisasi triwulan I 2025 atas kedelapan PN ini tersaji secara rinci pada Grafik 2.8 berikut.




Grafik 2.8 – Pagu dan Realisasi Belanja Prioritas Nasional Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam miliar Rupiah)


Sumber: Sintesa, 2025 (data diolah)

Pagu tertinggi terdapat pada PN 04 yaitu sebesar Rp234,74 miliar. Namun demikian, **realisasi belanja triwulan I 2025 tertinggi justru ada pada PN 02 sebesar Rp11,32 miliar**. PN 1 memiliki persentase realisasi belanja tertinggi sebesar 7,50 persen. Terdapat satu belanja yang belum terealisasi sama sekali yaitu pada PN 06. Hal ini membutuhkan perhatian lebih lanjut.

2.1.2.7 Prognosis Belanja Negara

Prognosis Belanja Pemerintah Pusat triwulan I 2025 sebesar Rp1.128,28 miliar dan realisasi sebesar Rp1.041,85 miliar sehingga terdapat deviasi negatif sebesar Rp86,43 miliar.

Deviasi negatif disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang mendorong penurunan BPP di luar Belanja Pegawai, yakni Belanja Barang dan Belanja Modal.

Transfer ke Daerah triwulan I 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.793,16 miliar dan telah direalisasikan sebesar Rp1.586,49 miliar sehingga terdapat deviasi negatif sebesar Rp206,67 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh sebagian besar Belanja Daerah yang mengalami kontraksi diantaranya dipengaruhi oleh efisiensi belanja pemerintah daerah untuk program prioritas dan pencadangan program kepala daerah baru. Rincian prognosis dan realisasi belanja sebagaimana dirinci pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10 – Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

TW	Belanja Pemerintah Pusat (BPP)			Transfer ke Daerah (TKD)		
	Prognosis	Realisasi	Deviasi	Prognosis	Realisasi	Deviasi
Tw I	1.128,28	1.041,85	-86,43	1.793,16	1.586,49	-206,67
Tw II	1.614,78	0,00	0,00	1.666,81	0,00	0,00
Tw III	1.900,15	0,00	0,00	2.066,70	0,00	0,00
Tw IV	3.085,09	0,00	-	2.162,53	0,00	-

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

2.1.2.6 Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara

1. Agar Kanwil DJPb Kepri, KPPN Batam, dan KPPN Tanjung Pinang mendorong satker melengkapi persyaratan administratif penyaluran TKD khususnya DAK Fisik karena sudah memasuki masa penyaluran DAK Fisik sehingga mendorong percepatan pembangunan di daerah.
2. Satker yang memiliki Pagu Belanja Modal agar mempercepat proses pelaksanaan kontrak dan pengerjaan fisik, sehingga tidak menghadapi musim cuaca buruk di Kepri pada akhir tahun anggaran.
3. BPKAD, DPMD dan Inspektorat Daerah agar menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam proses penyaluran TKD, khususnya DAK Fisik, baik dalam tahap perencanaan, penyaluran





sampai dengan tahap pertanggungjawabannya.

4. Kepada satker vertikal K/L agar segera melakukan revisi dalam rangka pengesuaian anggaran efisiensi belanja mengingat saat ini pengaturan batasan-batasan efisiensi belanja sudah ditetapkan.

2.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD)

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan wujud dari peran APBN dalam menghadirkan pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi kesenjangan kemampuan fiskal yang jauh

(*Fiscal Capacity Gap*) antar daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi.

TKD terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. DTU terbagi atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan DTK terbagi atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non-Fisik.

Total realisasi TKD pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.586,49 miliar atau 18,77 persen dari Pagu. Realisasi ini mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar minus 18,62 persen (yoy) meskipun terjadi peningkatan Pagu TKD dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pagu dan realisasi Belanja TKD dijabarkan sebagaimana Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 – Pagu dan Realisasi Belanja TKD di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2024			TA 2025			Growth
	Pagu	Real Tw I	% Real	Pagu	Real Tw I	% Real	
Dana Transfer Umum	5.966,57	1.506,33	25,25%	6.075,81	1.103,03	18,15%	-26,77%
Dana Transfer Khusus	1.893,68	340,36	17,97%	2.045,77	371,20	18,14%	9,06%
Dana Insentif Fiskal	93,99	0,00	0,00%	111,82	0,00	0,00%	0,00%
Dana Desa	227,05	102,83	45,29%	218,00	112,26	51,50%	9,17%
Total TKD	8.181,29	1.949,52	23,83%	8.451,40	1.586,49	18,77%	-18,62%

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Pertumbuhan kontraktif pada TKD disebabkan oleh realisasi DTU yang tumbuh minus 26,77 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya. Sedangkan DTK dan Dana Desa mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 9,06 persen dan 9,17 persen. DIF, seperti periode sebelumnya, masih belum terjadi realisasi penyaluran.

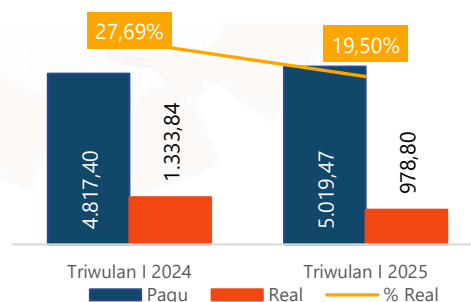
2.1.3.1 Dana Transfer Umum (DTU)

Realisasi DTU sebesar Rp1.103,03 miliar atau 18,15 persen dari Pagu. **Realisasi ini didominasi oleh DAU sebesar Rp978,80 miliar (88,74 persen dari total DTU)** dibandingkan dengan DBH sebesar Rp124,23 miliar (11,26 persen dari total DTU). Proporsi realisasi DAU yang lebih besar dibandingkan dengan DBH sejalan dengan Pagu dari DAU yang juga lebih besar dibandingkan DBH.

Persentase DAU yang lebih besar menggambarkan fokus pemerintah untuk memperkecil ketimpangan fiskal antardaerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Grafik 2.9 – Pagu dan Realisasi Dana Alokasi Umum Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Seperti yang tersaji pada Grafik 2.9, **realisasi DAU pada triwulan I 2025 sebesar Rp978,80 miliar (19,50 persen dari Pagu)**



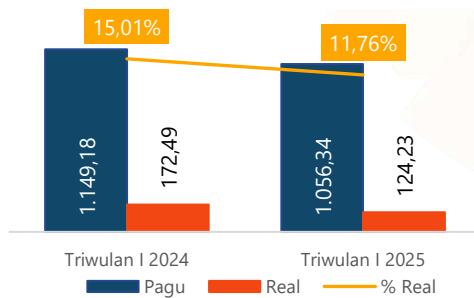


dengan pertumbuhan minus 26,62 persen (yoy). Pagu DAU mengalami peningkatan dari tahun 2024 namun justru terjadi penurunan realisasi DAU pada triwulan I 2025. Penurunan realisasi DAU disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja yang terjadi di lingkup pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi DBH pada triwulan I 2025 sebesar Rp124,23 miliar (11,76 persen dari Pagu). Pagu DBH tahun 2025 (Rp1.056,34 miliar) mengalami penurunan dibandingkan dengan Pagu tahun 2024 (Rp1.149,18 miliar). Penurunan Pagu diikuti dengan penurunan realisasi DBH sehingga menyebabkan **DBH tumbuh kontraktif sebesar minus 27,98 persen (yoy)**. Pagu dan realisasi DBH sebagaimana Grafik 2.10.

Grafik 2.10 – Pagu dan Realisasi Dana Bagi Hasil Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

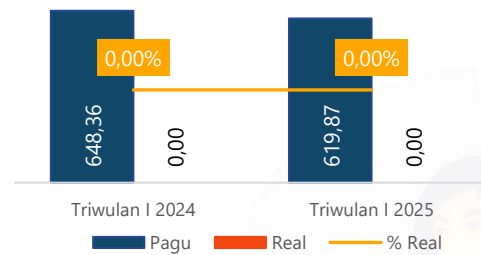
2.1.3.2 Dana Transfer Khusus (DTK)

Realisasi DTK pada triwulan I 2025 sebesar Rp371,20 miliar atau 18,14 persen dari Pagu. **Realisasi ini seluruhnya disumbang oleh DAK Non-Fisik sebesar Rp371,20 miliar**, dibandingkan dengan DAK Fisik yang belum terealisasi.

DAK Fisik

Pada triwulan I 2025, belum ada realisasi DAK Fisik. Hal ini terjadi dikarenakan pada periode tersebut bukan merupakan periode pencairan tahap I DAK Fisik. Hal ini juga yang mengakibatkan pada triwulan I 2024 juga tidak ada realisasi DAK Fisik. Pagu dan realisasi DBH sebagaimana Grafik 2.11 berikut.

Grafik 2.11 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Fisik Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

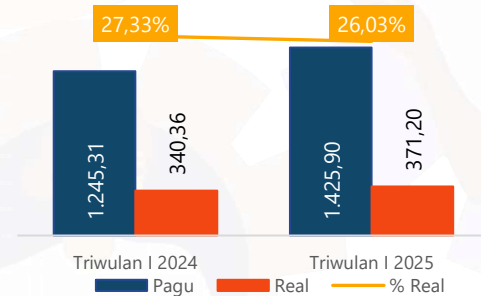


Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

DAK Non – Fisik

Realisasi DAK Non Fisik triwulan I 2025 sebesar Rp371,20 miliar atau 26,03 persen dari Pagu. Realisasi ini tumbuh sebesar 9,06 persen (yoy) sejalan dengan Pagu yang juga meningkat dari tahun 2024 ke tahun 2025. Meskipun demikian, dari sisi persentase realisasi menunjukkan bahwa pada triwulan I 2025 masih lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi triwulan I 2024 (27,33 persen dari Pagu). Pagu dan realisasi DAK Non Fisik tergambar pada Grafik 2.12 berikut.

Grafik 2.12 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

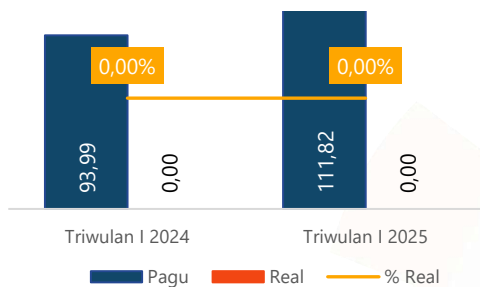




2.1.3.3 Dana Insentif Fiskal

Pada triwulan I 2025 belum terdapat realisasi Dana Insentif Fiskal. Hal ini juga terjadi pada triwulan I 2024 dimana belum ada realisasi penyaluran. Adapun pagu dan realisasi Dana Insentif Fiskal pemda lingkup Kepri secara rinci tergambar pada Grafik 2.13 berikut.

Grafik 2.13 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Insentif Fiskal Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

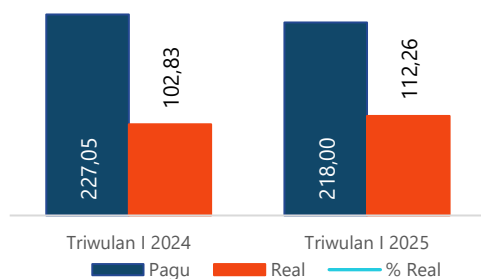


Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

2.1.3.4 Dana Desa

Dana Desa pada triwulan I 2025 terealisasi sebesar **Rp112,26 miliar** atau **51,50 persen dari Pagu**. Realisasi ini tumbuh 9,17 persen (yoy). Meskipun Pagu Dana Desa pada 2025 (Rp218,00 miliar) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (Rp227,05 miliar), namun realisasi penyaluran justru meningkat. Pagu dan realisasi Dana Desa tersaji sebagaimana Grafik 2.14 berikut.

Grafik 2.14 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Desa Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

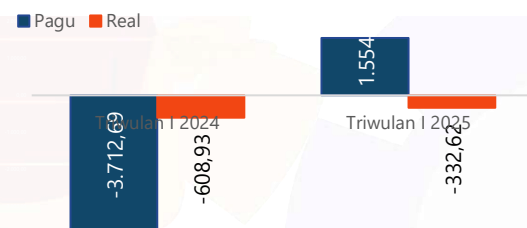


Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

2.1.4 Surplus/Defisit APBN

APBN regional Kepri tahun 2025 **dianggarkan mengalami Surplus sebesar Rp1.554,89 miliar**. Hal ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran yang terjadi di pusat maupun daerah membuat banyak satker vertikal K/L di Kepri memotong anggaran belanjanya. Meskipun demikian, pada triwulan I 2025 justru terjadi **realisasi Defisit sebesar Rp332,62 miliar**. Nilai ini lebih kecil dibandingkan pada triwulan I 2024 sebesar Rp608,93 miliar. Pagu dan realisasi Surplus/Defisit APBN tersaji sebagaimana Grafik 2.15 berikut

Grafik 2.15 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Defisit APBN Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

2.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)

Pelaksanaan APBD lingkup Kepri sampai dengan triwulan I 2025 menunjukkan SiKPA Rp436,12 miliar. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan Rp13.068,19 miliar atau turun 0,59 persen (yoy). Di sisi lain, Belanja Daerah dapat direalisasikan Rp13.454,68 miliar atau meningkat 1,60 persen (yoy) sebagaimana tergambar pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12 – Perkembangan I-Account APBD di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2024			TA 2025			Growth (%)
	Pagu	Real Tw I	% Real	Pagu	Real Tw I	% Real	
PENDAPATAN DAERAH	14.524,05	2.624,58	18,07%	14.606,41	2.803,31	19,19%	6,81%





PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.810,80	881,17	18,32%	5.257,44	1.068,54	20,32%	21,26%
Pajak Daerah	3.701,41	758,01	20,48%	4.355,08	902,20	20,72%	19,02%
Retribusi Daerah	356,75	61,16	17,14%	603,04	90,41	14,99%	47,82%
HPKD yang Dipisahkan	66,54	1,88	2,83%	38,60	2,38	6,17%	26,41%
Lain-Lain PAD yang Sah	686,09	60,12	8,76%	260,71	73,54	28,21%	22,32%
PENDAPATAN TRANSFER	9.609,46	1.743,41	18,14%	9.317,12	1.734,78	18,62%	-0,50%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.870,44	1.706,17	19,23%	8.775,96	1.648,83	18,79%	-3,36%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	739,02	37,24	5,04%	541,16	85,95	15,88%	130,78%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103,79	0,00	0,00%	31,85	0,00	0,00%	0,00%
Pendapatan Hibah	72,94	-	0,00%	1,32	-	0,00%	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Per-UU	30,84	-	0,00%	30,53	-	0,00%	0,00%
BELANJA DAERAH	15.232,97	1.787,46	11,73%	15.096,81	2.157,11	14,29%	20,68%
BELANJA OPERASI	11.719,57	1.571,31	13,41%	11.612,99	1.949,16	16,78%	24,05%
Belanja Pegawai	5.623,84	1.000,99	17,80%	6.342,07	1.261,24	19,89%	26,00%
Belanja Barang dan Jasa	5.114,09	520,03	10,17%	4.676,41	599,67	12,82%	15,31%
Belanja Bunga	4,68	1,54		0,00	-	-	-
Belanja Subsidi	4,93	0,28	5,76%	5,25	-	0,00%	-100,00%
Belanja Hibah	944,96	45,25	4,79%	558,43	86,41	15,47%	90,97%
Belanja Bantuan Sosial	27,07	3,22	11,88%	30,83	1,84	5,98%	-42,68%
BELANJA MODAL	2.116,19	123,97	5,86%	2.005,08	90,47	4,51%	-27,02%
BELANJA TIDAK TERDUGA	85,58	0,31	0,36%	242,39	0,68	0,28%	119,32%
BELANJA TRANSFER	1.311,64	91,88	7,00%	1.236,35	116,80	9,45%	27,12%
Belanja Bagi Hasil	776,95	21,00	2,70%	675,24	6,00	0,89%	-71,43%
Belanja Bantuan Keuangan	534,68	70,87	13,26%	561,10	110,80	19,75%	56,33%
SURPLUS/DEFISIT	-708,93	837,12	-118,08%	-490,40	646,20	-131,77%	-22,81%
PEMBIAYAAN DAERAH	708,93	160,27	22,61%	490,40	0,06	0,01%	-99,96%
Penerimaan Pembiayaan	804,48	160,27	19,92%	496,90	0,06	0,01%	-99,96%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	803,98	160,27	19,93%	496,90	0,00	0,00%	-100,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,50	0,00	0,00%	0,50	0,06	11,84%	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan	95,55	0,00	0,00%	6,50	0,00	0,00%	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	1,50	0,00	0,00%	6,50	0,00	0,00%	0,00%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	92,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	-
SILPA/SIKPA	0,00	997,39		0,00	646,26		-35,20%

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

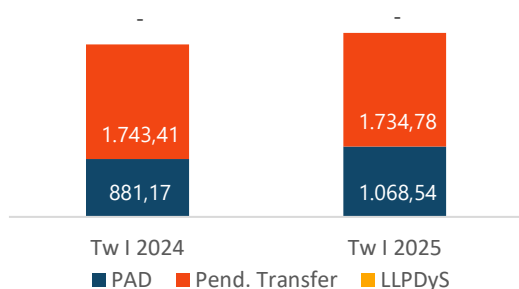




2.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS). Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp2.803,31 miliar atau 19,19 persen dari Pagu dan mengalami pertumbuhan 6,81 persen (yoy).

Grafik 2.16 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

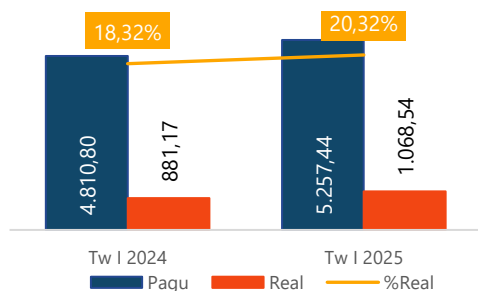


Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana pada Grafik 2.16 masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.734,78 miliar, kemudian diikuti oleh PAD sebesar Rp1.068,54 miliar dan LLPDyS masih belum memiliki realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grafik 2.17 – Perkembangan Target dan Realisasi PAD di Kepri Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

PAD dapat direalisasikan sebesar Rp1.068,54 miliar atau 20,32 persen dari Target. Realisasi PAD tumbuh sebesar 21,26 persen. Dari sisi nominal maupun persentase realisasi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I 2024. Target dan realisasi PAD secara rinci tersaji pada Grafik 2.17 di atas.

Pada triwulan I 2025, **kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 38,12 persen** sedangkan pada triwulan I 2024 memberikan kontribusi sebesar 33, 57 persen terhadap total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan pada triwulan I 2025 **terdapat peningkatan persentase kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah.** Terbitnya UU HKPD memberikan dampak peningkatan PAD ini.

Pertumbuhan PAD sebesar 21,26 persen (yoy) didongkrak oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Retribusi Daerah yang mengalami pertumbuhan paling besar yaitu sebesar 47,82 persen sehingga mendorong PAD tumbuh positif. Adapun Pajak Daerah mengalami pertumbuhan 19,02 persen (yoy), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan 26,41 persen (yoy), dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami pertumbuhan 22,32 persen (yoy).

Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp902,2 miliar atau 84,43 persen dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah Retribusi Daerah sebesar Rp90,41 miliar (8,46 persen dari total PAD), Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp73,54 miliar (6,88 persen dari total PAD), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2,38 miliar (0,22 persen dari total PAD).

Analisis Rasio PAD terhadap PDRB

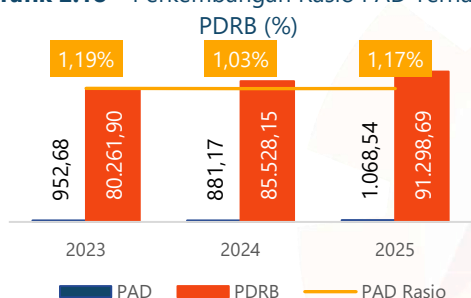
Rasio PAD terhadap PDRB menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio ini





membandingkan PAD Kepri pada triwulan I tiap tahun dengan PDRB Kepri pada triwulan I tiap tahunnya. Pada triwulan I 2025 menunjukkan rasio sebesar 1,17 persen, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan rasio triwulan I 2024 sebesar 1,03 persen. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan triwulan I 2023 maka rasio saat ini masih lebih rendah. Hal ini karena pada triwulan I 2023 memiliki rasio sebesar 1,19 persen. Adapun rasio PAD terhadap PDRB dalam tiga tahun terakhir tersaji dalam Grafik 2.18 berikut.

Grafik 2.18 – Perkembangan Rasio PAD Terhadap



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Analisis Kemandirian Fiskal Daerah

Otonomi daerah adalah pemberian kemandirian kepada pemerintah daerah, berupa wewenang mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara mandiri melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah.

Peningkatan kemampuan fiskal daerah menjadi syarat utama untuk mendukung otonomi tersebut. Oleh karena itu, pemda diberikan perluasan desentralisasi fiskal untuk memperkuat kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun kewenangan dan perluasan desentralisasi fiskal telah diberikan kepada

pemerintah daerah, **mayoritas pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat.** Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai layanan publik secara mandiri belum sepenuhnya tercapai. Tak terkecuali di Kepri, mayoritas Belanja Daerah masih dibiayai oleh Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang akan dibagi ke dalam beberapa kluster sebagai mana Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 – Kluster Kondisi Kemandirian Fiskal

IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025

IKF dihitung dengan membandingkan antara PAD dengan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber lain, seperti transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman. Selain itu, terdapat cara lain untuk menghitung kemandirian daerah yaitu dengan memperhitungkan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari suatu daerah, termasuk DBH.

Indeks Kemandirian Fiskal I

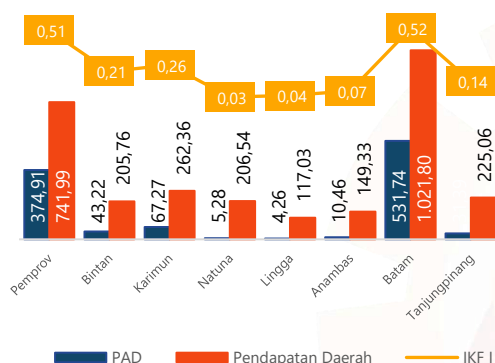
$$[IKF I = \text{PAD} / \text{Total Pendapatan}]$$





Indeks Kemandirian Fiskal I (IKF I) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD dengan total Pendapatan Daerah. Pada triwulan I 2025, posisi PAD dan Pendapatan Daerah dari pemda lingkup Kepri tergambar dalam Grafik 2.19 berikut.

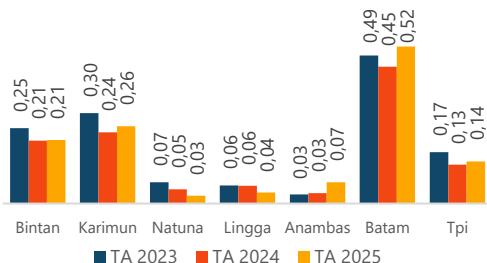
Grafik 2.19 – Jumlah PAD dan Pendapatan Daerah Pemda Lingkup Kepri, Triwulan I 2025 (dalam miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Hasil perhitungan IKF I Triwulan I dari tahun 2023 s.d 2025 sebagaimana Grafik 2.20 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir **mayoritas kabupaten/kota di lingkup Kepri masih berada pada kluster “Belum Mandiri”**. Kota Batam dan Kabupaten Karimun berada pada kluster “Menuju Kemandirian”. Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna masih berada pada kluster “Belum Mandiri”.

Grafik 2.20 – Indeks Kemandirian Fiskal I Triwulan I, 2023 s.d. 2025



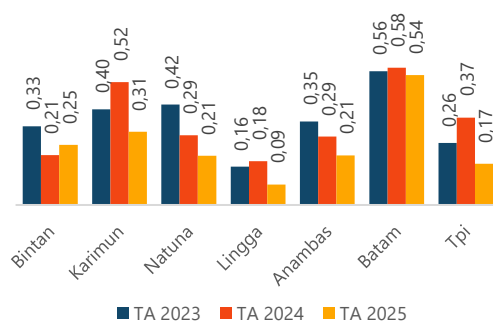
Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Indeks Kemandirian Fiskal II

$$[IKF II = (PAD+DBH)/Total\ Pendapatan]$$

Indeks Kemandirian Fiskal II (IKF II) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD ditambah DBH dengan total Pendapatan Daerah. Pada triwulan I 2025, posisi PAD+DBH dan Pendapatan Daerah dari pemda lingkup Kepri tergambar dalam Grafik 2.21 berikut.

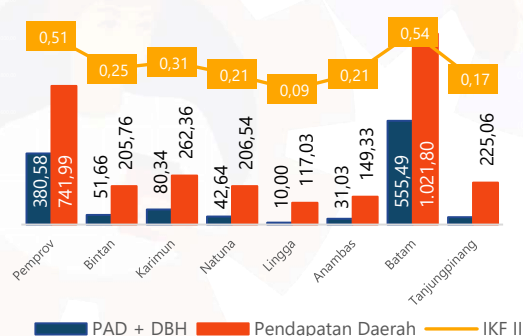
Grafik 2.21 – Indeks Kemandirian Fiskal II Triwulan I, 2023 s.d. 2025



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Hasil perhitungan IKF II triwulan I dari tahun 2023 s.d 2025 sebagai mana Grafik 2.22 menunjukkan bahwa jika memasukkan komponen DBH ke dalam perhitungan IKF akan membuat beberapa daerah yang awalnya berada pada ‘Belum Mandiri’ menjadi ‘Menuju Kemandirian’ yaitu Bintan.

Grafik 2.22 – Jumlah PAD+DBH dan Pendapatan Daerah Pemda Lingkup Kepri, 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Hal ini dikarenakan adanya DBH yang diterima oleh Bintan. Meskipun demikian penambahan komponen DBH untuk perhitungan kemandirian daerah pada triwulan

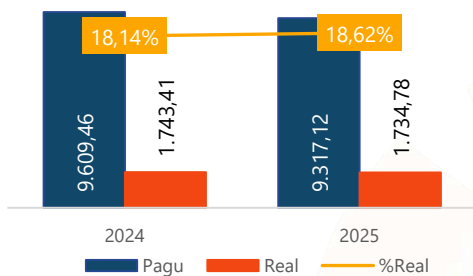




I tidak berdampak signifikan terhadap kenaikan status kemandirian fiskal daerah dikarenakan pada triwulan I masih sedikit DBH yang disalurkan.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Grafik 2.23 – Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

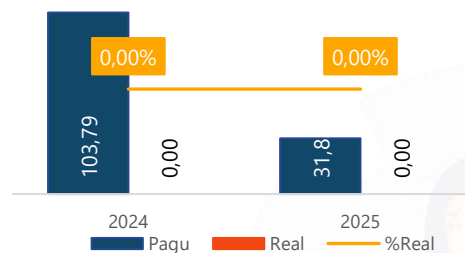
Pada triwulan I 2025, Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.734,78 miliar (18,62 persen dari Target) dan tumbuh sebesar minus 0,50 persen (yoy). Realisasi Pendapatan Transfer terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.648,83 miliar dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp85,95 miliar.

Pada triwulan I 2025, **Pendapatan Transfer secara dominan disumbang oleh Dana Alokasi Umum (DAU)** sebesar Rp1.202,89 miliar atau 69,34 persen dari total Pendapatan Transfer. Selain DAU, Pendapatan Transfer berturut-turut terdiri atas DAK sebesar Rp324,03 miliar, DBH SDA sebesar Rp73,04 miliar, DBH Pajak sebesar Rp48,87 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp85,95 miliar.

2.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDyS)

Pada triwulan I 2025, belum terdapat realisasi LLPDyS seperti halnya pada triwulan I 2024. Perlu menjadi perhatian bersama bahwa LLPDyS merupakan jenis pendapatan yang insidental dan sangat bergantung kepada banyak faktor eksternal.

Grafik 2.24 – Target dan Realisasi LLPDyS Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



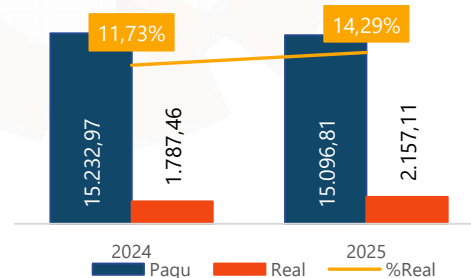
Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah direalisasikan sebesar Rp2.157,11 miliar atau 14,29 persen dari Pagu. Pada triwulan I tahun 2025 terjadi penurunan Pagu Belanja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, realisasi Belanja Daerah tumbuh 20,68 persen (yoy), ditopang oleh besarnya realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.261,24 miliar yang disebabkan adanya penerimaan PNS pada tahun 2024 yang mulai bekerja di tahun 2025 sehingga menyebabkan naiknya jumlah pegawai yang harus dibayarkan gajinya.

Satu-satunya jenis belanja yang tumbuh kontraktif adalah Belanja Modal yaitu sebesar minus 27,02 persen (yoy). Hal ini disebabkan pengaturan efisiensi anggaran yang terus diperketat dan menyebabkan daerah berhati-hati dalam melaksanakan kontrak terkait Belanja Modal. Adapun perkembangan Pagu dan realisasi belanja sebagaimana Grafik 2.25 berikut.

Grafik 2.25 – Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)



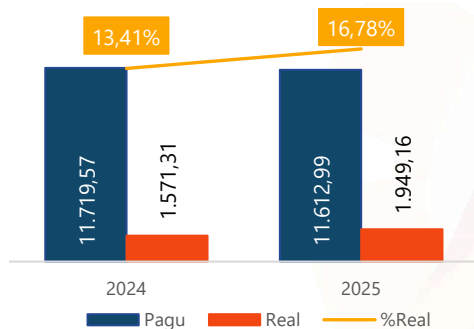


2.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Operasi

Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp1.949,16 miliar (16,78 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 24,05 persen (yoy). Persentase realisasi maupun pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Pegawai yaitu sebesar 19,89 persen dari Pagu dan 26,00 persen (yoy). Pagu dan realisasi Belanja Operasi disajikan pada Grafik 2.26 berikut.

Grafik 2.26 – Pagu dan Realisasi Belanja Operasi Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

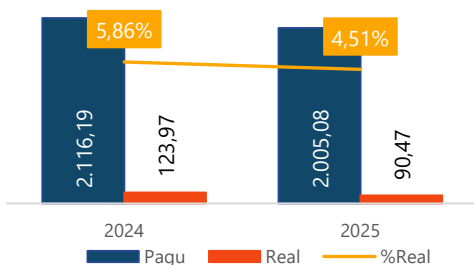


Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Belanja Modal

Belanja Modal direalisasikan sebesar Rp90,47miliar atau 4,51 persen dari Pagu dengan pertumbuhan negatif sebesar minus 27,02 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh pengaturan efisiensi anggaran yang terus diperketat dan menyebabkan daerah lebih berhati-hati dalam melaksanakan kontrak terkait Belanja Modal. Pagu dan realisasi Belanja Modal disajikan pada Grafik 2.27 berikut.

Grafik 2.27 – Pagu dan Realisasi Belanja Modal Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

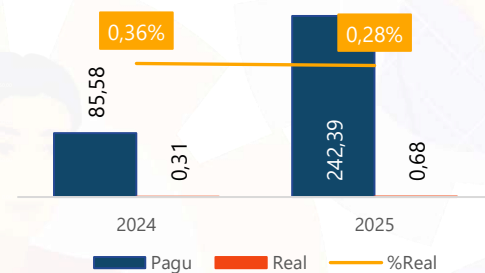


Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Realisasi Belanja Modal tertinggi adalah Peralatan dan Mesin sebesar Rp44,71 miliar kemudian berturut-turut diikuti oleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp30,33 miliar, Gedung dan Bangunan sebesar Rp8,21 miliar, dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6,81 miliar.

Belanja Tidak Terduga

Grafik 2.28 – Pagu dan Realisasi Belanja Tak Terduga Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Pagu dan realisasi Belanja Tak Terduga disajikan pada Grafik 2.28 di atas. **Belanja Tidak Terduga dapat direalisasikan sebesar Rp0,68 miliar (0,28 persen dari Pagu)** dan mengalami pertumbuhan sebesar 119,32 persen (yoy). Belanja Tidak Terduga merupakan pos pengeluaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan dan bersifat *force majeure*, misalnya penanggulangan bencana alam, dll.

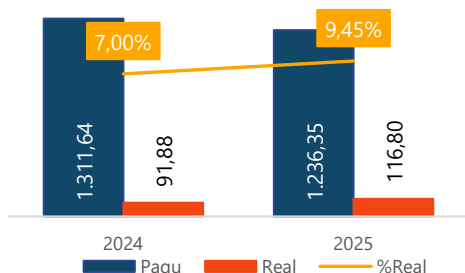
Belanja Transfer

Belanja Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp116,80 miliar atau 9,45 persen dari Pagu. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil dapat direalisasikan sebesar Rp6,00 miliar (0,89 persen dari Pagu), sedangkan Belanja Bantuan Keuangan dapat direalisasikan sebesar Rp110,8 miliar (19,75 persen dari Pagu). Pagu dan realisasi Belanja Transfer disajikan pada Grafik 2.29 berikut.





Grafik 2.29 – Target dan Realisasi Belanja Transfer Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

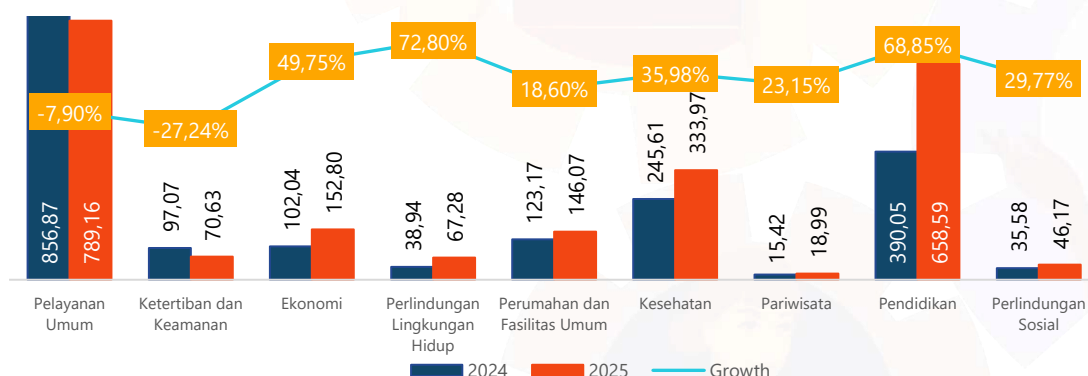
2.2.2.2 Berdasarkan Fungsi

Belanja daerah menurut fungsinya terbagi menjadi sembilan jenis. Berdasarkan fungsinya, realisasi belanja tertinggi ada pada belanja fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp789,16 miliar, kemudian dilanjut berturut-turut oleh Pendidikan sebesar

Rp658,59 miliar, Kesehatan sebesar Rp333,97 miliar, Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp146,07 miliar, Ekonomi sebesar Rp152,80 miliar, Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp70,63 miliar, Perlindungan Sosial sebesar Rp46,17 miliar, dan Pariwisata sebesar Rp18,99 miliar.

Porsi belanja berdasarkan fungsi terbesar terdapat pada Pelayanan Umum yang mencapai 34,56 persen dari total belanja, kemudian secara berturut-turut Pendidikan 28,84 persen, dan Kesehatan 14,62%. Kondisi ini menunjukkan tingginya upaya pemerintah daerah dalam peningkatan layanan publik secara umum, pendidikan, dan kesehatan di Kepri. Rincian perkembangan realisasi Belanja Daerah menurut fungsi dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tersaji dalam Grafik 2.30 berikut.

Grafik 2.30 – Realisasi Belanja Menurut Fungsi, 2024 dan 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: SIKRI dan GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Kesembilan fungsi mengalami pertumbuhan positif hampir pada seluruh fungsi kecuali dua Pelayanan Umum dan Ketertiban dan Keamanan. Pertumbuhan belanja berdasarkan fungsi tertinggi terdapat pada fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup yang mencapai 72,80 persen (yoy), kemudian diikuti Pendidikan 68,85 persen (yoy), dan Ekonomi. Hal ini menandakan fokus pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam peningkatan lingkungan hidup dan pendidikan di wilayah Kepri dari tahun ke tahun.

2.2.3 Surplus/Defisit APBD

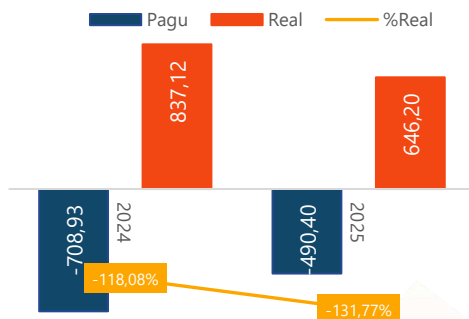
APBD 2025 ditetapkan Defisit sebesar Rp490,40 miliar, pada triwulan I 2025 mencatatkan **Surplus anggaran sebesar Rp646,2 miliar**. Jika dibandingkan dengan triwulan I 2024 maka nilai Surplus ini justru lebih rendah dikarenakan pada triwulan tersebut terdapat Surplus sebesar Rp837,12 miliar. Atas nilai perkembangan Surplus ini perlu ditentukan langkah-langkah dalam optimalisasi APBD khususnya pengelolaan kas agar menghindari *idle cash*. *Idle cash* adalah bentuk





ketidak efisienan pemerintah dalam tugasnya sebagai pengungkit perekonomian.

Grafik 2.31 – Target dan Realisasi Surplus/Defisit APBD Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



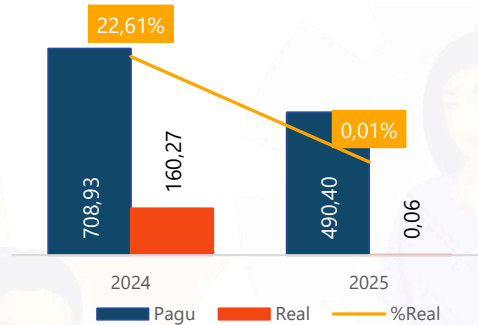
Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

2.2.4 Pembiayaan Daerah

Pada triwulan I tahun 2025, Pemerintah Daerah telah menganggarkan Pembiayaan Netto sebesar Rp490,40 miliar, dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp496,9 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp6,5 miliar. **Realisasi Pembiayaan pada triwulan I 2025 sebesar Rp0,06 miliar (0,01 persen dari Pagu)**, dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,06 miliar (0,01 persen

dari Pagu) dan Pengeluaran Pembiayaan belum terealisasi. Dengan adanya Surplus dan Penerimaan Pembiayaan maka terbentuk SiLPA sebesar Rp646,26 miliar.

Grafik 2.32 – Target dan Pembiayaan Daerah Triwulan I, 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

2.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Pada tingkat wilayah, Kanwil DJPb Kepri menyusun **Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) tingkat wilayah** yang mengonsolidasikan LKPP tingkat wilayah dan LKPD konsolidasi di wilayah kerja Kanwil DJPb Kepri. Tabel 2.14 berikut menyajikan perkembangan realisasi anggaran konsolidasi triwulan I 2024 dan triwulan I 2025.

Tabel 2.14 – Perkembangan Realisasi Konsolidasi, Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2025	% Growth
PENDAPATAN KONSOLIDASI	4.117,01	3.542,57	-13,95%
Penerimaan Perpajakan	2.975,51	2.717,52	-8,67%
Pendapatan PNB	1.141,50	825,05	-27,72%
BELANJA DAN TRANSFER KONSOLIDASI	3.892,65	3.441,62	-11,59%
Belanja Pusat dan Daerah	3.202,01	3.094,97	-3,34%
Transfer Pusat dan Daerah	690,64	346,64	-49,81%
SURPLUS/DEFISIT	224,36	100,96	-55,00%
PEMBIAYAAN NETTO	160,27	0,06	-99,96%
Penerimaan Pembiayaan	160,27	0,06	-99,96%
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00%
SiLPA/SiKPA	384,63	101,02	-73,74%

Sumber GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pada triwulan I 2025 secara konsolidasi terdapat realissssasi Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp3.542,57 miliar dengan *growth* minus 13,95 persen (yoy). Realisasi Belanja dan Transfer Konsolidasi sebesar Rp3.441,62 miliar

dengan *growth* minus 11,59 persen (yoy). Atas realisasi pendapatan dan belanja ini terdapat Defisit sebesar Rp100,96 miliar. Jumlah Defisit ini lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 sehingga terjadi *growth* sebesar minus 55,00 persen (yoy).

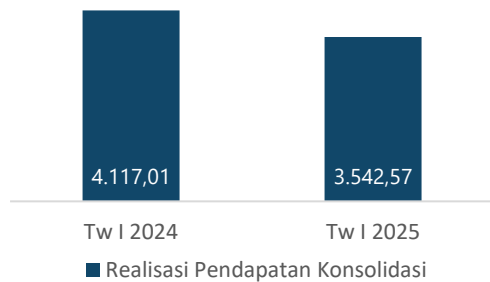




Terdapat realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0,06 miliar dengan *growth* minus 99,96 persen (yoy) sehingga mencatatkan SiLPA sebesar Rp101,02 miliar.

2.3.1 Pendapatan Konsolidasian

Grafik 2.33 –Realisasi Pendapatan Konsolidasian, Triwulan I 2024 dan 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

Pada Grafik 2.33 terlihat **realisasi Pendapatan Konsolidasi mengalami penurunan**. Pada triwulan I 2025, realisasi Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp3.542,57 miliar tumbuh minus 13,95 persen (yoy). Perkembangan Pendapatan Konsolidasi yang menurun terjadi pada Penerimaan Perpajakan (minus 8,67 persen) dan Pendapatan PNBPNP (minus 27,72 persen).

Pada triwulan I 2025, **kontribusi Pendapatan Konsolidasi didominasi oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.717,52 miliar**, kemudian diikuti oleh Pendapatan PNBPNP sebesar Rp825,05 miliar.

2.3.2 Belanja Konsolidasian

Pada Grafik 2.34 terlihat realisasi **Belanja Konsolidasi triwulan I 2025 sebesar Rp3.441,62 miliar** dengan pertumbuhan realisasi Belanja Konsolidasi sebesar minus 11,59 persen (yoy). Pada triwulan I 2025, Belanja Konsolidasi didominasi oleh Belanja Pusat dan Daerah sebesar Rp3.094,97 miliar dibandingkan dengan Transfer Pusat dan Daerah sebesar Rp346,64 miliar.

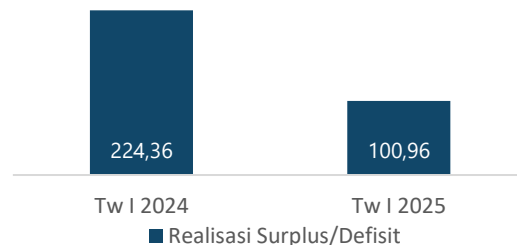
Grafik 2.34 –Realisasi Belanja Konsolidasian, Triwulan I 2024 dan 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (diolah)

2.3.3 Surplus/Defisit

Grafik 2.35 –Realisasi Defisit Konsolidasian, Triwulan I 2024 dan 2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

Seperti yang terlihat pada Grafik 2.35 di bawah, perkembangan realisasi Surplus/Defisit Konsolidasi menunjukkan penurunan Surplus. **Pada triwulan I 2025, Surplus tercatat sebesar Rp100,96 miliar** dengan pertumbuhan sebesar minus 55,00 (yoy). Surplus yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh Pendapatan Konsolidasi yang mengalami pertumbuhan minus yang lebih besar nilainya dibandingkan Belanja Konsolidasi.

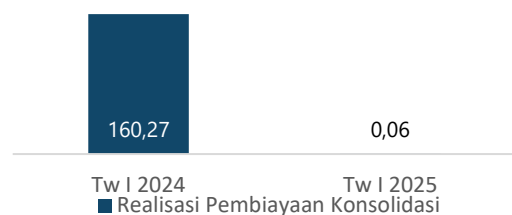
2.3.4 Pembiayaan Konsolidasi

Realisasi Pembiayaan Konsolidasi pada triwulan I 2025 sebesar Rp0,06 miliar. Nilai ini sangat kecil apabila dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar Rp160,27 miliar seperti yang terlihat pada Grafik 2.36 di bawah.





Grafik 2.36 –Realisasi Pembiayaan
Konsolidasian, Triwulan I 2024 dan 2025 (Dalam
Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2025 (data diolah)

2.4 Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan mengatasi permasalahan gizi buruk, terutama stunting, serta meningkatkan partisipasi sekolah melalui pemberian makanan sehat kepada peserta didik. *World Food Program* (WFP, 2023) menyatakan bahwa program pemberian makanan di sekolah memiliki tujuan multisektoral yang saling terintegrasi, mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Selain bermanfaat pada peningkatan gizi dan kesehatan, peningkatan belanja pemerintah juga dapat meningkatkan perekonomian dengan memberikan *multiplier*

effect. Analisis Input-Output menjadi *tools* penting untuk menghitung dampak peningkatan belanja pemerintah di sektor penyediaan akomodasi makan minum terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh kesiapan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan teknis. Ketersediaan dan distribusi pangan lokal merupakan prasyarat utama agar pasokan makanan dapat terjamin secara berkelanjutan. Dalam konteks Kepulauan Riau, penguatan produksi pertanian lokal (seperti sayuran, ikan, dan hasil laut lainnya) serta sistem logistik antarpulau menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pasokan makanan bergizi. Dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor berperan signifikan dalam keberhasilan program. Keterlibatan Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara sinergis sangat diperlukan untuk mengintegrasikan rantai kebijakan dari hulu ke hilir. Perkembangan pelaksanaan program MBG di Kepri telah dilaksanakan pada beberapa Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai mana pada tabel 2.15 berikut.

2.4.1 Perkembangan Pelaksanaan Program MBG di Kepri

Tabel 2.15 – Matriks Perkembangan Pelaksanaan Program MBG di Kepri

SPPG	Kota Batam	Kota Tanjungpinang	Kab. Karimun	Kab. Kep. Anambas
Jumlah SPPG	5	2	1	1
Status	Sudah beroperasi	Sudah Beroperasi	Sudah Beroperasi	Sudah Beroperasi
Pelaksana dan Kesiapan Fasilitas	1. SPPG Batam Kota 2. Yayasan Darush Sholihin Nongsa Batam 3. SPPG Kota Batam – Bengkong 4. SPPG Kota Batam – Batam Kota, Teluk Tering 5. SPPG Kota Batam – Sei Beduk. Penyediaan fasilitas dapur, mobil distribusi, personil staf dapur,	1. SPPG Kota Tanjung Pinang – Bukit Bestari 2. SPPG Tanjung Pinang Timur. Penyediaan fasilitas dapur, mobil distribusi, personil staf dapur, dan koordinasi Bersama mitra penyedia bahan makanan. Penentuan menu harian harus mendapat persetujuan	SPPG Yayasan Kali Kedua Indonesia Kec. Tebing. Penyediaan fasilitas dapur, mobil distribusi, personil staf dapur, dan koordinasi Bersama mitra penyedia bahan makanan. Penentuan menu harian harus mendapat persetujuan Kepala SPPG dengan melalui pengecekan	SPPG Kepulauan Anambas – Siantan Tengah. Penyediaan fasilitas dapur, mobil distribusi, personil staf dapur, dan koordinasi Bersama mitra penyedia bahan makanan. Penentuan menu harian harus mendapat persetujuan Kepala SPPG dengan melalui





dan koordinasi Bersama mitra penyedia bahan makanan. Penentuan menu harian harus mendapat persetujuan Kepala SPPG dengan melalui pengecekan gizi oleh Ali Gizi secara mingguan.

Kepala SPPG dengan melalui pengecekan gizi oleh Ali Gizi secara mingguan.

gizi oleh Ali Gizi secara mingguan.

pengecekan gizi oleh Ali Gizi secara mingguan.

Personil	1 Kepala SPPG, 1 Ahli Gizi 1 Akuntan dan - Dibantu maksimal 47 tenaga karyawan (koki, tim cleaning, driver).	1 Kepala SPPG, 1 Ahli Gizi 1 Akuntan dan - Dibantu maksimal 47 tenaga karyawan (koki, tim cleaning, driver).	1 Kepala SPPG, 1 Ahli Gizi 1 Akuntan dan - Dibantu maksimal 47 tenaga karyawan (koki, tim cleaning, driver).	1 Kepala SPPG, 1 Ahli Gizi 1 Akuntan dan - Dibantu maksimal 47 tenaga karyawan (koki, tim cleaning, driver).
Target Penerima	Balita, TK, SD, dan SMP dengan total 15.286 orang siswa	SD, SMP, dan SMA dengan total 6.593 orang siswa	SD, SMP, dan SMA dengan total 3.112 orang siswa	SD, SMP, dan SMA dengan total 534 orang siswa
Isu/Kendala Pelaksanaan	Tidak ditemukan anomali dalam pelaksanaan MBG di Kepri. Program berjalan lancar, isu penyaluran pendanaan yang digali di lapangan baik dari pihak penanggungjawab (SPPG) maupun penerima manfaat (murid sekolah) tidak signifikan.	Tidak ditemukan anomali dalam pelaksanaan MBG di Kepri. Program berjalan lancar, isu penyaluran pendanaan yang digali di lapangan baik dari pihak penanggungjawab (SPPG) maupun penerima manfaat (murid sekolah) tidak signifikan.	Tidak ditemukan anomali dalam pelaksanaan MBG di Kepri. Program berjalan lancar, isu penyaluran pendanaan yang digali di lapangan baik dari pihak penanggungjawab (SPPG) maupun penerima manfaat (murid sekolah) tidak signifikan.	Tidak ditemukan anomali dalam pelaksanaan MBG di Kepri. Program berjalan lancar, isu penyaluran pendanaan yang digali di lapangan baik dari pihak penanggungjawab (SPPG) maupun penerima manfaat (murid sekolah) tidak signifikan.

Sumber Data: Data Operasional MBG, Direktorat PA 2025 (diolah)

2.4.1.1 Pelaksanaan MBG Kota Batam

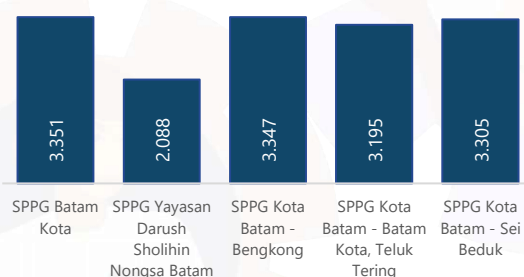
Gambar 2.1 – Pelaksanaan MBG di Kota Batam



Sumber: SPPG Batam Kota - Bengkong, 2025

Pelaksanaan MBG di Kota Batam saat ini terdapat pada 5 SPPG, diantaranya yaitu SPPG Batam Kota, Yayasan Darush Sholihin Nongsa Batam, SPPG Kota Batam – Bengkong, SPPG Kota Batam Kota - Teluk Tering, SPPG Kota Batam - Sei Beduk.

Grafik 2.37 – Penerima Manfaat MBG Kota Batam per SPPG



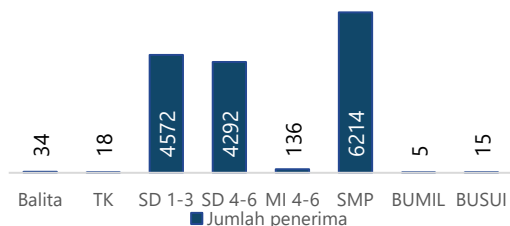
Sumber Data: Data Operasional MBG, Direktorat PA 2025 (diolah)

Penerima manfaat MBG di Kota Batam mencapai 15.285 orang. Adapun penerima manfaat pada masing-masing SPPG, yaitu SPPG Batam 3.351 orang, SPPG Yayasan Darush Sholihin Nongsa Batam sebanyak 2.088 orang, SPPG Kota Batam – Bengkong 3.347 orang, SPPG Kota Batam – Bengkong, SPPG Kota Batam Kota - Teluk Tering 3.195 orang, dan SPPG Kota Batam - Sei Beduk 3.305 orang.





Grafik 2.38 – Penerima Manfaat MBG Kota Batam per Jenis Penerima



Sumber Data: Data Operasional MBG, Direktorat PA 2025 (diolah)

Penerima manfaat MBG di Kota Batam tertinggi secara berturut-turut pada siswa SMP 6.214 orang (40,65 persen dari total penerima), siswa SD kelas 1 s.d. 3 sebanyak 4.572 orang (29,91 persen dari total penerima), siswa SD kelas 4 s.d. 6 sebanyak 4.292 orang (28,08 persen dari total penerima). Selain itu penerima manfaat lainnya, yaitu Balita sebanyak 34 orang, siswa TK 18 orang, Busui 15 orang, dan Bumil 5 orang.

2.4.1.2 Pelaksanaan MBG Kota Tanjungpinang

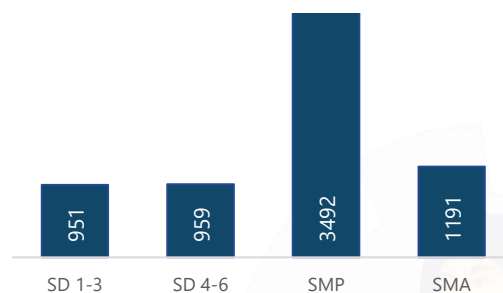
Program MBG di Kota Tanjungpinang telah dilaksanakan melalui dua SPPG, yaitu SPPG Kota Tanjung Pinang - Bukit Bestari dan SPPG Tanjung Pinang Timur. Kedua SPPG tersebut menyalurkan MBG kepada 6.593 penerima manfaat, yang terbagi pada SPPG Tanjung Pinang - Bukit Bestari 3.186 orang dan SPPG Tanjung Pinang Timur 3.407 orang.

Gambar 2.2 – Pelaksanaan MBG di Kota Tanjungpinang



Sumber: Kunjungan Kanwil DJPb Kepri, 2025

Grafik 2.39 – Penerima Manfaat MBG Kota Batam per Jenis Penerima



Sumber Data: Data Operasional MBG, Direktorat PA 2025 (diolah)

Penerima manfaat MBG tertinggi secara berturut-turut di Kota Tanjungpinang terdapat pada siswa SMP 3.492 orang (52,97 persen dari total penerima), siswa SMA 1.191 orang (18,06 persen dari total penerima), siswa SD kelas 4-6 sebanyak 959 orang (14,55 persen dari total penerima), dan siswa SD kelas 1-3 sebanyak 951 orang (14,42 persen dari total penerima). Adapun apabila dilihat secara total, penerima manfaat siswa SD mencapai 1.910 orang (28,97 persen dari total).

2.4.1.3 Pelaksanaan MBG Kabupaten Karimun

Gambar 2.3 – SPPG di Kabupaten Karimun



Sumber: Kunjungan Kanwil DJPb Kepri, 2025

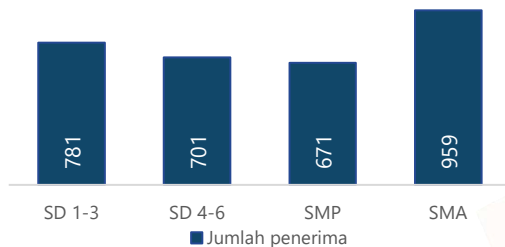
Pelaksanaan MBG di Kabupaten Karimun saat ini telah dilaksanakan oleh SPPG SPPG Yayasan Kali Kedua Indonesia Kec. Tebing. Jumlah penerima manfaat MBG di Karimun mencapai 3.112 orang. Jumlah tersebut terbagi pada siswa SMA mencapai 959 orang (30,82 persen dari total penerima), siswa SD kelas 1-3 sebanyak 781 orang (25,10 persen dari total penerima), siswa SD kelas 5-6 sebanyak 701





orang (22,53 persen dari total penerima, dan siswa SMP mencapai 671 orang (21,56 persen dari total penerima) sebagaimana pada Grafik 2.39 berikut.

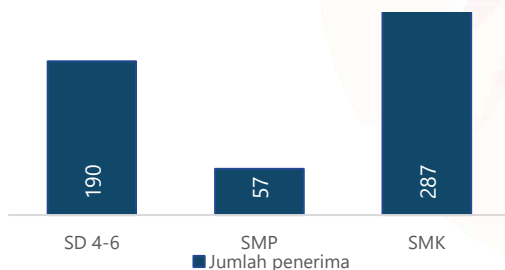
Grafik 2.40 – SPPG di Kabupaten Karimun



Sumber Data: Data Operasional MBG, Direktorat PA 2025 (diolah)

2.4.1.4 Pelaksanaan MBG Kabupaten Kepulauan Anambas

Grafik 2.41– SPPG di Kabupaten Karimun



Sumber Data: Data Operasional MBG, Direktorat PA 2025 (diolah)

Program MBG di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini telah dilaksanakan melalui SPPG Kepulauan Anambas - Siantan Tengah. Jumlah penerima manfaat MBG di Anambas mencapai 534 orang. Dari jumlah tersebut terbagi pada siswa SMK 287 orang (53,75 persen dari total penerima), siswa SD kelas 4 s.d. 6 sebanyak 190 orang (35,58 persen dari total penerima), dan siswa SMP 57 orang (10,67 persen dari total penerima).

2.4.2 Analisis Outcome Pelaksanaan MBG di Kepri

Program MBG di Kepri telah diimplementasikan pada 4 Kabupaten/Kota dengan menjangkau sebanyak 25.525 penerima manfaat. Program ini bertujuan untuk

meningkatkan asupan gizi anak, mengurangi beban ekonomi rumah tangga, serta memberdayakan UMKM sektor pertanian lokal.

Dalam jangka pendek, program MBG diproyeksikan dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Dampak tersebut antara lain melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), inflasi sektor makanan, hingga pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Hal ini terjadi karena meningkatnya permintaan atas produk pangan lokal yang mendorong aktivitas di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, distribusi makanan, dan industri pengolahan.

Dalam jangka panjang, program ini diharapkan menghasilkan berbagai *outcome* strategis. *Outcome* tersebut mencakup perbaikan status gizi anak, peningkatan tingkat kehadiran siswa di sekolah, dan perbaikan capaian akademik. Selain itu, implementasi program ini juga berkontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi murni (*Net Enrollment Rate*) dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam jangka pendek program MBG dapat memberikan dampak pada perekonomian daerah, seperti meningkatnya NTP, NTN, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara keseluruhan. Dampak program MBG ini tentu saja tidak hanya dirasakan oleh sektor penyediaan makanan dan minum atau pertanian saja melainkan secara simultan dapat mendorong sektor ekonomi lainnya, seperti industri pengolahan.

Untuk memahami dampak ekonomi program MBG di Kepri secara lebih komprehensif, analisis input-output digunakan sebagai pendekatan utama. Metode ini dinilai sangat relevan karena mampu menggambarkan hubungan antar sektor dalam perekonomian, serta mengestimasi dampak

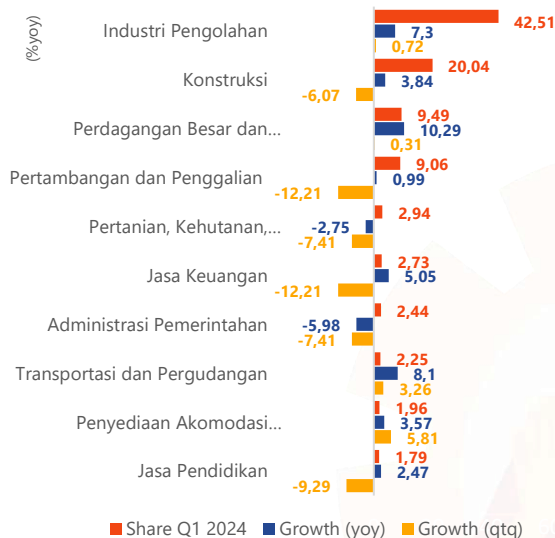




langsung, tidak langsung, dan induksi dari progra MBG terhadap perekonomian di daerah.

2.4.2.1 Analisis Dampak MBG Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Grafik 2.42 – Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan I 2025 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2025 (diolah)

Sektor ekonomi yang terkait langsung dengan program MBG secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi secara berturut-turut, yaitu perdagangan besar dan eceran 10,29 persen (yoy), transportasi dan pergudangan 8,1 persen (yoy), industri pengolahan 7,3 persen (yoy), serta penyediaan akomodasi dan makan minum 3,57% (yoy).

Tingginya pertumbuhan ekonomi disektor perdagangan besar dan eceran tidak terlepas dari meningkatnya permintaan bahan makanan pokok dari program MBG. Program ini mendorong lonjakan kebutuhan atas komoditas pangan seperti beras, telur, daging, sayur, dan buah-buahan, yang secara langsung meningkatkan aktivitas distribusi dan penjualan di tingkat grosir maupun eceran.

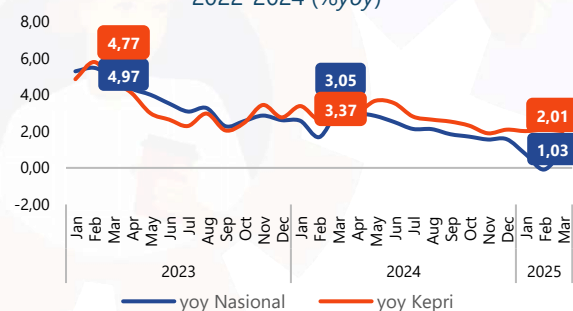
Sejalan dengan itu, sektor transportasi dan pergudangan turut yang tumbuh 8,1 persen (yoy) turut didorong oleh meningkatnya aktivitas distribusi bahan

pangan untuk mendukung program MBG, terutama mengingat kondisi geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Tingginya kebutuhan akan pengiriman antarpulau serta layanan logistik berpendingin turut mendorong mobilitas barang dan jasa, yang pada akhirnya memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Peningkatan sektor industri pengolahan yang mencapai 7,3 persen (yoy) juga tidak terlepas dari implementasi program MBG, mengingat sektor ini menghasilkan berbagai output yang mendukung pelaksanaan program MBG, seperti bahan makanan olahan, kemasan makanan, hingga peralatan dapur. Kebutuhan akan pasokan makanan dalam jumlah besar dan berkualitas mendorong aktivitas produksi di industri pengolahan, baik skala besar maupun rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada sektor primer, tetapi juga turut menggerakkan sektor sekunder yang berperan penting dalam rantai pasok pangan.

2.4.2.2 Analisis Dampak MBG Terhadap Inflasi

Grafik 2.43 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2025, (diolah)

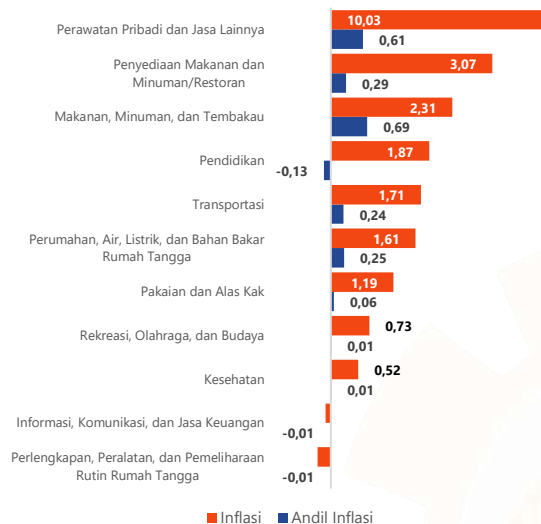
Pada bulan Maret 2025, Kepri mengalami inflasi sebesar 2,01 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,07. Angka tersebut lebih tinggi daripada inflasi nasional yang sebesar 1,03% (yoy). Apabila kita rinci lebih lanjut, komoditas





dengan inflasi dan andil inflasi tertinggi secara berturut-turut sebagaimana pada grafik 4.44.

Grafik 2.44 – Inflasi Kepri per Kelompok Pengeluaran Maret 2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2025, (diolah)

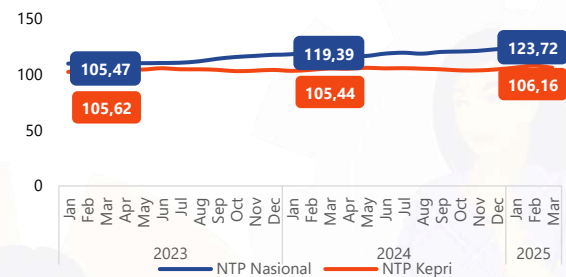
Kelompok makanan minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi terbesar bulan Maret 2025 (yoy) mencapai 0,69%. Kontribusi signifikan ini tidak lepas dari meningkatnya permintaan terhadap bahan makanan pokok, yang salah satunya didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Program MBG memicu peningkatan konsumsi komoditas seperti beras, telur, daging ayam, sayur, dan buah-buahan secara masif. Namun demikian angka inflasi 2,31 persen (yoy) pada kelompok ini masih relatif terjaga. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran tim TPID di daerah.

2.4.2.3 Analisis Dampak MBG Terhadap Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP Kepri pada bulan Maret 2025 mencapai 106,16 mengalami peningkatan 0,72 persen dibandingkan bulan Maret tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kesejahteraan relatif petani, yang turut dipengaruhi oleh naiknya harga makanan dan bahan makanan di wilayah Kepri, sejalan dengan inflasi pada kelompok tersebut. Kenaikan harga komoditas pangan ini tidak terlepas dari meningkatnya permintaan, salah

satunya akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah, yang mendorong peningkatan konsumsi bahan pangan secara masif dan berkelanjutan.

Grafik 2.45 – Perkembangan NTP di Kepri Tahun 2022 - 2024



Sumber Data: BPS, 2025 (diolah)

2.4.3 Analisis Dampak Program MBG Terhadap Perekonomian Melalui Analisis Input-Output

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak program MBG terhadap perekonomian di daerah, pendekatan menggunakan Tabel Input-Output (I-O) turut digunakan sebagai salah satu instrumen analisis. Metode ini merupakan suatu kerangka kuantitatif yang menggambarkan hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian pada periode tertentu, dan dirancang untuk menunjukkan aliran barang dan jasa antara sektor-sektor produksi serta antara sektor produksi dengan sektor pengguna akhir, termasuk rumah tangga, pemerintah, ekspor, dan investasi.

Pendekatan I-O didasarkan pada prinsip dasar bahwa output dari suatu sektor ekonomi secara simultan berfungsi sebagai input bagi sektor lainnya. Dengan demikian, metode ini memungkinkan analisis keterkaitan sektoral, baik keterkaitan ke depan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor kunci (*key sectors*) yang memiliki peran sentral dalam sistem perekonomian daerah.





Penggunaan tabel I-O memungkinkan estimasi dampak ekonomi dari perubahan permintaan akhir, baik yang bersumber dari belanja pemerintah, peningkatan konsumsi rumah tangga, ekspor, maupun investasi. Analisis ini tidak hanya mampu mengukur dampak langsung terhadap output suatu sektor, tetapi juga menjelaskan dampak tidak langsung melalui sektor lain, serta efek induksi yang muncul akibat perubahan pendapatan dan pola belanja masyarakat. Oleh karena itu, metode ini sangat relevan dalam analisis *multiplier effect*, yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal, salah satunya yaitu program MBG.

Secara matematis model analisis Input-Output dituliskan sebagai berikut:

$$X = (I - A)^{-1} Y$$

$$\Delta X = (I - A)^{-1} \Delta Y$$

Di mana:

- X = Vektor output total setiap sektor
 I = Matriks identitas
 A = Matriks koefisien input (input coefficient matrix)
 Y = Vektor permintaan akhir (termasuk konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor, dsb)
 $(I - A)^{-1}$ = Matriks invers Leontief (menunjukkan total requirement matrix)

2.4.4.1 Analisis Dampak Program MBG Terhadap Perekonomian Indonesia

Pada level nasional alokasi anggaran mencapai Rp171 triliun, berdasarkan analisis input-output tambahan permintaan akhir tersebut dapat menggerakkan perekonomian secara simultan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.16 - Hasil Analisis Input Output Dampak Program MBG Terhadap Perekonomian di Indonesia

Sektor	Tambahan Output (Rp Juta)	Tambahan Income (Rp Juta)	Tambahan Tenaga Kerja	Tambahan PDB (Rp Juta)
1	37.647.881	11.057.242	749.204	29.726.326
2	7.802.523	1.137.780	9.810	5.262.265
3	86.887.107	10.414.467	202.270	32.995.855
4	2.523.700	111.733	988	535.279
5	71.612	10.193	307	50.301
6	651.315	120.332	1.786	258.050
7	20.401.180	6.212.830	182.357	14.373.918
8	4.971.735	825.698	16.635	2.274.914
9	171.465.916	37.196.847	1.181.526	80.155.026
10	2.611.382	462.167	2.420	1.634.562
11	5.434.166	1.501.667	13.227	3.990.389
12	1.344.394	93.722	624	1.039.877
13	2.777.747	622.134	6.355	1.616.836
14	164.868	73.006	1.076	92.692
15	137.335	76.547	1.358	91.612
16	111.229	24.883	678	55.783
17	232.147	72.363	2.909	134.632
Jumlah	345.236.239	70.013.611	2.373.529	174.288.317

Sumber: BPS Kepri, 2025, (diolah)

Berdasarkan hasil simulasi menggunakan pendekatan Input-Output, belanja pemerintah sebesar Rp171 triliun yang dialokasikan pada sektor penyediaan

akomodasi serta makanan dan minuman menunjukkan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian secara agregat. Belanja tersebut mampu mendorong peningkatan





output total mencapai Rp345,23 triliun, atau hampir dua kali lipat dari nilai awal belanja yang dikeluarkan. Hal ini mencerminkan tingginya efek pengganda dari sektor ini terhadap sektor-sektor lain dalam sistem perekonomian nasional.

Peningkatan output ini terutama terjadi pada lima sektor utama, yaitu sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman sebesar Rp171,46 triliun, industri pengolahan sebesar Rp86,88 triliun, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp37,64 triliun, serta sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp20,40 triliun. Keterkaitan sektor-sektor ini menunjukkan bahwa penyediaan makan dan minum tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan kuat dengan sektor-sektor penyedia bahan baku, pengolahan, serta distribusi. Permintaan terhadap bahan makanan, produk hasil pertanian dan perikanan, serta kebutuhan akan peralatan pendukung dapur dan logistik mengalami peningkatan seiring dengan menguatnya belanja pada sektor akomodasi dan konsumsi tersebut.

Kemudian tambahan penghasilan yang diterima rumah tangga secara agregat mencapai Rp70,01 triliun. Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum menerima tambahan penghasilan tertinggi sebesar Rp37,19 triliun, diikuti sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebagai pemasok bahan MBG sebesar Rp11,05 triliun dan Industri Pengolahan sebesar 10,31 triliun.

Serapan tenaga kerja meningkat sebesar 2.373.529 pekerja di seluruh Indonesia. Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum meningkatkan serapan tenaga kerja sebesar 1.181.526 pekerja, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak 749.204 pekerja, sektor Industri Pengolahan sebanyak

202.270 pekerja, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 182.357 orang. Meskipun sektor Industri Pengolahan memiliki tambahan output yang lebih besar dibandingkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, namun tambahan tenaga kerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih besar hingga 3,7 kali lipat. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor padat karya. Di sisi lain, industri saat ini sudah banyak menggunakan bantuan teknologi dan mesin yang canggih.

Peningkatan PDB secara keseluruhan mencapai Rp174,28 triliun terhadap PDB 2020 yang sebesar 15.434 triliun, hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencapai 0,11 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum memberikan tambahan PDB sebesar Rp80,15 triliun, diikuti sektor Industri Pengolahan sebesar Rp32,99 triliun, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp29,72 triliun. Kondisi ini menunjukkan dampak besar belanja makanan bergizi gratis terhadap pertumbuhan PDB, salah satunya pada sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 17,05 persen dari total pertumbuhan PDB.

2.4.4.2 Analisis Dampak Program MBG Terhadap Perekonomian Kepri

Alokasi MBG di Kepri berdasarkan anggaran pemerintah pusat mencapai Rp475,00 miliar. Dengan menggunakan analisis input-output tambahan permintaan akhir tersebut dapat menggerakkan perekonomian agregat di Kepri sebagaimana pada tabel berikut:




Tabel 2.17 - Hasil Analisis Input Output Dampak Program MBG Terhadap Perekonomian di Indonesia

Sektor	Tambahan Output (Rp Juta)	Tambahan Income (Rp Juta)	Tambahan Tenaga Kerja	Tambahan PDB (Rp Juta)
1	44.107	16.307	246	34.375
2	1.251	406	1	889
3	37.735	18.760	42	14.621
4	6.084	930	1	2.083
5	10	6	0	7
6	66	39	0	35
7	20.847	13.594	84	13.540
8	3.054	1.713	7	1.225
9	475.785	275.622	2.285	201.523
10	793	284	2	500
11	3.305	882	9	2.726
12	1.208	270	1	900
13	1.724	966	12	897
14	60	51	0	26
15	177	115	3	122
16	13	8	0	5
17	76	58	1	43
Jumlah	596.294	330.009	2.695	273.516

Sumber: BPS Kepri, 2025, (diolah)

Berdasarkan hasil simulasi menggunakan pendekatan Input-Output, belanja pemerintah sebesar Rp475 miliar yang dialokasikan pada sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Kepri. Belanja tersebut mampu meningkatkan output total sebesar 25,33 persen menjadi Rp564,91 miliar, mencerminkan efek pengganda yang kuat dari sektor ini terhadap sektor-sektor lainnya dalam perekonomian daerah.

Peningkatan output terjadi pada lima sektor utama, yaitu sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman sebesar Rp450,74 miliar, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp41,78 miliar, industri pengolahan sebesar Rp35,74 miliar, perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp19,75 miliar, serta pengadaan listrik dan gas sebesar Rp5,76 miliar. Keterkaitan antar sektor ini menunjukkan bahwa penyediaan makan dan minum tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan erat dengan sektor penyedia bahan

baku, pengolahan, serta distribusi. Permintaan terhadap bahan makanan, produk hasil pertanian dan perikanan, peralatan dapur, bahan olahan, dan jasa transportasi meningkat seiring dengan penguatan belanja di sektor penyediaan konsumsi tersebut.

Kemudian tambahan penghasilan yang diterima oleh rumah tangga secara keseluruhan mencapai Rp312,64 miliar. Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum memperoleh tambahan penghasilan tertinggi sebesar Rp261,11 miliar, diikuti oleh Industri Pengolahan dengan tambahan penghasilan sebesar Rp17,77 miliar. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebagai pemasok utama bahan makanan, minuman, dan gastronomi (MBG), menerima tambahan penghasilan sebesar Rp15,04 miliar.

Serapan tenaga kerja di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebanyak 2.553 pekerja. Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum menjadi penyumbang terbesar dengan peningkatan serapan tenaga kerja sebesar 2.164 pekerja, diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak





233 pekerja. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyerap tambahan 79 pekerja, sementara sektor Industri Pengolahan meningkat sebanyak 40 pekerja. Industri pengolahan mengalami penambahan pekerja yang relatif lebih sedikit dikarenakan industri saat ini telah banyak menggunakan teknologi dan mesin yang canggih.

Peningkatan PDRB secara keseluruhan mencapai Rp259,12 miliar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,10 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum memberikan kontribusi tambahan PDRB terbesar, yaitu sebesar Rp190,91 miliar, diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp32,56 miliar.

Relatif rendahnya peningkatan output dan PDRB di Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang hampir dua kali lipat, sangat dipengaruhi oleh karakteristik geografis Kepri kepulauan. Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dan bahan baku utama dari luar daerah mengakibatkan sebagian besar input produksi berasal dari wilayah lain di Indonesia. Dengan kata lain, sektor makanan dan minuman di Kepri menggunakan input yang sebagian besar dihasilkan di daerah lain, sehingga kontribusi langsung peningkatan output dan PDRB daerah menjadi relatif terbatas.

Meskipun demikian, input yang digunakan Kepri tetap merupakan bagian integral dari PDB nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara agregat. Ketergantungan pada pasokan pangan luar daerah ini, sekaligus menunjukkan tantangan dalam penguatan ketahanan pangan di Kepri. Isu ketahanan pangan tersebut telah diidentifikasi dan dibahas secara komprehensif dalam KFR Tahunan 2024 Kanwil DJPb Kepri.

2.4.4.3 Kesimpulan

1. Implementasi MBG di Kepri tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anak sekolah, tetapi juga dapat dioptimalkan sebagai alat pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pada level nasional program MBG memberikan dampak dalam mengembangkan ekonomi Kepri, meliputi 1) Peningkatan Output pada 17 sektor ekonomi sebesar Rp345,23 triliun (201,34 persen dari alokasi program MBG); 2) Peningkatan Income rumah tangga pada seluruh sektor ekonomi sebesar Rp70,01 triliun; 3) Penyerapan tenaga kerja pada seluruh sektor mencapai 2.533 orang dan meningkatkan PDB pada seluruh sektor mencapai Rp174,29 triliun.
3. Program MBG di Kepri memberikan dampak dalam mengembangkan ekonomi, meliputi 1) Peningkatan Output pada 17 sektor ekonomi sebesar Rp564 miliar (25,33 persen dari alokasi program MBG); 2) Peningkatan Income rumah tangga pada seluruh sektor ekonomi sebesar Rp312 miliar; 3) Penyerapan tenaga kerja pada seluruh sektor mencapai 2.533 orang dan meningkatkan PDB pada seluruh sektor mencapai Rp259,12 miliar.
4. Relatif rendahnya peningkatan output dan PDRB di Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional dipengaruhi oleh karakteristik geografis Kepri kepulauan. Kepri masih cukup mengandalkan input pasokan pangan dari luar daerah. Namun demikian, input tersebut merupakan bagian integral dari PDB nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara agregat

2.4.4.4 Rekomendasi

1. Badan Gizi Nasional sebagai instansi pelaksana program diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran. Perencanaan dan





pelaksanaan anggaran di tingkat regional perlu memperhatikan karakteristik geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari wilayah kepulauan, sehingga distribusi logistik makanan bergizi dapat dilakukan secara merata ke seluruh kabupaten/kota, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

2. Dinas Pertanian dan instansi terkait di Provinsi Kepulauan Riau didorong untuk meningkatkan produksi pangan lokal, terutama komoditas yang menjadi komponen utama dalam menu MBG. Strategi ini meliputi peningkatan kapasitas petani lokal, dukungan teknologi pertanian, serta pembukaan akses pasar bagi hasil produksi lokal agar dapat diserap oleh program MBG dan konsumsi masyarakat secara luas.
3. TPID Provinsi Kepulauan Riau beserta TPID kabupaten/kota perlu mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas harga pangan dengan memperkuat koordinasi antarlembaga, monitoring pasokan dan distribusi pangan, serta menyusun langkah antisipatif terhadap potensi inflasi akibat lonjakan permintaan pangan dari pelaksanaan program MBG. Dukungan data dan pemetaan rantai pasok pangan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan di daerah.

2.4.4 Isu Strategis Pelaksanaan MBG di Kepri

1. Proses penyaluran Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kepri telah berjalan pada seluruh kabupaten/kota tanpa adanya anomali/hambatan yang signifikan dalam pelaksanaannya, namun perlu ada percepatan penyaluran program MBG pada Kabupaten Bintan yang sampai dengan Minggu ke-II Mei 2025 hanya memiliki realisasi 9% dari target 2025. Begitu juga dengan Kab. Karimun dan Batam dengan realisasi masing-masing 27% dan 29% dari target 2025.
2. Provinsi Kepri sebagai wilayah kepulauan yang terdiri atas 2.408 pulau memiliki tantangan tersendiri dalam upaya

pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap pangan bergizi dan ketimpangan akses antarwilayah serta keterbatasan infrastruktur distribusi. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam meningkatkan infrastruktur dan akses distribusi dalam penyaluran MBG.

3. Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) ahli gizi, terutama di wilayah kepulauan yang tersebar di desa dan kelurahan. Oleh karena itu, ahli gizi pada sebagian SPPG direkrut dari luar wilayah Kepri untuk memenuhi kuota, walaupun sebenarnya sangat diharapkan dari SDM asli Kepri.
4. Pengaruh efek multiplier Program MBG di Provinsi Kepri lebih kecil dari pengaruh multiplier pada Program MBG nasional, artinya tambahan aktivitas ekonomi (input MBG Kepri) di sektor Penyediaan Akomodasi Makanan Minuman di Kepri memiliki keterkaitan (linkage) yang lebih kecil terhadap sektor ekonomi lainnya di Kepri dibandingkan pengaruh aktivitas ekonomi (input MBG Nasional) terhadap sektor ekonomi lainnya secara nasional. Salah satu penyebab utama merupakan tingginya produk dan jasa diimpor dari luar (misal Singapura, Malaysia ataupun provinsi lain). Hal Ini mengurangi multiplier lokal karena sebagian besar ssinput bukan berasal dari ekonomi Kepri sendiri, melainkan banyak bahan baku atau jasa harus diimpor dari luar daerah.



Comparative Study Cross Countries - Program Makan Bergizi Gratis Mancanegara

Beberapa negara telah lebih dahulu melaksanakan program makan gratis di sekolah dengan model dan pendekatan yang berbeda-beda. Studi perbandingan berikut dapat menjadi rujukan dalam merancang implementasi MBG yang adaptif terhadap kondisi lokal:

1. India

Program makan gizi gratis di India dilatarbelakangi oleh kekurangan gizi pada anak sekolah yang mencapai 40% populasi anak sekolah pada tahun 1995, program tersebut dikenal dengan *Mid-Day Meal* (MDM) dengan cakupan 125 juta siswa sekolah negeri dengan biaya \$2,8 miliar atau sekitar Rp44,8 Triliun. Studi *World Food Program* menyatakan bahwa setiap \$1 pada program MDM akan memberikan dampak ekonomi sebesar \$9. Pembagian pendanaan program MDM diatur Undang-Undang Ketahanan Pangan dengan skema pembagian pembiayaan antara pemerintah pusat dan negara bagian masing-masing sebesar 60% dan 40% secara berurutan (MD Asraul Hoque, 2024).

Dampak bidang pendidikan dari program MDM di India:

- Meningkatkan kehadiran sekolah.
- Peningkatan kesehatan dan kehadiran siswa.
- Dampak jangka panjang pada keturunan/generasi penerus dari orang tua yang mendapatkan program MDM.
- Perbaikan tingkat stunting dan melek huruf

Dampak ekonomi dari program MDM di India:

- Peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan regulasi wajib menyediakan makanan MDM dari bahan pangan lokal, hal ini mendorong iklim usaha di India dari importir susu menjadi eksportir susu.
- Peningkatan lapangan pekerjaan bidang makanan.

2. Nigeria

Program makan gizi gratis di Nigeria bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas belajar anak sekolah, program tersebut disebut National Home Grown School Feeding (NHGSFP) melalui penyediaan makan bergizi di sekolah (377.000 dapur). Program NHGSFP dilatarbelakangi oleh kurangnya gizi bagi anak sekolah, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan registrasi sekolah (Elda N et al, 2022). Penerima cakupan Program NHGSFP pada tahun 2021 mencapai 9,8 juta siswa SD, kemudian ditingkatkan pada tahun 2025 menjadi 20 juta siswa (GCNF Global Survei, 2021).

Dampak bidang pendidikan dari program NHGSFP di Nigeria:

- Peningkatan kehadiran sekolah terutama bagi siswa yang kurang mampu, program ini mendorong siswa untuk datang ke sekolah atas dasar sukarela untuk belajar.
- Perbaikan nutrisi siswa sekolah dengan menurunkan masalah kekurangan gizi anak dan stunting.
- Peningkatan kinerja akademis dengan mengurangi angka putus sekolah.

Dampak ekonomi dari program NHGSFP di Nigeria:

- Peningkatan pendapatan petani lokal.
- Pembangunan ekonomi lokal melalui pembelian pangan dari petani lokal.
- Pembukaan lapangan kerja di sektor makanan mencapai lebih dari 100.000 tenaga kerja.
- Dengan asumsi multiplier ekonomi 1,5 kali, program NHGSFP dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3% (Jacob & Musa, 2021).



- e. Meningkatkan kesejahteraan keluarga karena mengurangi beban untuk memberi makan siang anak di sekolah.

3. Brazil

Pemerintah Brazil menginisiasi makan bergizi gratis yang diawali pada tahun 1955 dengan nama The School Meal Campaign, program ini dirancang untuk menyediakan makanan sehat disekolah. pada tahun 1977 program ini berubah nama menjadi Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE), program ini menyediakan makanan gratis lebih dari 160.000 sekolah dengan menu bergizi seimbang dengan budget R\$1,5 (Rp4.400 per kapita) sehingga secara total mencapai R\$ 4 miliar (Rp11 triliun) (Silva et.al, 2022).

Dampak bidang pendidikan dari Program PNAE di Brazil:

- a. Pengembangan nutrisi yang seimbang sesuai standar gizi bagi siswa sekolah.
- b. Pembentukan mindset siswa dan orang tua dalam mengatur pola makan yang bergizi.
- c. Peningkatan mutu sekolah akibat dari peningkatan konsentrasi siswa disekolah.

Dampak ekonomi dari Program PNAE di Brazil:

- a. Meningkatkan pendapatan petani karena mewajibkan penggunaan dari pangan petani lokal.
- b. Pembukaan lapangan kerja di sektor makanan seperti juru masak, tenaga pengelola dapur dan karyawan pelaku UMKM yang terlibat.
- c. Dampak multiplier ekonomi dari Program PNAE dapat meningkatkan ekonomi sebesar 3% (Susan Gracia & Sophian, 2024).

4. Finlandia

Finlandia merupakan salah satu negara yang dinobatkan sebagai negara dengan tingkat pendidikan terbaik di dunia. Setelah Perang Dunia II, Finlandia menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Salah satu langkah untuk mengatasi ketimpangan ini adalah dengan menyediakan makanan bergizi bagi semua siswa, tanpa memandang status ekonomi keluarga. Kebijakan makanan sekolah gratis di Finlandia diperkenalkan pada tahun 1948 dengan tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa semua anak, terutama yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah, tidak akan kesulitan dalam memperoleh makanan bergizi yang mendukung perkembangan fisik dan intelektual siswa.

Dampak bidang pendidikan dari Program Makan Bergizi Gratis di Finlandia:

- a. Peningkatan Konsentrasi dan fokus siswa pada kegiatan belajar mengajar.
- b. Para siswa memiliki kesehatan yang lebih baik dengan asupan makanan siang bergizi, hal ini meningkatkan tingkat kehadiran siswa.
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendukung inklusi sosial dengan menghilangkan stigma terkait dengan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Semua siswa diperlakukan sama, tanpa membedakan status ekonomi.
- d. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa nutrisi yang baik dapat berhubungan langsung dengan prestasi akademik siswa.
- e. Peningkatan kualitas tenaga kerja di masa depan.

Dampak ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis di Finlandia:

- a. Pengurangan beban ekonomi pada keluarga, khususnya keluarga berpendapatan rendah.
- b. Pengurangan biaya kesehatan jangka panjang. siswa yang mendapat nutrisi yang tepat akan lebih sehat, mengurangi kemungkinan untuk terkena penyakit terkait malnutrisi.
- c. Investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.



- d. Peningkatan pada sektor industri makanan dan jasa catering lokal yang terlibat dalam penyediaan makan gratis

5. Jepang

Program Kyushoku merupakan sistem makan siang sekolah yang sangat terorganisir dan berperan besar dalam pola makan anak sekolah di Jepang. Kyushoku merupakan program untuk mengatasi masalah gizi pada anak-anak yang disebabkan oleh kemiskinan dan kurangnya akses ke makanan bergizi. Program makan siang sekolah (Kyushoku) dimulai pada tahun 1889 dengan anggaran 1 triliun yen (Rp105 triliun), bukan hanya soal penyediaan makan siang, tetapi juga pendidikan mengenai gizi, kebersihan, dan kerja sama. Tujuan utama dari Kyushoku adalah memastikan bahwa anak-anak sekolah dasar dan menengah, serta anak ekonomi kurang mampu mendapatkan makanan yang bergizi. Mayoritas penyediaan makanan disekolah disediakan secara gratis oleh pemerintah lokal, walaupun masih terdapat penyediaan makan siang sekolah yang berbayar dengan biaya rendah setelah disubsidi.

Dampak bidang pendidikan dari Program Makan Bergizi Gratis di Jepang:

- a. Meningkatkan konsentrasi anak sekolah yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan akibat dari hilangnya gangguan rasa lapar pada saat berlangsung kegiatan belajar di sekolah.
- b. Meningkatkan partisipasi kehadiran di sekolah, karena siswa tidak perlu lagi memikirkan makan siang.
- c. Meningkatkan kesadaran tentang makanan bergizi sehat bagi perkembangan anak.

Dampak ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis di Jepang:

- a. Mengurangi ketimpangan sosial akibat dari memberikan makanan bergizi untuk semua siswa sekolah dasar dan menengah tanpa melihat latar belakang ekonomi sehingga tidak ada perbedaan status sosial antar siswa.
- b. Mengembangkan ekonomi lokal karena pasokan bahan makanan berasal dari petani lokal.
- c. Menyerap tenaga kerja bidang penyediaan bahan makanan.

6. Amerika Serikat (USA)

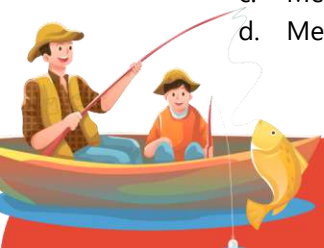
Program Pemerintah Amerika Serikat yang menyediakan makanan bergizi di sekolah umum dan swasta, khususnya untuk siswa-siswa dari keluarga berpenghasilan rendah disebut National School Lunch Program (NSLP) diawali pada tahun 1946 setelah Perang Dunia II. Tujuan Program NSLP adalah memastikan bahwa semua anak kurang mampu di sekolah memiliki akses makanan sehat dan bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Program ini dikelola oleh Food and Nutrition Service (FNS) di bawah Departemen Pertanian AS (USDA) dengan anggaran USRp 25 miliar.

Dampak bidang pendidikan dari Program Makan Bergizi Gratis di USA:

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
- b. Edukasi makan bergizi kepada orang tua dan siswa sekolah.
- c. Mendorong kebiasaan pola makanan bergizi sehat bagi perkembangan anak.
- d. Menginisiasi pelaksanaan kegiatan menanam kebun sekolah tentang sumber pangan berkelanjutan.

Dampak ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis di USA:

- a. Meningkatkan kesehatan anak sekolah dengan memastikan kecukupan gizi.
- b. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar siswa di sekolah.
- c. Mengembangkan industri pertanian lokal karena pasokan pangan berasal dari petani lokal.
- d. Menyerap tenaga kerja bidang penyediaan bahan makanan.



BAB III

Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat dalam memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial.

ANALISIS TEMATIK: PERAN DAN STRATEGI PENGEMBANG AN KOPERASI DI DAERAH





Pasar Bintan Center, Kota Tanjungpinang

- Pendahuluan
- Perkembangan Kondisi Koperasi di Kepri
- Dukungan Pemerintah terhadap Koperasi
- Tantangan Pengembangan Koperasi
- Strategi Pengembangan Koperasi
- Potensi Pengembangan Koperasi



BAB III – Analisis Tematik

3.1 Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk rakyat. Di Indonesia, koperasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah. Keberadaan koperasi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara kolektif dan memberdayakan potensi lokal. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat dalam memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan globalisasi, koperasi dihadapkan pada dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Tantangan tersebut mencakup perubahan pola konsumsi masyarakat, persaingan dengan pelaku usaha besar, serta transformasi digital yang menuntut koperasi untuk lebih adaptif dan inovatif. Sayangnya, masih banyak koperasi daerah yang belum mampu mengimbangi perkembangan ini. Permasalahan seperti manajemen yang kurang profesional, rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan akses terhadap modal dan informasi, serta kurangnya pemanfaatan teknologi menjadi kendala utama dalam pengembangan koperasi.

Selain itu, koperasi di daerah juga menghadapi tantangan dalam menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan daya saing koperasi serta memperluas jaringan usaha. Dalam konteks ini, penting untuk merancang strategi pengembangan koperasi yang tidak hanya berfokus pada penguatan internal, tetapi juga memperhatikan dinamika eksternal yang memengaruhi keberlangsungan usaha koperasi.

3.2 Perkembangan Kondisi Koperasi di Kepri

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan mendukung pemerataan pembangunan di daerah. Secara umum, koperasi juga dikenal sebagai unit usaha ditengah masyarakat yang secara efektif dapat meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan sekaligus dapat berkontribusi terhadap percepatan perekonomian, sosial, dan budaya di suatu wilayah.

Kepri merupakan provinsi Kepulauan yang terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota, dengan 73 kecamatan, 275 desa, dan 144 kelurahan. Dengan keunikan dan letak geografis yang strategis, Kepri memiliki berbagai potensi alam dan sektor ekonomi lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Melihat potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki Kepri, penting untuk memahami bagaimana perkembangan koperasi di Kepri dalam beberapa tahun terakhir. Maka dari itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai perkembangan koperasi di Kepri. Fokus utama pembahasan mencakup perkembangan jumlah koperasi yang aktif, jumlah anggota koperasi, serta nilai aset yang dikelola koperasi di Kepri selama periode 2021 hingga 2023. Data ini memberikan gambaran awal mengenai sejauh mana koperasi berperan dalam menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memahami tren perkembangan koperasi di Kepri, berikut terdapat grafik yang menunjukkan perkembangan koperasi dari tahun 2019-2023 dari sisi **jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, nilai aset koperasi, dan volume usaha koperasi di Kepri.**

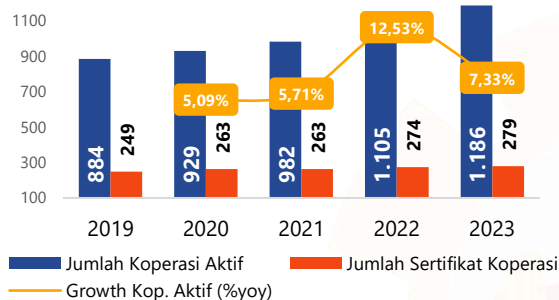




3.2.1 Jumlah Koperasi di Kepri

Perkembangan koperasi di Kepri menunjukkan tren yang positif. Pengembangan koperasi di Kepri ditujukan untuk mengatasi keterbatasan modal, rantai distribusi yang panjang, serta mengurangi biaya besar dari para tengkulak yang menekan harga hasil panen petani.

Grafik 3.1 – Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi yang Memiliki Sertifikat di Kepri Tahun 2019-2023



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2025 (diolah)

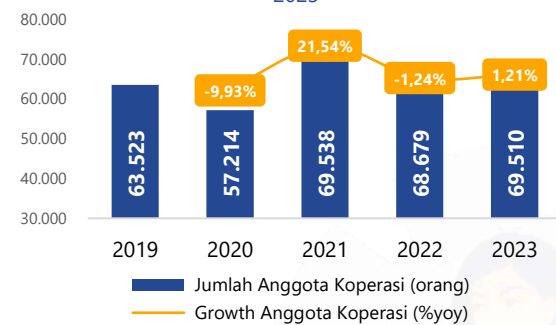
Berdasarkan tren yang ada, pertumbuhan koperasi secara signifikan terjadi pada tahun 2022. Hal tersebut didorong oleh kebijakan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap koperasi, serta mulai hadirnya program stimulus ekonomi masyarakat dari pemerintah pusat dan daerah.

Dari total koperasi yang aktif di Kepri, terlihat bahwa mayoritas koperasi belum memenuhi syarat administratif/legal untuk memperoleh sertifikat koperasi. Kondisi ini mengindikasikan minimnya pemahaman pengurus koperasi mengenai proses sertifikasi. Lemahnya pembinaan dan pendampingan dari dinas terkait juga menjadi pengaruh dari banyaknya koperasi yang belum memiliki sertifikat.

3.2.2 Jumlah Anggota Koperasi di Kepri

Jumlah anggota koperasi Kepri menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2019–2023. Setelah turun tajam sebesar 9,93 persen (yoy) pada 2020 akibat dampak pandemi, jumlah anggota koperasi melonjak 21,54 persen pada 2021 (yoy) sebagai bentuk pemulihan.

Grafik 3.2 – Jumlah Anggota Koperasi di Kepri Tahun 2019-2023



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2025 (diolah)

Pada tahun 2022, jumlah anggota koperasi turun 1,24 persen (yoy) dan perlahan kembali tumbuh 1,21 persen (yoy) di tahun 2023. Data ini mencerminkan bahwa meskipun koperasi terus berkembang, peningkatan partisipasi anggota masih belum stabil dan memerlukan strategi yang lebih efektif.

Terdapat beberapa tantangan mengapa jumlah anggota koperasi di Kepri belum berkembang pesat. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi, terbatasnya akses teknologi dan pemasaran, serta keterbatasan SDM dalam mengelola dan mengembangkan koperasi yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

3.2.3 Nilai Aset Koperasi di Kepri

Nilai aset dari sebuah koperasi merupakan jumlah seluruh kekayaan dari koperasi, baik dalam bentuk aset lancar maupun tidak lancar yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan usaha koperasi. Secara umum, nilai tersebut mencakup: 1) kas dan setara kas; 2) piutang usaha; 3) persediaan; 4) aset tetap seperti gedung, kendaraan, atau peralatan, dan 5) investasi dan aset lainnya.

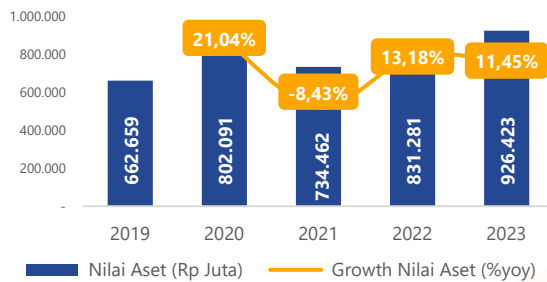
Akumulasi dari aset yang dimiliki koperasi juga menggambarkan skala ekonomi dan kekuatan finansial koperasi. Semakin besar aset, maka semakin besar pula





kapasitas koperasi untuk berkembang dan melayani kebutuhan anggotanya.

Grafik 3.3 – Nilai Aset Koperasi di Kepri Tahun 2021-2023
(dalam Juta Rupiah)



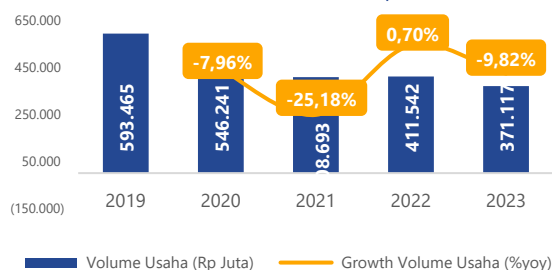
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik 3.3, nilai aset koperasi di Kepri selama periode 2019-2023 mengalami tren yang positif. Meskipun sempat menurun pada 2021, nilai aset koperasi di Kepri secara keseluruhan mengalami peningkatan stabil. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan tata kelola dan pemulihan ekonomi koperasi pasca pandemi, namun tetap perlu penguatan sistem manajemen aset agar pertumbuhan dapat dipertahankan secara konsisten.

3.2.4 Volume Usaha Koperasi di Kepri

Volume usaha koperasi adalah total dari seluruh nilai transaksi usaha atau penjualan yang dilakukan oleh koperasi dalam satu tahun buku. Volume usaha mencerminkan skala aktivitas ekonomi koperasi. Semakin besar volumenya, semakin besar pula peran koperasi dalam perputaran ekonomi anggotanya dan wilayah setempat. Namun, volume usaha belum tentu menunjukkan keuntungan, karena belum dikurangi dengan biaya operasional.

Grafik 3.4 – Jumlah Volume Usaha Koperasi di Kepri Tahun 2019-2023
(dalam Juta Rupiah)



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik 3.4, terlihat bahwa tren volume usaha koperasi di Kepri pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Penurunan volume usaha koperasi yang cukup dalam pada tahun 2021 sebesar 25,18 persen (yoy) dipengaruhi oleh tekanan pandemi COVID-19 yang signifikan memengaruhi kegiatan koperasi di Kepri.

Sempat mengalami pertumbuhan 0,70 persen (yoy) di tahun 2022, volume usaha koperasi di Kepri kembali berkontraksi 9,82 persen pada tahun 2023. Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan stagnasi volume usaha koperasi di Kepri adalah akibat minimnya kegiatan usaha yang dikelola atau hanya dibidang simpan pinjam serta manajemen koperasi masih sederhana.

Kemudian, faktor lain seperti perubahan perilaku konsumen yang sudah beradaptasi dengan disrupsi digital serta dinamika perekonomian global maupun nasional juga memengaruhi volume usaha koperasi Kepri yang belum optimal. Kondisi ini menuntut koperasi di Kepri untuk segera beradaptasi dengan strategi digital dan model bisnis baru agar tetap relevan dan kompetitif.

3.2.5 Perkembangan Koperasi di Kepri Berdasarkan Wilayah

Pada triwulan I 2025 Kanwil DJPb prov. Kepri telah melaksanakan FGD tentang perkembangan koperasi di Kepri bersama pemda lingkup Kepri untuk mengetahui perkembangan jumlah koperasi, gambaran umum, dan tantangan kegiatan koperasi baik di desa maupun di kelurahan yang ada di Kepri.

Unit usaha koperasi dapat mencakup berbagai bidang sesuai dengan penugasan dan kebutuhan usaha. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi antar lain adalah: 1) Kantor koperasi; 2) Pengadaan sembako; 3) Simpan pinjam; 4) Klinik desa/kelurahan; 5) Apotek desa/kelurahan; 6) Cold storage/peredagangan; 7) Logistik





desa/kelurahan; dan 8) Lain-lain sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan anggota. Melalui kegiatan tersebut, diperoleh koperasi yang tersebar di 275 desa dan 144 kelurahan di Kepri:

Tabel 3.1 - Jumlah Koperasi di Lingkup Provinsi Kepri (hingga tahun 2024)

Wilayah	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif
Kota Tanjungpinang	196	72	124
Kota Batam	1.021	262	759
Kab Bintan	181	181	N/A
Kab Karimun	135	135	N/A
Kab. Lingga	189	38	151
Kab. Natuna	175	42	133
Kab. Kep. Anambas	80	11	69
Jumlah	1.977	741	1.236

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM/Tenaga Kerja, Usaha Mikro/Perindustrian & Perdagangan/ESDM dan Dinas PMD/Dukcapil Lingkup Kepri, 2025 (diolah)

Berdasarkan pendataan koperasi kepada pemda lingkup Kepri pada triwulan I 2025, terdapat 1.977 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kepri. Dari jumlah tersebut, hanya 741 koperasi atau sekitar 37,5% yang masih berstatus aktif. Sementara itu, 1.236 koperasi atau sekitar 62,5% tercatat sebagai tidak aktif. Ini menunjukkan bahwa mayoritas koperasi di wilayah ini menghadapi tantangan dalam keberlangsungan operasionalnya.

Tingkat koperasi tidak aktif cukup tinggi di hampir seluruh wilayah. Kota Batam memiliki jumlah koperasi tidak aktif yang paling signifikan sebanyak 759 koperasi. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah koperasi cukup besar di wilayah-wilayah tersebut, banyak di antaranya tidak menjalankan aktivitas operasional. Selanjutnya, belum ditemukan jumlah koperasi yang tidak aktif pada Kab. Bintan dan Kab. Karimun.

Walaupun jumlah koperasi di Kepri yang terus bertumbuh, tantangan terkait keberlanjutan dan kualitas operasional koperasi di Kepri masih memerlukan

perhatian khusus dari pemerintah. Maka dari itu, diperlukan sinergi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat mendorong perkembangan koperasi di Kepri agar dapat menjadi pilar pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.

3.3 Dukungan Pemerintah Untuk Pengembangan Koperasi

3.3.1 Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Koperasi

Pemerintah pusat dan daerah terus berkomitmen mendukung pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi, perlindungan terhadap koperasi, pemberian bantuan permodalan, serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengawasan.

Pemerintah Daerah Kepri melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, telah menetapkan sejumlah program strategis untuk mendukung pengembangan koperasi. Program-program tersebut di antaranya sebagai berikut:

3.3.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendorong kinerja kelembagaan koperasi. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman anggota dan pengelola koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi, tata kelola usaha, serta aspek manajerial dan keuangan.

Program pendidikan dan pelatihan dirancang secara terstruktur dan berjenjang, meliputi pelatihan dasar bagi anggota baru, pelatihan manajerial untuk pengurus, serta pelatihan teknis khusus seperti akuntansi koperasi, manajemen risiko, dan digitalisasi koperasi. Sinergi dengan perguruan tinggi,





lembaga pelatihan, serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) koperasi juga menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas pelatihan yang diberikan.

3.3.1.2 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pemberdayaan koperasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui fasilitasi permodalan, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran melalui program bantuan sarana dan prasarana produksi, penyediaan modal bergulir, serta insentif usaha bagi koperasi yang aktif dan berprestasi.

Di sisi lain, perlindungan koperasi perlu difokuskan pada upaya menciptakan kepastian hukum, keamanan aset koperasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif. Regulasi daerah dan kebijakan fiskal dapat diselaraskan untuk menciptakan ekosistem usaha koperasi yang berkelanjutan.

3.3.1.3 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) merupakan instrumen penting untuk menjamin stabilitas sistem keuangan mikro di daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem evaluasi berbasis indikator keuangan dan non-keuangan seperti likuiditas, kualitas portofolio pinjaman, struktur permodalan, dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian.

Penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis digital perlu didorong untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penilaian. Selain itu, audit internal dan eksternal koperasi perlu dilakukan secara berkala, disertai dengan penguatan kapasitas auditor koperasi di daerah.

3.3.1.4 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

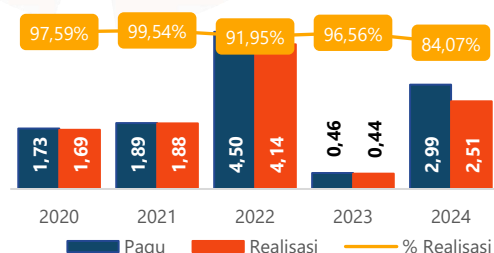
Pengawasan dan pemeriksaan koperasi berfungsi sebagai mekanisme preventif dan korektif dalam menjaga tata kelola koperasi. Pemerintah daerah dapat menerapkan pendekatan risk-based supervision (pengawasan berbasis risiko) untuk menentukan prioritas pemeriksaan terhadap koperasi yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.

Penguatan kelembagaan pengawasan melalui penyediaan tenaga pengawas koperasi yang kompeten, dukungan sistem pelaporan terintegrasi, serta regulasi yang adaptif terhadap dinamika koperasi menjadi langkah strategis yang perlu diutamakan. Pemeriksaan koperasi juga harus ditindaklanjuti dengan rekomendasi yang jelas dan dapat diukur tingkat implementasinya.

3.3.2 Perkembangan Dukungan Belanja K/L Untuk Pengembangan Koperasi

Belanja K/L untuk pengembangan koperasi di Kepri dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) yang sekarang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Dekon/TP melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam. Secara lebih rinci Pagu dan realisasi anggaran belanja Kemenkop UKM di Kepri sepanjang tahun 2020 s.d. 2024 sebagaimana terdapat dalam grafik

Grafik 3.5 – Anggaran Belanja Kemenkop UKM di Kepri (dalam Miliar Rupiah)



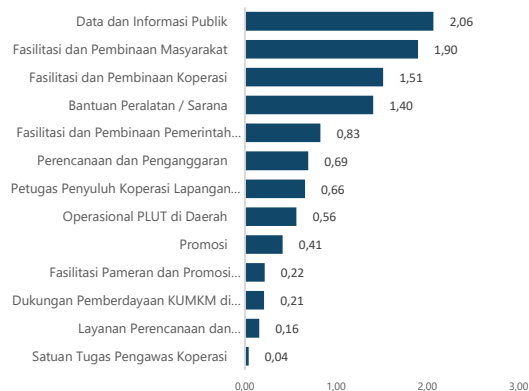
sumber: Sintesa, 2025 (diolah)





Pagu anggaran belanja Kemenko UKM di Kepri pada tahun 2024 mencapai Rp2,99 miliar. Namun demikian realisasinya hanya sebesar Rp2,51 miliar (84,07 persen dari Pagu). Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh realisasi untuk output perencanaan dan penganggaran yang hanya mencapai 45,87 persen dari Pagu. Menariknya pada tahun 2023 anggaran Kemenko UKM di Kepri terbilang sangat kecil hanya Rp0,46 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh anggaran untuk fasilitasi dan pembinaan Koperasi yang sangat kecil hanya Rp8,00 juta.

Grafik 3.6 – Output Belanja Kemenko UKM di Kepri tahun 2020 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)



sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

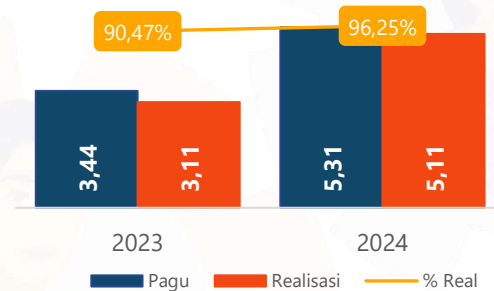
Anggaran Kemenko UKM di Kepri menunjukkan tren fluktuatif dengan sebaran output yang cukup beragam setiap tahunnya. Output dengan anggaran terbesar selama periode 2020 s.d. 2024, yaitu Data dan Informasi Publik Rp2,06 miliar, kemudian fasilitasi dan pembinaan masyarakat Rp1,90 miliar, fasilitasi dan pembinaan koperasi Rp1,51 miliar, dan bantuan peralatan/sarana mencapai 1,40 miliar. Semua output tersebut dilaksanakan dalam rangka pengembangan iklim usaha koperasi dan UMKM di Kepri.

3.3.3 Perkembangan Dukungan Belanja TKD Untuk Pengembangan Koperasi

Pemerintah pusat turut mendukung pengembangan koperasi melalui anggaran TKD DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil. Anggaran ini terbesar pada beberapa pemerintah daerah daerah seperti Kabupaten Bintan, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna, dan Pemprov Kepri. Besaran alokasi dana TKD tersebut sebagaimana terdapat pada grafik 3.7 berikut:

Grafik 3.7 – Perkembangan Realisasi TKD DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (dalam miliar Rupiah)



sumber: Omspan TKD, 2025 (diolah)

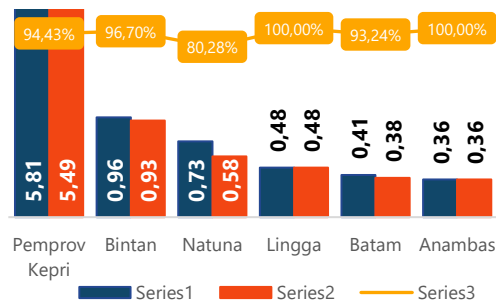
Anggaran TKD tahun 2024 untuk pengembangan koperasi mencapai Rp5,11 miliar mengalami pertumbuhan 35,28 persen (yoy). Sejalan dengan itu, realisasinya dana TKD ini mencapai 96,25 persen dari Pagu meningkat apabila dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 90,47 persen dari Pagu. Kondisi ini menunjukkan pemerintah pusat dan daerah yang semakin serius dan fokus dalam pengembangan koperasi dan UMKM di daerah.

Daerah dengan realisasi dana DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil tertinggi pada tahun 2024 terdapat pada Pemprov Kepri dengan realisasi mencapai Rp5,49 miliar (94,43 persen dari Pagu), kemudian berturut-turut diikuti oleh Bintan Rp0,93 miliar (96,70 persen dari Pagu), dan Natuna 0,58 miliar (80,28 persen dari Pagu). Secara lebih rinci realisasi dana TKD tersebut sebagaimana terdapat pada grafik 3.8.





Grafik 3.8 – Pagu dan Realisasi TKD DAK Non Fisik
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil per
Pemda (dalam miliar Rupiah)

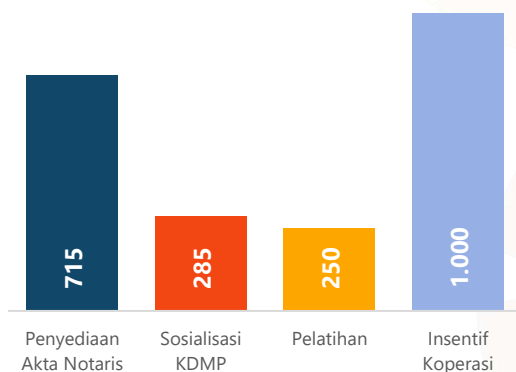


sumber: Omspan TKD, 2025 (diolah)

3.3.4 Perkembangan Dukungan Belanja APBD

Perkembangan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Kepulauan Riau dimulai dengan diselenggarakannya Rakorda Percepatan Pembentukan Koperasi tanggal 8 Mei 2025, yang menghasilkan kesepakatan Pemerintah Provinsi Kepri dalam dukungan anggaran sebagai berikut:

Grafik 3.9 - Alokasi Anggaran APBD Kepri dalam
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Rp Juta Rupiah)



sumber: Dinas Koperasi UKM Kepri, 2025 (diolah)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengupayakan percepatan pendirian KDMP, melalui alokasi anggaran awal Rp2,25 miliar yang dipergunakan antara lain, 1) Penyediaan Biaya Akta Notaris Rp715 juta; 2) Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih 285 juta; 3) Pelatihan dan Sertifikasi calon manajer koperasi Rp250 juta; dan 4) Insentif bagi koperasi unggul dan potensial 1 miliar (untuk 5 koperasi).

Pelaksanaan kegiatan dukungan APBD dalam pengembangan koperasi pada masing-masing komponen anggaran meliputi:

1. Penyediaan biaya akta untuk memastikan koperasi memiliki legalitas hukum sesuai UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Mempermudah akses koperasi terhadap pembiayaan perbankan dan dukungan formal lainnya.
2. Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan manfaat koperasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pendirian dan pengelolaan koperasi.
3. Pelatihan dan Sertifikasi calon manajer dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam tata kelola koperasi dan mampu meningkatkan profesionalisme manajemen koperasi.
4. Insentif Koperasi merupakan program Pemprov dalam memotivasi dan memberikan penghargaan bagi koperasi yang aktif dan produktif serta mendorong replikasi praktik baik koperasi ke desa lain.

3.3.5 Dukungan Pemerintah Lainnya

Pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan terus menjadi fokus pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sebagai provinsi kepulauan dengan potensi besar di sektor kelautan, pertanian, perdagangan, dan pariwisata, koperasi dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan. Berbagai bentuk dukungan telah diberikan pemerintah sebagai berikut:

1. **Dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dalam Pilot Project Desa Cantik (Cinta Statistik) di Kepri**
Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) merupakan inisiatif BPS untuk membangun kapasitas desa dalam hal pengelolaan data statistik sektoral. Tujuan utamanya agar pemma mampu mengidentifikasi potensi





lokal berbasis data, mengelola sumber daya secara efektif dan merancang program pembangunan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

2. Dukungan Kemenparekraf dalam Eskalasi Sumber Daya Manusia

Strategi utama Kemenparekraf adalah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan kewirausahaan, terutama bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi yang bergerak di sektor pariwisata. Hal ini ditujukan untuk membentuk masyarakat dalam menjadi aktor utama dalam tata kelola destinasi wisata. Dukungan ini sangat relevan dengan karakteristik Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki keunggulan komparatif di bidang pariwisata bahari dan budaya lokal

3. Dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap Koperasi Nelayan dan Perikanan

Program Pelatihan pengolahan hasil laut dan penguatan koperasi nelayan untuk ekspor (fillet ikan, ikan asin, terasi dan bantuan sarana tangkap & pengolahan melalui program Kampung Nelayan Maju.

4. Kementerian Koperasi dan UKM dalam Program Inkubasi Bisnis Koperasi (INKOP)

Koperasi di Kepri dapat mendaftar program Inkubator Wirausaha Koperasi, mendapatkan Pendampingan manajemen koperasi, Akses pembiayaan melalui LPDB dan bantuan legalitas dan digitalisasi koperasi

5. BUMN dan BUMD: CSR dan Kemitraan Ekonomi

- BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), PLN, dan Pelindo dapat menyalurkan dana CSR untuk koperasi desa binaan, memberikan pelatihan digitalisasi dan literasi keuangan koperasi dan kemitraan koperasi sebagai vendor.
- BUMD seperti PT Pelabuhan Kepri, PT Pembangunan Kepri, dapat menjadi mitra koperasi dalam distribusi hasil

pertanian/kelautan dan mitra jasa penyeberangan.

3.4 Tantangan Dalam Pengembangan Koperasi di Daerah

Pengembangan koperasi di Kepri terus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM melalui pendidikan dan pelatihan, perlindungan, pengawasan, dan pemberdayaan koperasi. Namun demikian berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilaksanakan bersama Dinas Koperasi dan UKM diperoleh informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi, khususnya dalam hal pembentukan KDMP. Tantangan tersebut diantaranya sebagai berikut:

3.4.1 Kondisi Geografis Menjadi Tantangan Dalam Perkembangan Koperasi

Sebagai wilayah kepulauan, Kepri menghadapi tantangan tersendiri dalam pengembangan koperasi. Pertama, keterpisahan antar wilayah administratif menyulitkan pembentukan dan operasionalisasi BUMDes Bersama (BUMDesma), yang idealnya melibatkan kerja sama lintas desa dalam satu ekosistem usaha kolektif. Secara teknis di Kepri, pembentukan BUMDesma antar desa dari kabupaten berbeda tidak memungkinkan karena kondisi geografis yang terpisah.

Tantangan geografis juga berdampak signifikan terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan. Dinas Koperasi dan UKM serta instansi pembina lainnya menghadapi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan koperasi, khususnya di pulau-pulau kecil dan terpencil. Biaya transportasi yang tinggi dan keterbatasan akses logistik menjadi kendala utama dalam menjangkau koperasi yang tersebar di wilayah-wilayah marginal.

Kondisi geografis ini berimplikasi langsung pada rendahnya tingkat partisipasi dan literasi koperasi di tingkat desa. Kurangnya intensitas pendampingan dan





keterbatasan akses informasi turut menyebabkan masih banyak koperasi yang tidak aktif, belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), atau belum memiliki tata kelola usaha yang baik.

3.4.2 Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Koperasi

Salah satu tantangan krusial dalam pengembangan koperasi desa, khususnya dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Inpres tersebut menargetkan pembentukan minimal tujuh unit usaha koperasi yang berbasis pada potensi lokal, seperti perikanan, pertanian, simpan pinjam, logistik, hingga digitalisasi ekonomi desa. Namun demikian, SDM yang tersedia saat ini belum sepenuhnya siap untuk membentuk dan mengelola unit-unit usaha tersebut secara profesional dan berkelanjutan.

Minimnya pengalaman berwirausaha, rendahnya literasi keuangan dan manajerial, serta kurangnya pelatihan teknis menjadi kendala utama. Kurang siapnya SDM dalam mengelola usaha koperasi berisiko menghambat efektivitas realisasi program KDMP, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak mampu memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

3.4.3 Pendanaan Pengembangan Koperasi yang Masih Terbatas

Ketersediaan dana yang memadai merupakan prasyarat penting dalam pembentukan dan pengembangan KDMP. Namun demikian, implementasi di daerah menghadapi tantangan krusial terkait keterbatasan anggaran, baik untuk tahap awal pembentukan koperasi maupun untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan unit usaha koperasi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kebutuhan akan pelatihan dan penguatan kapasitas pengelola koperasi secara masif menjadi semakin mendesak. Pengelola koperasi di tingkat desa masih memerlukan pendampingan intensif dalam hal kewirausahaan, perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pemasaran. Tanpa adanya kesiapan, koperasi sulit untuk tumbuh menjadi entitas usaha yang sehat dan produktif. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko bahwa nantinya koperasi hanya terbentuk secara administratif.

3.5 Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah

3.5.1 Pelatihan dan Kolaborasi Koperasi Digital

Strategi pengembangan koperasi di Kepri perlu mengadopsi pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik geografis wilayah kepulauan. Salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelatihan dan penguatan kapasitas koperasi.

Model pelatihan jarak jauh berbasis digital (*e-learning*) dapat menjadi solusi untuk menjangkau koperasi-koperasi yang berada di wilayah terpencil yang sulit diakses. Selain lebih efisien dari sisi biaya dan waktu, langkah ini juga mendorong transformasi digital dalam pengelolaan koperasi.

Di samping itu, penting untuk mendorong kolaborasi antarkoperasi melalui forum diskusi digital yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi koperasi secara kolektif. Forum ini dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah atau lembaga mitra, dan berperan sebagai wadah pembelajaran bersama sekaligus ruang inovasi.

Melalui pelatihan digital dan kolaborasi virtual ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem koperasi yang saling





mendukung, lebih adaptif terhadap perubahan, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi meningkatkan semangat kewirausahaan koperasi, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

3.5.2 Pengembangan Kapasitas SDM Melalui Pelatihan Kewirausahaan Digital

Pengembangan koperasi yang berkelanjutan memerlukan investasi serius dalam peningkatan kapasitas SDM di desa. Langkah tersebut mencakup pelatihan kewirausahaan yang aplikatif, pendampingan teknis secara intensif, serta penguatan sistem pelatihan berjenjang yang berbasis teknologi informasi. SDM koperasi yang kompeten akan mendorong peningkatan efisiensi usaha, akuntabilitas keuangan, serta inovasi dalam pengembangan produk dan layanan koperasi.

Seiring dengan semakin meluasnya akses terhadap teknologi digital hingga ke tingkat desa, pelatihan berbasis daring saat ini semakin *feasible* untuk diterapkan. Teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh pengurus koperasi untuk mengakses dan mempelajari aset intelektual dan materi pelatihan yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik berupa modul, video, maupun aplikasi pembelajaran mandiri.

Lebih daripada itu, teknologi informasi juga dapat menjadi alat strategis kewirausahaan bagi koperasi, seperti untuk pemasaran digital, transaksi daring, pengelolaan stok dan keuangan, hingga perluasan jejaring kemitraan. Dalam hal ini, koperasi tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi lokal, tetapi juga didorong untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha berbasis digital yang kompetitif dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Promosi produk koperasi juga dapat ditingkatkan melalui media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya, yang memungkinkan koperasi menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Oleh

karena itu, digitalisasi koperasi harus menjadi agenda prioritas, didukung oleh kebijakan fiskal yang progresif serta sinergi lintas sektor untuk membangun ekosistem koperasi modern yang inklusif dan berbasis teknologi.

3.5.3 Strategi Pendanaan Koperasi Yang Inklusif

Strategi pendanaan yang inklusif harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik pada level pusat maupun daerah. Pendekatan pendanaan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan dana, tetapi juga pada aksesibilitas, keberlanjutan, dan pengawasan terhadap pemanfaatannya.

Pendekatan pendanaan yang inklusif harus mencakup diversifikasi sumber pembiayaan, antara lain dari anggaran pemerintah pusat, alokasi belanja daerah, dana bergulir, hingga potensi kemitraan dengan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam konteks ini, peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) maupun skema pembiayaan ultra mikro menjadi penting untuk memberikan akses permodalan kepada koperasi desa yang belum layak bank (unbankable), namun memiliki potensi usaha yang menjanjikan.

Tidak kalah penting adalah dukungan teknis untuk penguatan kapasitas koperasi dalam merancang dan mengelola anggaran. Tanpa kapasitas manajerial dan keuangan yang memadai, pendanaan yang tersedia berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara efektif. Oleh karena itu, strategi pendanaan harus diiringi oleh peningkatan literasi keuangan koperasi serta pelatihan pengelolaan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi digital dapat dimaksimalkan, baik untuk pelaporan, manajemen internal, maupun pencatatan keuangan yang transparan.

Selain itu, dalam rangka memastikan efektivitas penggunaan dana publik,





dibutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi yang terstruktur. Pemerintah daerah bersama instansi pembina koperasi perlu menyusun indikator kinerja yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan koperasi secara periodik.

Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai dasar perbaikan program dan penyesuaian strategi pembinaan serta pendanaan ke depan. Dengan demikian, koperasi yang menunjukkan performa baik dapat diberikan dukungan tambahan, sementara koperasi yang mengalami stagnasi dapat diarahkan untuk mengikuti program revitalisasi kelembagaan.

3.6 Potensi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang terdiri atas lebih dari 2.400 pulau, memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang unik. Keadaan ini membuka peluang besar bagi pengembangan koperasi desa atau kelurahan yang berbasis pada potensi lokal. Sebagai entitas ekonomi kerakyatan, koperasi dapat dijadikan instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya laut, pariwisata, perdagangan bebas, serta kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berkembang di wilayah ini. Berikut kami sampaikan potensi pengembangan koperasi di Kepri:

3.6.1 Potensi Hasil Laut dan Perikanan

Kekayaan hasil laut Kepri seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, dan hasil perikanan tangkap lainnya merupakan potensi utama dalam pengembangan koperasi nelayan dan koperasi produsen. Koperasi dapat memainkan peran sebagai pengelola rantai pasok hasil laut secara kolektif, mulai dari penangkapan, pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain memberikan nilai tambah pada produk, model koperasi ini juga memperkuat posisi tawar nelayan terhadap tengkulak dan meningkatkan akses mereka ke pasar domestik

dan internasional. Koperasi juga dapat mendorong pengembangan sistem logistik laut antar-pulau yang lebih efisien, serta mengintegrasikan teknologi dingin (cold storage) berbasis komunitas.

3.6.2 Potensi Perdagangan (Free Trade Zone)

Status Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) dan area bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk dan Bea Keluar sehingga koperasi memiliki peluang besar untuk masuk dalam skema distribusi barang dan jasa yang kompetitif. Koperasi konsumen atau koperasi jasa logistik dapat memanfaatkan insentif fiskal tersebut untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, koperasi juga dapat memainkan peran sebagai agregator dalam penyediaan bahan baku dan barang kebutuhan pokok untuk wilayah pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi konvensional.

3.6.3. Potensi Industri (Kawasan Ekonomi Khusus)

Keberadaan kawasan ekonomi khusus (KEK) terbanyak di Indonesia, seperti KEK Galang Batang (Bintan), KEK Nongsa (Batam), dan KEK Batam Aero Technic, membuka peluang kolaboratif bagi koperasi sebagai penyedia jasa pendukung industri. Koperasi pekerja dapat dikembangkan untuk menyediakan layanan tenaga kerja, catering, transportasi lokal, dan kebutuhan logistik lainnya yang dibutuhkan oleh investor di dalam KEK. Dengan dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah dan sinergi dengan pengelola kawasan, koperasi dapat menjadi simpul penggerak ekonomi lokal yang menyatu dalam ekosistem industri strategis nasional.

3.6.4 Potensi Pariwisata

Pariwisata bahari Kepri yang mencakup destinasi unggulan seperti Bintan, Natuna, Anambas, dan Batam, dapat dikembangkan melalui koperasi wisata atau





koperasi jasa. Masyarakat lokal dapat dihimpun dalam wadah koperasi untuk mengelola homestay, penyewaan perahu, jasa pemandu wisata, hingga penjualan produk kerajinan dan kuliner khas daerah. Koperasi ini berfungsi sebagai institusi ekonomi sekaligus sosial, yang menjamin distribusi manfaat pariwisata secara merata kepada masyarakat setempat. Penguatan koperasi pariwisata berbasis masyarakat juga sejalan dengan prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan, karena melibatkan warga secara aktif dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

3.6.5 Potensi Hasil Pertanian (Kelapa)

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), selain dikenal dengan kekayaan lautnya, juga memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya pada komoditas kelapa. Tanaman kelapa tumbuh subur di berbagai pulau di Kepri seperti di Lingga, Natuna, dan Bintan. Produk turunannya memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar global yang kuat. Saat ini, sebagian hasil kelapa telah diekspor ke luar negeri dalam bentuk kelapa bulat, kopra, dan sabut kelapa. Namun, nilai tambah dari komoditas ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan melalui pendekatan kelembagaan koperasi.

3.7 Pengembangan Inovasi Koperasi di Provinsi kepri

1. Koperasi Digital Maritim (*Smart Marine Cooperative*)

Menggabungkan teknologi digital dengan aktivitas ekonomi pesisir sehingga mampu menerbitkan platform digital untuk pelelangan ikan berbasis aplikasi. Selanjutnya, mampu menyediakan sistem pembayaran digital antar nelayan dan pembeli lintas pulau. Lebih lanjut, platform juga dapat memberikan edukasi digital kepada nelayan terkait cuaca, rute tangkap, dan harga pasar.

2. Koperasi Ekspor Produk UMKM Kepulauan

Memanfaatkan status Free Trade Zone (FTZ), koperasi ini bisa menjadi agregator produk unggulan lokal (keripik ikan, batik motif laut, kerajinan kerang, dan produk turunan laut) untuk ekspor. Selanjutnya, memfasilitasi sertifikasi halal, HACCP, dan ekspor sekaligus bersinergi dengan Bea Cukai dan pelabuhan internasional di Batam dan Bintan. Hal ini juga dapat membantu umkm untuk menjadi hub distribusi produk UMKM antar pulau dan luar negeri.

3. Koperasi Wisata Bahari Berbasis Ekowisata Komunitas

Mengembangkan pariwisata berbasis konservasi dan budaya lokal meliputi, penyediaan paket wisata berbasis desa (snorkeling, diving, kuliner laut, budaya Melayu) dan mengelola kawasan konservasi laut secara swadaya melalui CSR dan tiket masuk, serta menyediakan pelatihan hospitality bagi anggota koperasi.

4. Koperasi Transportasi Laut dan Logistik Antar-Pulau

Melihat tantangan konektivitas antar 2.400 pulau, koperasi ini diharapkan mampu mengelola armada kapal kecil/pompong untuk angkut barang dan penumpang dan menyediakan layanan distribusi logistik (bahan pokok, BBM, hasil tani) ke pulau-pulau terpencil.

5. Koperasi Energi Terbarukan

Masih terdapat pulau-pulau kecil yang belum terjangkau listrik PLN 24 jam, koperasi energi diharapkan mampu mengelola pembangkit listrik tenaga surya, angin ataupun air berbasis komunitas dengan menyediakan layanan sewa baterai/solar panel untuk rumah tangga. Lebih lanjut dapat bekerja sama dengan swasta ataupun BUMN energi.



Hubungan Output dan Outcome Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri

Pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau

Pelaksanaan MBG turut didukung oleh lembaga penelitian (INDEF) dengan mengkaji pilot project program tersebut pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa anggaran makan bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun melalui UMKM akan mendorong PDB sebesar Rp4.510 triliun atau sebesar 34,2% dari estimasi PDB konstan tahun 2025. Selanjutnya, seribu rupiah yang dikeluarkan untuk MBG dapat memberi manfaat hingga Rp63.500 terhadap ekonomi. Dari sisi UMKM, rata-rata penambahan tenaga kerja pada UMKM yang terlibat pilot project program MBG di 10 kota/kabupaten adalah sejumlah 3 orang dan meningkatkan pendapatan bersih UMKM per bulan sebesar 33,68%.

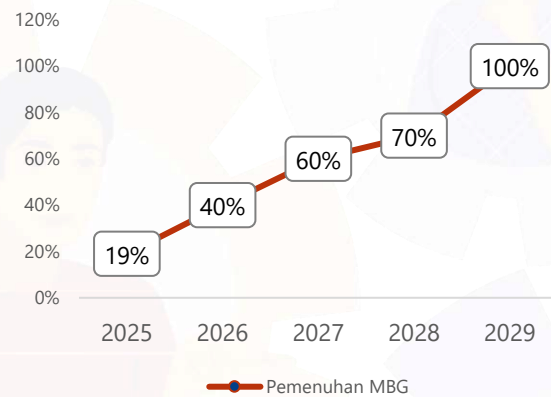
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bertujuan untuk meningkatkan 1) asupan gizi bagi peserta didik dan anak; 2) menjangkau masyarakat rentan; 3) mengurangi risiko stunting dan gangguan kesehatan; 4) mengurangi beban ekonomi keluarga; 5) mendukung Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2025, program ini menargetkan 98.068 penerima manfaat, yang merupakan 19% dari total 516.149 peserta didik di Kepri.

Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaksanakan oleh BGN Pusat dengan tiga Skema penyaluran:

1. Skema Dapur BGN - Dapur yang dimiliki oleh BGN dan operasionalnya dikelola oleh BGN Pusat.
2. Skema Dapur Mitra - Dapur yang dimiliki oleh swasta, operasionalnya dikelola oleh BGN Pusat.
3. Dapur Instansi - Dapur yang dimiliki oleh instansi, operasionalnya dikelola oleh BGN Pusat.

Untuk mendukung distribusi makanan bergizi, direncanakan pembangunan 253 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kepri pada tahun 2025, dengan masing-masing dapur mampu menyiapkan 3.000-3500 paket makanan per hari. Pelaksanaan program MBG dilakukan secara bertahap dengan target capaian sebagai berikut:

Grafik Target Penerima MBG di Kepri Tahun 2025 (persen)



Sumber: Press Release Gubernur Kepri, 2025

Dapur SPPG terdiri dari 1 Kepala SPPG, 1 Ahli Gizi, 1 Akuntan dan dibantu maksimal 47 tenaga karyawan (koki, tim cleaning, driver). Lebih lanjut Keterlibatan Instansi dalam program MBG meliputi: Badan Gizi Nasional sebagai leader dan didukung oleh Kodim, Dinkes, BPPOM, Puskesmas dan Polsek. Rencana distribusi penerima manfaat MBG di Kepri pada tahun 2025 adalah 253 SPPG dengan rincian sebagai berikut:

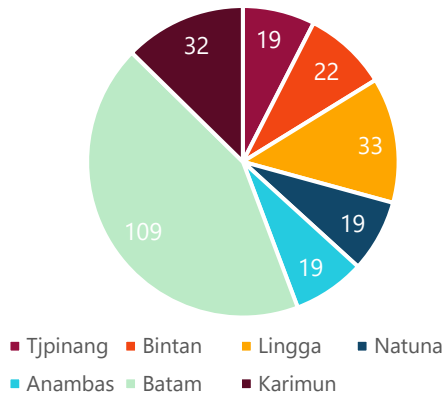
1. Kabupaten Bintan: 43.879 orang (22 unit pelayanan)
2. Kabupaten Karimun: 60.980 orang (32 unit pelayanan)
3. Kabupaten Kepulauan Anambas: 12.621 orang (19 unit pelayanan)
4. Kota Batam: 303.629 orang (109 unit pelayanan)
5. Kabupaten Lingga: 21.868 orang (33 unit pelayanan)
6. Kabupaten Natuna: 21.316 orang (19 unit pelayanan)



7. Kota Tanjungpinang: 51.856 orang (19 unit pelayanan)

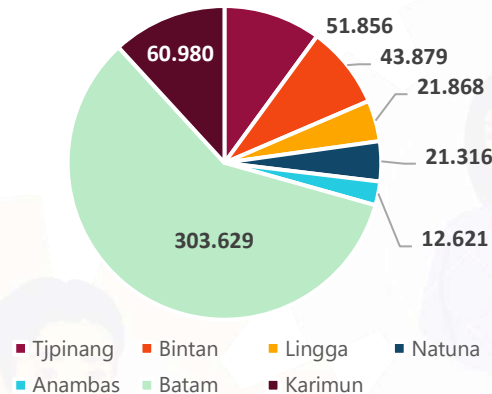
(PoU), yaitu kondisi Ketidacukupan gizi ketika seseorang kekurangan asupan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Grafik Target SPPG Kepri Tahun 2025



Sumber: Press Release Gubernur Kepri,

Grafik Penerima Program MBG di Kepri Tahun 2025



Prevalence of Undernourishment (PoU)

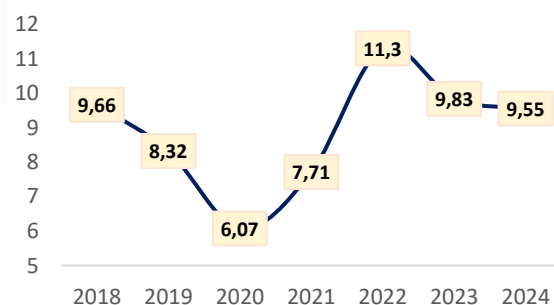
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu (BAPANAS, 2024). PoU merupakan indikator yang digunakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) untuk mengukur persentase penduduk suatu wilayah yang asupan energinya secara kronis berada di bawah kebutuhan minimum harian. Di Indonesia, PoU menjadi salah satu parameter penting dalam menilai keberhasilan program ketahanan pangan dan gizi nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki hubungan yang erat dan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan Prevalence of Undernourishment (PoU), terutama di kalangan anak-anak usia sekolah. MBG bertujuan menyediakan akses langsung terhadap makanan bergizi bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga berpotensi memperbaiki asupan energi dan nutrisi harian anak-anak secara konsisten.

Program MBG di Kepri menargetkan penurunan Prevalence of undernourishment

Hal ini dapat berujung pada berbagai masalah kesehatan, seperti stunting (kekerdilan pada anak), anemia, gangguan perkembangan mental, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Meskipun Kepri termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional, tantangan gizi tetap ada, terutama di daerah *hinterland* dan pulau-pulau kecil yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan distribusi pangan. Berdasarkan data BPS dan laporan Kementerian Kesehatan, prevalensi masalah gizi seperti *stunting* dan *underweight* di Kepri mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana pada grafik berikut:

Grafik PoU Provinsi Kepri 2018-2024 (persen)



Sumber: BPS Kepri, 2024

Prevalence of undernourishment (PoU) menunjukkan tingkat ketidakcukupan gizi konsumsi pangan di Kepri tahun 2024 sebesar 9,55% dari total penduduk Kepri. Program MBG diharapkan dapat menurunkan angka PoU di Kepri dan mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator ini juga menjadi faktor yang mencerminkan tingkat kerawanan pangan dalam suatu populasi, dengan mempertimbangkan distribusi konsumsi pangan, kebutuhan energi minimum, serta aksesibilitas terhadap makanan bergizi secara berkelanjutan.

Gangguan Kesehatan Ibu dan Anak

Indikator "Gangguan Kesehatan Ibu dan Anak" menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan bagian dari indikator kesehatan yang mencerminkan frekuensi atau prevalensi gangguan kesehatan yang dialami oleh ibu (terutama ibu hamil dan menyusui) serta anak-anak (biasanya balita) dalam suatu populasi. Indikator ini umumnya diukur melalui:

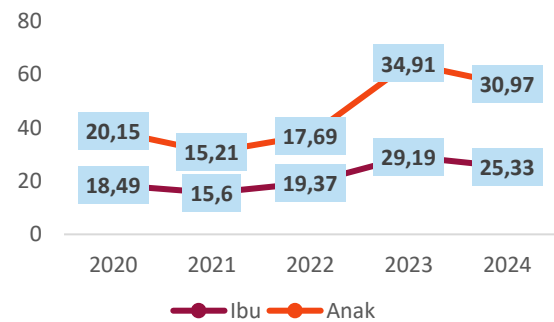
- 1) Persentase ibu yang mengalami komplikasi kehamilan atau persalinan.
- 2) Tingkat kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB).
- 3) Jumlah balita dengan gejala penyakit seperti diare, demam, atau infeksi saluran pernapasan.
- 4) Prevalensi kekurangan gizi pada balita (*stunting, wasting, underweight*).

Program makan gizi gratis yang difokuskan pada kesehatan ibu dan anak bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang optimal kepada kelompok rentan. Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak adalah kelompok yang sangat membutuhkan asupan gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan jangka panjang. Gangguan kesehatan pada ibu dan anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor meliputi 1) Kurangnya asupan gizi yang baik, terutama pada masa kehamilan dan awal kehidupan anak; 2) Akses layanan kesehatan yang terbatas; 3) Kondisi sanitasi dan

air bersih yang buruk; 4).Kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi.

Persentase Ibu dan Anak yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai berikut:

Grafik Gangguan Kesehatan Ibu dan Anak 2018-2024 (persen)



Sumber: Profil Kesehatan Ibu dan Anak (BPS Kepri)

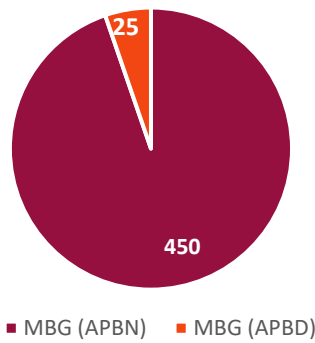
Jumlah gangguan kesehatan pada Ibu dan anak di Provinsi Kepri pada tahun 2024 mencapai 25,33% dan 30,97% dari populasi secara berurutan, hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong peningkatan kesehatan Ibu dan Anak melalui program MBG. Makanan yang mengandung protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks akan mendukung: 1) pertumbuhan fisik anak; 2) nutrisi seperti asam lemak omega3, zat besi, dan yodium; 3) mendukung perkembangan otak anak; 4) asupan vitamin dan mineral yang cukup akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak sehingga meminimalisir terserang penyakit.

Alokasi Anggaran Program MBG di Provinsi Kepulauan Riau

Disbursement Program MBG adalah proses penyaluran dana dari APBN/APBD kepada pihak penyedia layanan makan bergizi seperti sekolah, koperasi, BUMDes, atau pihak swasta yang ditunjuk, untuk membeli bahan makanan, mengolah, dan mendistribusikannya kepada penerima manfaat. Penyaluran Dana MBG di Provinsi Kepri tersaji pada Grafik berikut:



Grafik Alokasi Anggaran MBG di Kepri Tahun 2025 (Rp miliar)



Sumber: Press Release Gubernur Kepri, 2025

Alokasi anggaran Program MBG (sumber APBN) di Kepri mencapai Rp450 miliar, lebih lanjut Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan dalam *press release* bahwa Pemerintah Prov Kepri sangat mendukung program MBG dengan menaikan alokasi anggaran MBG (sumber APBD) dari Rp19 miliar menjadi Rp25 miliar pada tahun 2025. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Provinsi Kepri juga akan terus ditambah untuk mengejar target pemenuhan penerima manfaat pada tahun 2025.

Output MBG

1. Peningkatan Asupan Gizi



Tingkat ketidakcukupan gizi konsumsi pangan Kepri tahun 2024 sebesar 9,55% dari total penduduk Kepri.

Program MBG diharapkan dapat menurunkan angka PoU di Kepri dan mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

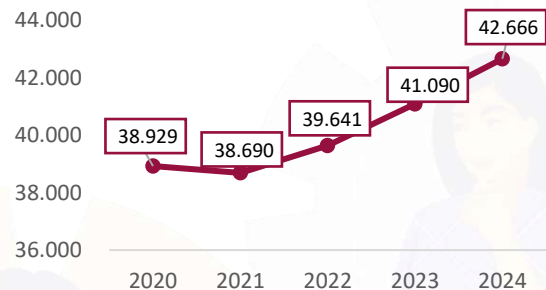
2. MBG meningkatkan Asupan Gizi Harian

1. Siswa mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang.

2. Mengurangi prevalensi anak-anak yang belajar dalam kondisi lapar

3. Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga

Pengeluaran Perkapita Orang/Hari di Provinsi Kepri (rupiah)



MBG mengurangi Beban Ekonomi keluarga:

1. Mengurangi pengeluaran keluarga untuk konsumsi makanan anak (Rp10rb/anak).
2. Meringankan beban ekonomi keluarga miskin.

4. Pemberdayaan Lokal Bidang Pertanian

Pemberdayaan Ekonomi Lokal Bidang Pertanian dan Pangan:

1. Peningkatan Permintaan Bahan Pangan Lokal, Pemberdayaan Petani Lokal.
2. Meningkatkan Aktivitas Ekonomi UMKM Bidang Pangan.
3. Membuka lowongan pekerjaan pada 253 SPPG (47org/SPPG) diseluruh Kepri -> 11.891 lowongan pekerjaan meliputi Akuntan, Ahli Gizi, dan Tenaga Dapur (Koki, asisten dan lainnya).
4. Asupan Gizi dan Kesehatan Anak

Program Makan Bergizi Gratis berperan penting dalam meningkatkan asupan nutrisi harian anak-anak, khususnya siswa sekolah dasar dan menengah. Melalui penyediaan makanan yang seimbang dan sesuai kebutuhan gizi, program ini bertujuan untuk memperbaiki status gizi anak yang sebelumnya mungkin mengalami kekurangan energi, protein, maupun mikronutrien esensial. Dengan meningkatnya status gizi, pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak pun turut



terdorong secara optimal. Dampak lanjutannya adalah peningkatan derajat kesehatan anak secara menyeluruh, termasuk menurunnya risiko penyakit infeksi dan absensi sekolah akibat gangguan kesehatan.

5. Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Ketersediaan makanan bergizi di sekolah terbukti mampu mendorong kehadiran siswa secara konsisten, karena makanan menjadi insentif langsung bagi siswa dan keluarganya. Dengan meningkatnya kehadiran, partisipasi siswa dalam proses belajar-mengajar pun meningkat, yang kemudian berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi dan prestasi akademik. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatan Net Enrollment Rate (NER), yakni proporsi anak usia sekolah yang benar-benar terdaftar di institusi pendidikan formal. Akhirnya, program ini menjadi investasi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

6. Ekonomi Keluarga dan Kesejahteraan

Program ini turut berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya keluarga dari kelompok masyarakat prasejahtera. Dengan adanya penyediaan makan siang gratis, pengeluaran keluarga untuk kebutuhan konsumsi anak selama jam sekolah dapat dikurangi secara signifikan. Konsekuensinya, alokasi pengeluaran rumah tangga dapat dialihkan pada kebutuhan lain yang tidak kalah penting seperti kesehatan, pendidikan lanjutan, atau modal usaha kecil. Dengan demikian, program MBG menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

7. Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan

Program MBG juga memiliki dimensi ekonomi lokal yang kuat, karena pengadaan bahan pangan dan pelaksanaan operasional dapur umum mendorong keterlibatan petani lokal, nelayan kecil, pelaku UMKM pangan, serta kelompok masyarakat lainnya. Aktivitas ekonomi lokal ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pelaku ekonomi mikro, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa dan daerah. Ketika rantai pasok makanan diorientasikan pada sumber daya lokal, maka terjadi perputaran ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Outcome MBG

1. Peningkatan Status Gizi Anak

- Meningkatnya energi dan vitalitas anak untuk beraktivitas.
- Menurunkan prevalensi anak kurang gizi.

2. Kehadiran Siswa Meningkat

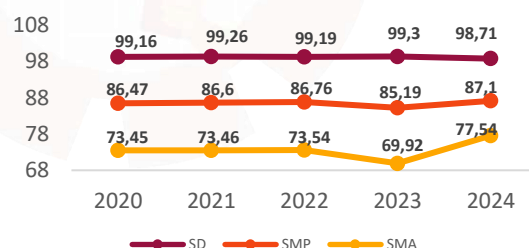
- Siswa lebih termotivasi datang ke sekolah.
- Penurunan angka ketidakhadiran dan putus sekolah.

3. Kinerja Akademik Meningkat

- Konsentrasi belajar lebih tinggi.
- Peningkatan prestasi belajar.

4. Peningkatan Net Enrolment Rate (Angka Partisipasi Murni)

Net Enrolment Rate Prov Kepri (%)



- Anak-anak lebih tertarik dan mampu untuk terus bersekolah.



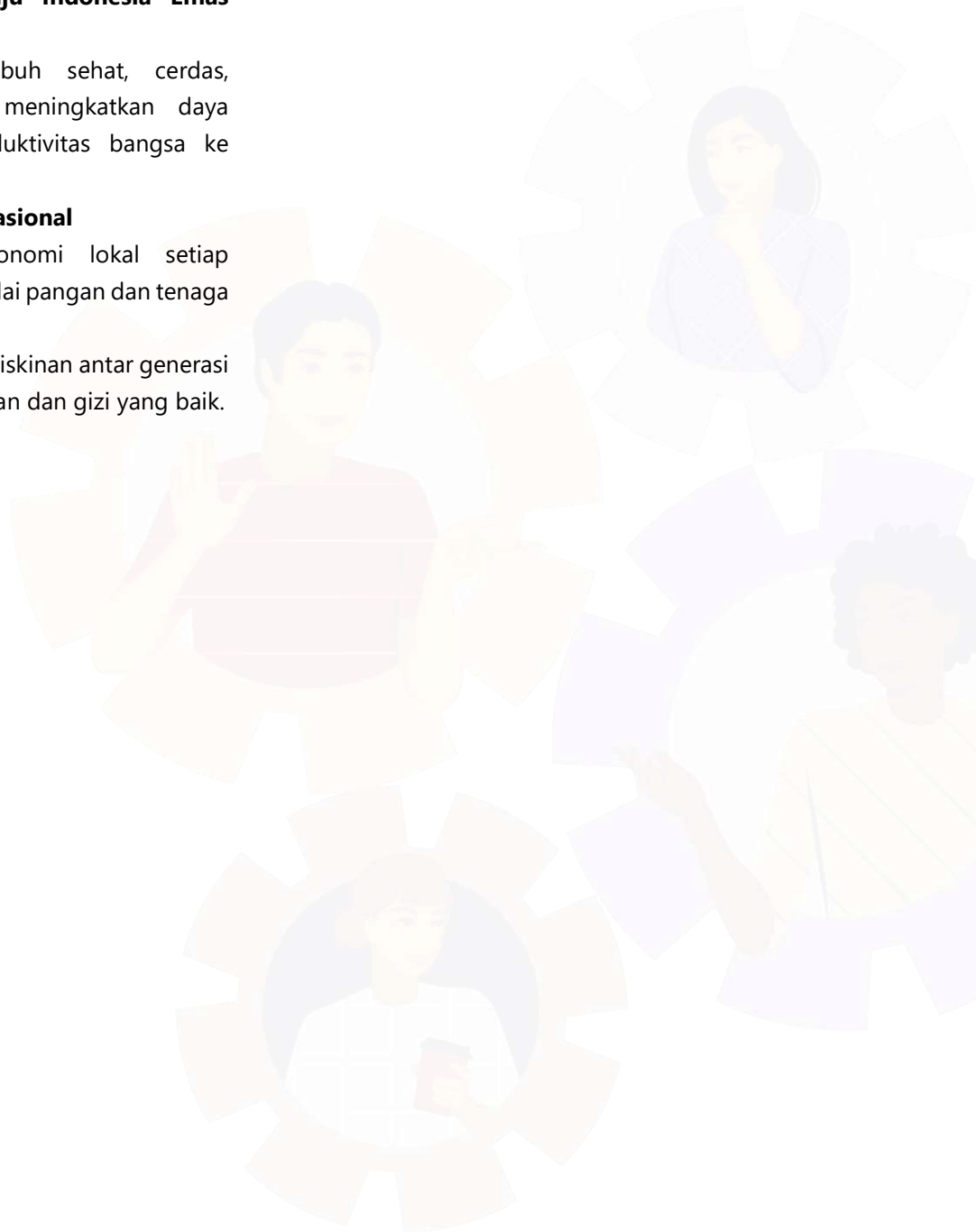
- Keluarga lebih terdorong menyekolahkan anak karena manfaat langsung MBG.

5. Penguatan Kualitas SDM Nasional Di Masa Depan menuju Indonesia Emas 2045

- Anak-anak tumbuh sehat, cerdas, produktif dan meningkatkan daya saing dan produktivitas bangsa ke depan.

6. Dampak Ekonomi Nasional

- Tumbuhnya ekonomi lokal setiap daerah lewat suplai pangan dan tenaga kerja.
- Mengurangi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan gizi yang baik.



BAB IV

Optimalisasi Kebijakan Fiskal:
Mengakselerasi Pembangunan
Daerah untuk Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkelanjutan.

KESIMPULAN
DAN
REKOMENDASI





Desa Wisata Poyotomo, Kabupaten Bintan

- Kesimpulan
- Rekomendasi



BAB IV – Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Kajian Fiskal Regional Kepulauan Riau triwulan I 2025 sebagai berikut:

Analisis Ekonomi Regional

Perekonomian Kepri pada triwulan I 2025 tetap menunjukkan kinerja yang positif dan menjadi provinsi dengan **pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera**. Indikator kesejahteraan rata-rata mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pada triwulan I 2025, kinerja perekonomian Kepri terjaga dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16 persen (yoy)** yang mencerminkan kestabilan perekonomian di Kepri. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kepri di tahun 2024 menjadi yang tertinggi ke-3 di regional Sumatera, Lampung dan Sumatera Selatan. Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisman dan wisnus yang meningkatkan permintaan barang dan jasa dan mendukung produktivitas ekonomi Kepri. **PDRB ADHB** Kepri pada triwulan I 2025 sebesar Rp91.298,69 miliar dan ADHK Kepri sebesar Rp53.855,96 miliar. Dari sisi Pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri didominasi oleh **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** dengan *share* 43,43 persen dan tumbuh 3,27 persen (yoy). Dari sisi Lapangan Usaha, PDRB Kepri didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama, yakni **sektor industri pengolahan** dengan *share* 42,51 persen, disusul sektor konstruksi 20,04 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 9,49 persen.
2. **Tekanan inflasi** Kepri pada bulan Maret 2025 sebesar 2,01 persen (yoy). Angka inflasi ini diperoleh berdasarkan perhitungan tekanan inflasi pada kota Batam, kota Tanjungpinang dan kabupaten Karimun. Inflasi Kepri di bulan Maret 2025 didominasi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,69 persen (yoy). **Komoditas dengan andil inflasi terbesar ada pada emas perhiasan (0,56 persen), sewa rumah (0,14 persen), dan sigaret kretek mesin (0,13 persen)**. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakstabilan iklim di daerah produsen beras yang menyebabkan gagal panen, sedangkan Provinsi Kepri masih mengimpor beras dari daerah produsen beras dari dalam negeri (pulau Jawa) dan luar negeri.
3. **NTP Kepri** pada bulan 2025 sebesar 106,16 menunjukkan pertumbuhan positif 0,68 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2024 (yoy), namun turun 1,75 persen apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2025 (mtm). NTP tersebut telah mencapai target NTP dalam RPJMD Kepri yang ditargetkan mencapai 99,98 persen di tahun 2025. Namun NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (123,72).
4. **NTN** Kepri di bulan Maret 2025 sebesar 102,64. Angka NTN tersebut mengalami penurunan sebesar 1,04 persen (mtm) 2,96 persen (yoy). Meskipun merupakan provinsi kepulauan, NTN Kepri nyatanya masih berada di bawah NTN nasional yang pada bulan Maret 2025 mencapai 103,53. NTP Kepri juga masih belum mencapai sasaran NTN yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 116,10. Maka dari itu, pemerintah daerah akan terus meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan.
5. **IPM Kepri pada tahun 2024 berhasil menjadi IPM tertinggi ke-tiga Nasional** dengan IPM 79,89, tumbuh sebesar 0,81 persen (yoy). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama enam tahun berturut-turut.





6. **Tingkat kemiskinan** Kepri pada September 2024 tercatat 124,96 ribu jiwa atau 4,78 persen dari total penduduk Kepri. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan Kepri turun sebanyak $\pm 13,3$ ribu jiwa (yoy).
7. **Gini Ratio atau tingkat ketimpangan Kepri** di bulan September 2024 sebesar 0,357. Gini Ratio tersebut meningkat 0,008 persen (yoy). Gini Ratio tersebut dibawah angka Gini Ratio nasional yaitu 0,381. **Gini Ratio Kepri periode September 2024 berada pada peringkat pertama tertinggi di regional Sumatera.** Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi Kepri tidak dirasakan secara merata. Hal ini disebabkan majunya kota Batam sebagai pusat bisnis kurang mampu memberikan efek domino (*spatial economic effect*) peningkatan aktivitas ekonomi pada kabupaten lainnya.
8. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Kepri bulan Februari 2025 tercatat 6,89 persen; dengan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** mencapai 66,84 persen. Angka TPT Provinsi Kepri masih berada **pada peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan bahkan tertinggi ke-dua Nasional** setelah Provinsi Papua (6,92 persen). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi angkatan kerja cukup tinggi, masih terdapat tantangan besar dalam penyediaan lapangan kerja di Kepri.

Analisis Fiskal Regional

Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

1. **Pendapatan Negara** tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp18.054,79 miliar yang seluruhnya merupakan Penerimaan Dalam Negeri, terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp15.381,79 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.672,99 miliar.
 - **Realisasi Penerimaan Perpajakan** pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.638,26 miliar (10,65 persen dari Target) dan mengalami pertumbuhan minus 26,12 persen (yoy). Penurunan penerimaan perpajakan sebagai dampak perubahan sistem administratif serta tarif.
 - **Realisasi PNBP** pada triwulan I 2025 sebesar Rp657,45 miliar (24,60 persen dari Target) dan tumbuh sebesar 4,44 persen (yoy). Realisasi ini disumbang oleh PNBP Aset khususnya yang dikelola oleh BP Batam
2. **Belanja Negara** tahun 2025 dianggarkan dengan Pagu sebesar Rp16.499,90 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp8.048,50 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.451,40 miliar.
 - **Realisasi Belanja Pemerintah Pusat** pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.041,85 miliar (12,94 persen dari Pagu) dan tumbuh sebesar minus 30,84 persen (yoy). Pertumbuhan minus disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sehingga memangkas belanja barang dan modal dalam jumlah besar.
 - **Realisasi Belanja TKD** pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.586,49 miliar (18,77 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar minus 18,62 persen (yoy). Penurunan belanja TKD sebagai dampak pemda yang masih berhati-hati dalam melakukan kontrak belanja sebagai dampak efisiensi belanja.
3. **Surplus** dianggarkan sebesar Rp1.554,89 miliar namun pada triwulan I 2025 terealisasi Defisit sebesar Rp332,62 miliar. Defisit terjadi dikarenakan realisasi penerimaan pajak belum optimal.





Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

1. **Pendapatan Daerah** tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp14.606,41 miliar, terdiri dari PAD sebesar Rp5.257,44 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp9.317,12 miliar, dan LLPDyS sebesar Rp31,85 miliar.
 - **Realisasi PAD** pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.068,54 miliar (20,32 persen dari Target) dan mengalami pertumbuhan 21,26 persen (yoy). Pertumbuhan PAD didongkrak oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga mendorong PAD tumbuh positif.
 - **Realisasi Pendapatan Transfer** pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.734,78 miliar (18,62 persen dari Target) dan tumbuh minus 0,50 persen (yoy). Penurunan Pendapatan Transfer sebagai dampak efisiensi belanja TKD pada pemerintah pusat.
 - **Realisasi LLPDyS** s.d. triwulan I 2025 masih belum terdapat realisasi.
2. **Belanja Daerah** tahun 2025 dianggarkan dengan Pagu sebesar Rp15.096,81 miliar, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp11.612,99 miliar, Belanja Modal sebesar Rp2.005,08 miliar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp242,39 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp1.236,35 miliar.
 - **Realisasi Belanja Operasi** pada triwulan I 2025 sebesar Rp1.949,16 miliar (16,78 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 24,05 persen (yoy).
 - **Realisasi Belanja Modal** pada triwulan I 2025 sebesar Rp90,47 miliar (4,51 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar minus 27,02 persen (yoy).
 - **Realisasi Belanja Tak Terduga** pada triwulan I 2025 sebesar Rp0,68 miliar (0,28 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 119,32 persen (yoy).
 - **Realisasi Belanja Transfer** pada triwulan I 2025 sebesar Rp116,80 miliar (9,45 persen dari Pagu) dan mengalami pertumbuhan sebesar 27,12 persen (yoy).
3. **Defisit** dianggarkan sebesar Rp490,40 miliar dan pada triwulan I 2025 terealisasi Surplus sebesar Rp646,20 miliar.

Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi

1. **Pendapatan Konsolidasi** pada triwulan I 2025 sebesar Rp3.542,57 miliar dan mengalami pertumbuhan minus 13,95 persen (yoy).
2. **Belanja Konsolidasi** pada triwulan I 2025 sebesar Rp3.441,62 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar minus 11,59 persen (yoy).
3. **Surplus Konsolidasi** pada triwulan I 2025 sebesar Rp100,96 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar minus 55,00 persen (yoy).

Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)

1. **Proses penyaluran Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kepri telah berjalan pada seluruh kabupaten/kota tanpa adanya anomali/hambatan yang signifikan** dalam pelaksanaannya, namun perlu ada percepatan penyaluran dan pelaksanaannya.
2. **Siswa mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari sehingga sangat baik untuk perkembangan fungsi kognitif** siswa, kesehatan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan siswa
3. **Implementasi MBG di Kepri tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anak sekolah**, tetapi juga dapat dioptimalkan sebagai alat pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
4. **Pada level nasional program MBG memberikan dampak dalam mengembangkan ekonomi Indonesia**, meliputi 1) Peningkatan Output pada 17 sektor ekonomi sebesar Rp345,23 triliun (201,34 persen dari alokasi program MBG); 2) Peningkatan Income rumah tangga pada seluruh





sektor ekonomi sebesar Rp70,01 triliun; 3) Penyerapan tenaga kerja pada seluruh sektor mencapai 2.533 orang dan meningkatkan PDB pada seluruh sektor mencapai Rp174,29 triliun.

5. **Program MBG di Kepri memberikan dampak dalam mengembangkan ekonomi Kepri**, meliputi 1) Peningkatan Output pada 17 sektor ekonomi sebesar Rp564 miliar (25,33 persen dari alokasi program MBG); 2) Peningkatan Income rumah tangga pada seluruh sektor ekonomi sebesar Rp312 miliar; 3) Penyerapan tenaga kerja pada seluruh sektor mencapai 2.533 orang dan meningkatkan PDB pada seluruh sektor mencapai Rp259,12 miliar.
6. **Relatif rendahnya peningkatan output dan PDRB di Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional** dipengaruhi oleh karakteristik geografis Kepri kepulauan. Kepri masih cukup mengandalkan input pasokan pangan dari luar daerah. Namun demikian, input tersebut merupakan bagian integral dari PDB nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara agregat.

Analisis Tematik: Analisis atas Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah

1. Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari 275 desa dan 144 kelurahan (total 419 desa/kelurahan), tercatat **memiliki sebanyak 1.977 unit koperasi. Dari jumlah tersebut, hanya 741 koperasi yang berstatus aktif**, sementara sisanya sebanyak 1.236 koperasi tergolong nonaktif. Hal tersebut disebabkan mayoritas koperasi di Kepri tidak mampu bertahan dalam menjaga keberlangsungan operasionalnya, meliputi unit usaha mati, kegagalan kelembagaan (kegagalan pengurus atau perebutan kuasa) dan ditinggalkan anggota.
2. **Kota Batam dan Kab. Lingga menempati posisi tertinggi dalam jumlah koperasi tidak aktif, masing-masing mencatatkan 759 dan 151 unit koperasi yang tidak menjalankan kegiatan operasional.** Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun keberadaan koperasi secara kuantitatif terbilang besar di daerah Batam, sebagian besar di antaranya tidak berfungsi secara produktif. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan struktural maupun manajerial yang memengaruhi kinerja dan keberlangsungan koperasi di tingkat lokal.
3. Pemerintah Daerah Kepri melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, telah menetapkan sejumlah program strategis untuk mendukung pengembangan koperasi. Beberapa **program strategis pengembangan koperasi yaitu pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, serta pengawasan dan pemeriksaan koperasi.**
4. **Alokasi belanja K/L melalui Kemenko UKM di Kepri pada tahun 2024 mencapai Rp2,99 miliar.** Namun demikian realisasinya hanya sebesar Rp2,51 miliar (84,07 persen dari Pagu). Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh realisasi untuk output perencanaan dan penganggaran yang hanya mencapai 45,87 persen dari Pagu.
5. Belanja TKD untuk mendukung koperasi dilaksanakan **melalui DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil** dengan alokasi Rp5,11 miliar mengalami pertumbuhan 35,28 persen (yoy).
6. **Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengupayakan percepatan pendirian KDMP, melalui alokasi anggaran awal (APBD) Rp2,25 miliar** yang dipergunakan antara lain, 1) Penyediaan Biaya Akta Notaris Rp715 juta; 2) Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih 285 juta; 3) Pelatihan dan Sertifikasi calon manajer koperasi Rp250 juta; dan 4) Insentif bagi koperasi unggul dan potensial 1 miliar (untuk 5 koperasi).
7. **Dukungan pemerintah lainnya diwujudkan melalui dukungan BPS Republik Indonesia dalam Pilot Project Desa Cantik (Cinta Statistik), dukungan Kemenparekraf dalam eskalasi SDM, dukungan**





KKP terhadap koperasi nelayan dan perikanan, Kemenko UKM dalam Program Inkubasi Bisnis Koperasi (INKOP), serta BUMN dan BUMD melalui SCR dan kemitraan ekonomi.

8. Dalam pengembang koperasi di Kepri, terdapat **beberapa tantangan strategis diantaranya kondisi geografis sebagai daerah kepulauan yang antar desanya dipisahkan oleh lautan, keterbatasan kapasitas SDM** dalam pengelolaan koperasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025, dan pendanaan pengembangan koperasi yang masih terbatas.
9. Kepri memiliki potensi besar untuk **mengembangkan koperasi yang berbasis potensi lokal, mulai dari hasil laut, kawasan FTZ, KEK, pariwisata, hingga pertanian kelapa**. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan sinergi lintas sektor, koperasi di Kepri dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
10. **Model pengembangan inovatif koperasi seperti Koperasi Digital Maritim, Koperasi Ekspor UMKM, Koperasi Wisata Bahari, Koperasi Transportasi Laut, dan Koperasi Energi Terbarukan** menunjukkan potensi besar transformasi koperasi di Kepri. Melalui pemanfaatan teknologi, sinergi antarsektor, serta pemberdayaan komunitas, koperasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi maritim yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

6.2 Rekomendasi

Analisis Ekonomi Regional

Pada Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2025 yang disusun oleh Kanwil DJPb Kepri, kami mengusulkan rekomendasi atas analisis ekonomi regional Kepri sebagai berikut:

1. **Pemerintah daerah** agar **meningkatkan belanja pada sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Pertambangan dan Penggalian** dalam rangka mengoptimalkan perekonomian PMTB (investasi) yang memiliki kontribusi paling besar yaitu 43,43 persen terhadap PDRB Kepri, sehingga dapat lebih mempercepat pertumbuhan Kepri di Triwulan I 2025. **Pemda Kepri** agar **menambah alokasi belanja pada sektor strategis pendukung PDRB** yang diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan aktivitas ekonomi kedepannya.
2. **Pemda Kepri** agar **mendorong diversifikasi lapangan usaha unggulan** selain sektor industri pengolahan dan konstruksi. Kepri sebagai provinsi kepulauan dapat meningkatkan sektor perikanan dan pertanian mulai dari hulu hingga ke hilir hasil produk perikanan dan pertanian yang telah memiliki nilai tambah. **Pemda Kepri** agar **mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah**, terutama untuk meningkatkan keterbatasan rantai pasokan dan distribusi logistik antar pulau.
3. **Pemerintah pusat bersama TPID** diharapkan memperkuat **strategi pengendalian inflasi khususnya untuk komoditas pangan pokok** dengan menerbitkan kebijakan dan program yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan moneter melalui berbagai upaya meliputi operasi pasar murah untuk mengatur keterjangkauan harga, pemantauan kesediaan pasokan pada Bulog, distributor serta pasar, pelaksanaan program budidaya perikanan pertanian, dan memastikan kelancaran rantai distribusi bahan pangan.
4. Dalam rangka **meningkatkan IPM, Pemda Kepri** agar **memperluas formasi dan distribusi tenaga pendidik hingga ke pulau-pulau perintis** serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan melalui pembangunan dan pemenuhan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. Penguatan keterampilan lapangan usaha sesuai dengan kondisi daerah kepulauan, seperti pelatihan budidaya rumput laut, perikanan dan sektor kelautan juga dapat terus dioptimalkan.
5. **Pemerintah daerah** agar melaksanakan **Program pengentasan kemiskinan** dengan cara:





- a. Dinas Sosial agar **mengintegrasikan data penerima bantuan sosial** di daerah dengan data pusat agar pelaksanaan penyaluran Bansos dapat menjangkau keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran.
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar **memperluas kegiatan pelatihan keterampilan wirausaha dan pendampingan** untuk memunculkan UMKM baru yang akan meningkatkan pendapatan rumah tangga (mandiri secara ekonomi) dan meningkatkan UMKM naik kelas dan siap ekspor.
6. **Untuk menekan ketimpangan ekonomi (gini ratio) di Kepri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** agar **meningkatkan Belanja Infrastruktur** dan kegiatan perdagangan untuk menstimulus aktivitas ekonomi pada daerah terpencil/pedesaan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dapat memperkuat program pelatihan kerja, *entrepreneurship*, serta menambahkan alokasi fasilitas pinjaman Pemprov Kepri dengan bunga 0 (nol) persen kepada pelaku usaha.
7. **Pemerintah daerah** agar lebih **menggencarkan program pemberdayaan ekonomi untuk menurunkan tingkat pengangguran** melalui pelatihan keterampilan, memudahkan akses terhadap modal usaha, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan UMKM.
 - a) **Pemerintah Kota Batam** yang masih memiliki isu tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan agar menyediakan lebih banyak sekolah vokasi setingkat SMK dan Politeknik, melakukan kerja sama dengan industri (program *link and match industry*) sehingga tercipta kualitas tenaga kerja *high-skilled worker* yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Batam.
 - b) **Agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berkembang sangat pesat di Kota Batam dapat menyerap tenaga kerja lokal** sehingga dapat meningkatkan pendapatan kepala keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini akan menurunkan tingkat kemiskinan jangka panjang.
8. Dalam upaya **meningkatkan NTP, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan** agar menyediakan akses petani terhadap teknologi pertanian modern dengan tambahan insentif berupa benih unggul, pupuk organik, dan teknik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga meningkatkan nilai jual. Dukungan permodalan juga dapat diberikan melalui koperasi petani yang dapat turut memperkuat rantai distribusi.
9. Untuk **meningkatkan NTN** agar **Dinas Kelautan dan Perikanan** agar **memperluas fasilitas pelabuhan lokal dan cold storage di berbagai lokasi strategis bagi para nelayan. Pemda juga agar membentuk koperasi nelayan atau kelompok usaha** bersama dengan memfasilitasi akses nelayan ke pasar yang lebih besar dan stabil. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mempromosikan produk ikan lokal, dan membuka akses ke pasar ekspor membangun kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan pengolahan ikan, restoran, hotel, dan ritel, untuk memastikan pasokan ikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
10. **Peningkatan devisa ekspor** dapat ditingkatkan melalui upaya **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** dalam menggencarkan pemasaran yang lebih agresif dan lebih intensif berpartisipasi dalam pameran internasional untuk menarik pasar ekspor potensial baru khususnya komoditas gas alam, hasil tambang dan hasil industri (non migas) yang menjadi produk ekspor andalan.

Analisis Fiskal Regional

Berdasarkan Kajian Fiskal Regional triwulan IV 2024 ini, kami mengusulkan rekomendasi atas analisis fiskal regional sebagai berikut:





Kepada Pemerintah Pusat

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

- a. Pemerintah pusat, melalui **Kementerian Keuangan** agar **meningkatkan fungsi pengawasan sekaligus memperluas edukasi terkait implementasi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)** kepada seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam mendukung efektivitas perencanaan dan penganggaran nasional secara terpadu.
- b. **Pemerintah pusat agar melaksanakan perencanaan dan penganggaran untuk tingkat regional dengan memperhatikan karakteristik geografis** Kepri yang terdiri dari wilayah kepulauan, sehingga distribusi logistik makanan bergizi dapat dilakukan secara merata ke seluruh kabupaten/kota, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
- c. **Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional** agar **memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan optimal** di daerah dengan melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala ke setiap SPPG.
- d. **Badan Gizi Nasional** agar **memastikan makanan yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan gizi** penerima manfaat serta menjamin mutu dan keamanannya.

2. Aspek Pendapatan Negara dan Daerah

- a. Pemerintah Provinsi Kepri **agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan/Kanwil DJPb untuk mengidentifikasi satuan kerja PNBP** di wilayahnya yang memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU), khususnya pada sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelabuhan.
- b. **Agar Pemprov Kepri menguatkan sinergi lintas lembaga dalam menyusun skema insentif fiskal (seperti *tax holiday* ataupun *tax allowance*)**, serta kemudahan non-fiskal (perizinan terpadu, penyediaan lahan, dan pelatihan tenaga kerja lokal) untuk meningkatkan daya tarik investasi di wilayah di luar Batam seperti Natuna, Anambas, Lingga, dan Karimun.

3. Aspek Belanja Negara dan Daerah

- a. **Agar pemerintah daerah mendorong implementasi strategi pengadaan dini (*early procurement*) dan perikatan kontrak sejak awal tahun** anggaran, agar proses pembangunan fisik tidak terkendala oleh waktu pelaksanaan yang terbatas, sekaligus menghindari akumulasi belanja di akhir tahun.
- b. **Pemprov agar menggencarkan forum koordinasi belanja pemerintah daerah dan vertikal untuk mempercepat identifikasi kendala blokir** dan merumuskan solusi teknis bersama sebelum akhir triwulan berjalan.
- c. **Pemerintah daerah agar melaksanakan penguatan basis data dan analisis kebutuhan daerah melalui kajian komprehensif berbasis data kebutuhan sektoral dan spasial**, khususnya terkait program prioritas daerah, guna mendukung argumentasi dalam pengusulan alokasi dana transfer ke pemerintah pusat.
- d. **Pemerintah daerah agar memperketat proses seleksi penyedia jasa konsultan dengan mengedepankan rekam jejak kinerja dan kooperatif** dalam kerja sama, serta menyediakan pelatihan atau pembinaan bagi konsultan lokal guna memperkuat ekosistem layanan profesional.
- e. **Agar pemerintah pusat bersinergi dengan pemda untuk memastikan pelaksanaan belanja program MBG berjalan tepat sesuai dengan ketentuan** serta pembayaran kepada vendor dilaksanakan sesuai dengan batas waktu, sehingga tidak menghambat pelaksanaan program MBG.





4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

- a. **Pemerintah Kepri agar menjembatani komunikasi antara pemda, BUMD, pihak swasta, dan lembaga pembiayaan untuk membangun portofolio proyek** yang bankable dan menarik bagi investor dalam kerangka *Creative Financing*.
- b. **Pemprov Kepri perlu melakukan benchmarking aktif ke Provinsi lain yang telah berhasil melaksanakan KPBU.** Kegiatan ini dapat menggunakan dana surplus APBD sebagai investasi awal untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan teknis dalam pengelolaan KPBU.

Kepada Pemerintah Daerah

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

- a. **Dinas Pertanian dan instansi terkait di Provinsi Kepulauan Riau agar meningkatkan produksi pangan lokal,** terutama komoditas yang menjadi komponen utama dalam menu MBG.
- b. **Disperindag, Dinas Pertanian, dan Instansi terkait agar memastikan ketersediaan pasokan pangan** terutama dalam pelaksanaan program MBG yang meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan.
- c. **Dalam rangka menyelaraskan RPJMN dan RPJMD serta meningkatkan kualitas *mandatory spending*** pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM daerah, pemda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) melakukan **pemutakhiran *budget tagging* dan *budget tracking*** guna mengidentifikasi subkegiatan yang memiliki kontribusi terhadap kualitas belanja pendidikan dan kesehatan.
 - 2) **Mengidentifikasi program, kegiatan dan output** yang menjadi Prioritas Nasional.
 - 3) Mengawasi serta **memastikan kesesuaian program, kegiatan, dan output dalam dokumen RPJMD dan RKPD** dengan arah kebijakan dalam RPJMN dan RKP.
 - 4) **Mencantumkan secara eksplisit dukungan terhadap Prioritas Nasional** dalam narasi dan matriks dokumen RKPD

2. Aspek Pendapatan Negara dan Daerah

- a. **Pemerintah daerah agar melakukan evaluasi terhadap tarif pajak reklame di wilayahnya masing-masing** karena penyesuaian tarif pajak reklame terbukti menjadi langkah yang efektif dalam meningkatkan PAD. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini, penyesuaian tarif dapat dipertimbangkan. Pendekatan serupa juga dapat diterapkan pada jenis pajak lainnya yang memerlukan penyesuaian tarif agar lebih relevan dengan perkembangan terkini.
- b. **Langkah penertiban reklame ilegal yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat dijadikan contoh dan diadopsi oleh pemerintah daerah lainnya.** Upaya penertiban ini juga dapat diperluas ke sektor-sektor lain yang berpotensi menjadi sumber PAD, tidak terbatas pada reklame ilegal saja. Sebagai contoh, penertiban dapat dilakukan pada aspek perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
- c. **Pemda perlu melakukan upaya peningkatan PAD dengan cara:**
 - 1) **Pemerintah daerah agar mengoptimalkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LLPAD) dengan mendorong tata kelola BLUD** yang semakin optimal untuk memperoleh pendapatan daerah, melalui pembinaan dan asistensi BLUD dengan berkoordinasi bersama Kemenkeu.
 - 2) **Meningkatkan basis data perpajakan** daerah dan melakukan ekstensifikasi pajak melalui digitalisasi layanan dan pemutakhiran data objek pajak daerah.





- 3) Mengembangkan aplikasi dan **sistem yang mendukung kemudahan administrasi dan pembayaran pajak** bagi wajib pajak dan pemda dengan tujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah
 - 4) Meningkatkan pemungutan pajak daerah melalui **kerja sama pemungutan pajak dan sinergi pemungutan pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota** serta mengotimalkan data dari pemerintah pusat, pemda lain, serta pihak ketiga.
 - 5) Pemda dapat melakukan *mapping* potensi investasi dan pengembangan sektor perekonomian potensial daerah serta membentuk **tim taskforce peningkatan PAD lintas sektor** untuk dapat meningkatkan PAD.
 - 6) Pemda dapat memberikan **insentif pajak daerah dan retribusi daerah kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro** sebagai wujud dukungan kemudahan usaha dan investasi serta untuk mendukung pencapaian program prioritas daerah dan nasional. Efek dari pemberian insentif yaitu akan mendorong *competitive advantage* dan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan meningkatkan PAD.
- d. **Pemerintah daerah agar aktif mempromosikan potensi investasi dengan menyampaikan paket kebijakan insentif yang menarik bagi para investor di Kepri.** Langkah ini bertujuan untuk menarik masuknya investor baru yang berkontribusi pada pembangunan daerah. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Kepri diharapkan dapat membantu memperkecil kesenjangan modal manusia (*Human Capital Gap*) serta kesenjangan infrastruktur (*Infrastructure Gap*) antara Kota Batam dengan daerah lainnya di Kepri. Dengan demikian, investasi tersebut akan berperan sebagai katalisator yang mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan yang lebih merata di kawasan Kepri.
 - e. **Pemerintah daerah agar menyusun master plan khusus untuk pembiayaan infrastruktur di sekitar kawasan wisata** Kabupaten Kepulauan Anambas, Lingga, dan Natuna. Pendanaan proyek ini dapat dilakukan melalui sinergi beberapa sumber, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, serta kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau pihak swasta. Selain itu, pemda juga dianjurkan untuk aktif mengembangkan dan meningkatkan potensi investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
 - f. Dalam mendukung sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, pemerintah telah menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan *Free Trade Zone* (FTZ) dengan berbagai kemudahan serta insentif fiskal. **Agar Pemprov menyediakan layanan perizinan investasi dan konstruksi terintegrasi yang berbasis digital (OSS daerah)** yang lebih cepat dan efisien, serta menyiapkan tim task force daerah untuk mendampingi investor yang masuk ke KEK/FTZ.
3. **Aspek Belanja Negara dan Daerah**
 - a. **Pemerintah daerah agar segera melaksanakan kegiatan belanja modal**, mulai dari perikatan kontrak dan pelaksanaan kegiatan mulai triwulan II 2025 ini untuk mengantisipasi penumpukan pekerjaan fisik di akhir tahun anggaran akibat kontraksi yang cukup tinggi di triwulan I 2025.
 - b. **Dalam rangka meningkatkan IPM di daerah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan alokasi Belanja Daerah pada fungsi pendidikan dan kesehatan.** Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas serta layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengurangi kasus balita dengan kekurangan gizi, serta meningkatkan kompetensi siswa secara menyeluruh.
 - c. **Untuk mendorong peningkatan investasi di daerah, Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan alokasi Belanja Modal pada bidang Infrastruktur dan Konektivitas.** Fokus ini meliputi penyediaan dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas transportasi yang memadai, guna menciptakan lingkungan yang kondusif dan menarik bagi para investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut.





- d. Untuk menekan biaya logistik, **pemerintah pusat dan daerah agar menjalin kerja sama dengan maskapai penerbangan serta perusahaan jasa pengiriman laut** yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempermudah distribusi barang logistik bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan konektivitas antar pulau di Kepri. Dengan demikian, proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh satuan kerja pemerintah daerah dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

- a. **Pemerintah daerah dapat mulai mempertimbangkan opsi pembiayaan alternatif seperti penerbitan sukuk, dan obligasi daerah.** Namun, langkah ini harus dilakukan dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan menjaga kesinambungan fiskal, serta memastikan kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman maupun imbal hasil kepada investor.
- b. **Pemerintah daerah agar dapat menjalin kolaborasi dengan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk menerapkan skema *creative financing*,** salah satunya melalui pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program ini dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi di daerah.
- c. **Pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta pihak donor untuk memperoleh fasilitasi dalam penerapan pola pembiayaan KPBU sebagai alternatif *creative financing*** dalam mendanai proyek infrastruktur. Sebelum pelaksanaan, Pemda dianjurkan melakukan benchmarking ke provinsi yang telah berhasil menerapkan KPBU, seperti Provinsi Jawa Barat, guna mempelajari praktik terbaik dan menyesuaikan dengan kondisi daerah.

Kepada Kanwil DJPb Kepri

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

- a. **KPPN Tanjungpinang dan Batam agar mengawal pelaksanaan anggaran secara menyeluruh,** dimulai dari tahap perencanaan DIPA, penerbitan DIPA, hingga pelaksanaan program oleh satuan kerja terkait. Selain itu, perlu dipastikan bahwa satuan kerja melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- b. **Kanwil DJPb Provinsi Kepri agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memperoleh dokumen risalah rapat penyusunan KUA-PPAS.** Ketersediaan dokumen ini penting untuk mendukung analisis kualitas perencanaan anggaran daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel.

2. Aspek Pendapatan Negara

- a. **Sebagai pembina BLU di daerah, Kanwil DJPb agar dapat segera melakukan pembinaan intensif terhadap tiga BLU** yang baru di Kepri guna mendorong percepatan peningkatan penerimaan BLU, melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
- b. Selain melakukan pembinaan terhadap BLU muda, **Kanwil DJPb agar mengawal proses serta mendorong percepatan perubahan status satuan kerja PNBP yang memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi satuan kerja BLU.** Perubahan status ini, dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh BLU, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
- c. **Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau agar menyelenggarakan forum FGD sebagai sarana untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi investasi** yang ada di wilayahnya. Melalui FGD tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang tepat guna mendorong peningkatan PAD.

3. Aspek Belanja Negara





- a. **Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kepulauan Riau perlu terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyaluran Dana Transfer ke Daerah**, termasuk perkembangan kontrak atau proyek yang didanai, capaian output dari penggunaan dana tersebut, serta mendorong percepatan realisasi penyerapan Dana Transfer guna mendukung efektivitas pelaksanaan program di daerah.
- b. **KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam agar secara konsisten mengingatkan satuan kerja terkait agar segera menyelesaikan permasalahan blokir dan revisi anggaran**. Selain itu, mendorong satuan kerja untuk bersikap proaktif dalam melakukan koordinasi, termasuk hingga ke unit eselon I, guna mempercepat proses dan mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran.
- c. **KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam agar dapat memberikan arahan kepada satuan kerja untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara lebih strategis**, dengan memprioritaskan kegiatan yang menghasilkan output dan outcome yang nyata serta berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalisir kegiatan yang tidak mencapai target dan memastikan efektivitas pemanfaatan anggaran.

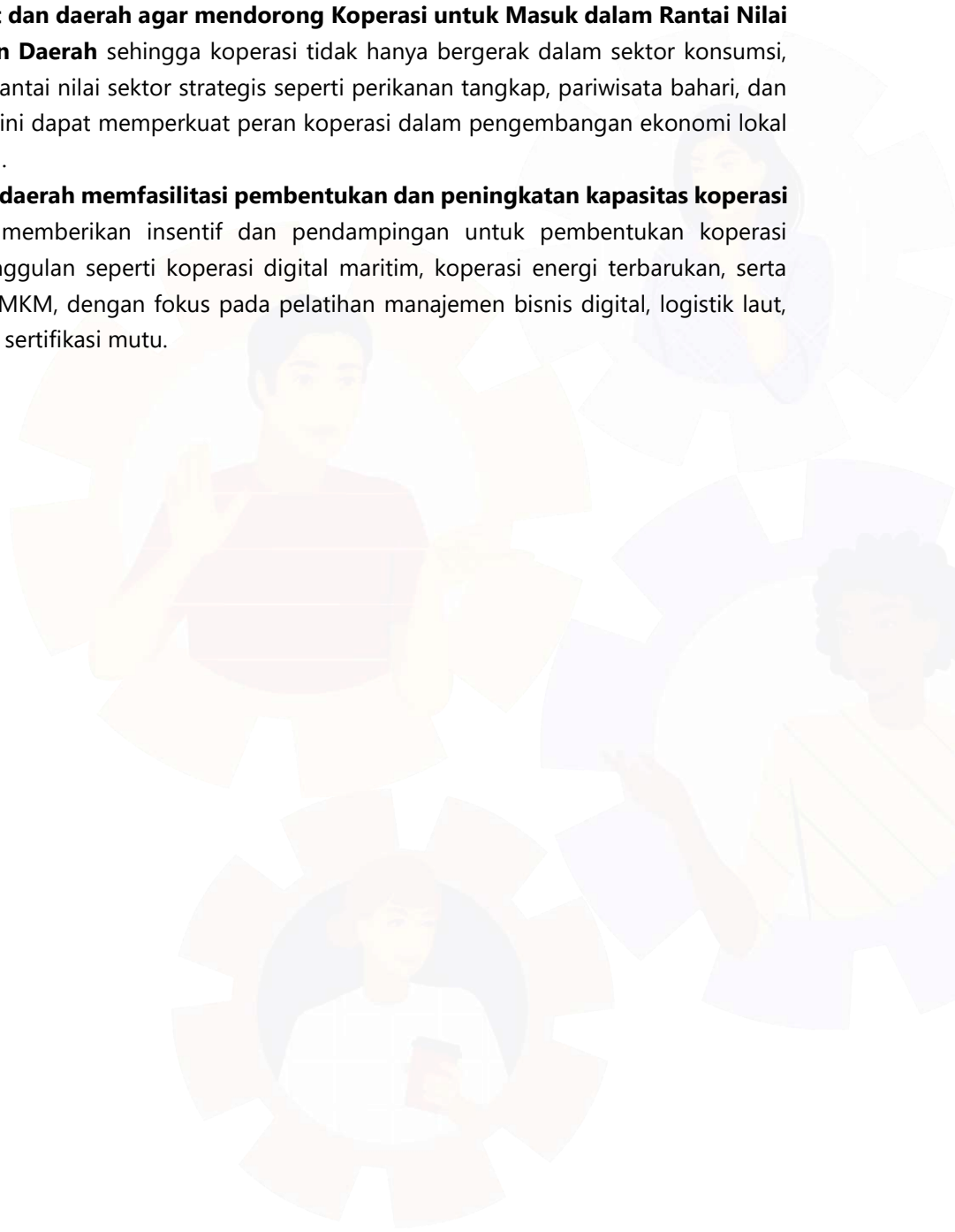
Analisis Tematik: Reviu atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di Daerah

1. **Pemerintah daerah agar melakukan revitalisasi dan reaktivasi koperasi Nonaktif dengan pendataan ulang dan audit** menyeluruh terhadap koperasi nonaktif untuk mengidentifikasi potensi reaktivasi. Koperasi yang masih memiliki prospek usaha dan dukungan anggota dapat difasilitasi untuk dibina dan dihidupkan kembali melalui pendampingan teknis dan permodalan terbatas.
2. **Agar dilaksanakan penguatan kapasitas manajemen dan pengurus koperasi** melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pengurus koperasi, khususnya di bidang manajemen keuangan, tata kelola kelembagaan, serta kepemimpinan kolektif. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Koperasi, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan koperasi.
3. **Pemerintah daerah agar membentuk unit layanan konsultatif seperti "Klinik Koperasi"** di setiap kabupaten/kota untuk memberikan asistensi hukum, akuntansi, dan penyelesaian konflik internal koperasi, termasuk konflik perebutan kekuasaan antar pengurus.
4. **Agar optimalisasi fungsi Forum Koordinasi UKM Daerah digencarkan antara Dinas Koperasi dan UKM, pelaku usaha, dan instansi vertikal** agar penganggaran program-program pusat di daerah dapat dirancang lebih tepat sasaran, responsif terhadap kondisi lokal, dan disertai komitmen pelaksanaan yang kuat di lapangan.
5. **Agar dilaksanakan sistem monitoring kinerja realisasi anggaran yang lebih intensif**, dengan pelaporan triwulanan antara pemerintah daerah dan K/L. Hal ini untuk memastikan apabila terdapat hambatan pelaksanaan, dapat segera direspons dengan tindakan percepatan realisasi.
6. **Agar dilakukan Integrasi KDMP dalam Ekosistem Ekonomi Desa** melalui upaya pemda dalam memastikan bahwa KDMP bukan hanya entitas formal, tetapi benar-benar terintegrasi dalam sistem ekonomi desa, misalnya dengan menjadikan KDMP sebagai offtaker hasil pertanian, perikanan, atau produk UMKM lokal, serta mitra distribusi logistik dan layanan digital desa.
7. **Agar Pembentukan Sekretariat Bersama Program Terintegrasi Desa dan Koperasi** dengan membentuk sekretariat atau forum koordinasi lintas sektor di tingkat daerah untuk mengintegrasikan program pusat dan mitra BUMN/BUMD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, serta mempermudah pengawasan dan pelaporan kinerja program





8. **Pendirian Pusat Layanan Koperasi dan Ekonomi Rakyat di wilayah pulau-pulau** melalui *Regional Service Center* (layanan koperasi dan UKM) di setiap kabupaten/kota atau gugus pulau yang dapat menjadi pusat layanan teknis, pelatihan, konsultasi hukum, dan pendampingan usaha, sehingga koperasi dapat tumbuh lebih terarah dan profesional.
9. **Pemerintah pusat dan daerah agar mendorong Koperasi untuk Masuk dalam Rantai Nilai Industri Unggulan Daerah** sehingga koperasi tidak hanya bergerak dalam sektor konsumsi, melainkan dalam rantai nilai sektor strategis seperti perikanan tangkap, pariwisata bahari, dan logistik pulau. Hal ini dapat memperkuat peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal secara menyeluruh.
10. **Agar pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas koperasi inovatif** dengan memberikan insentif dan pendampingan untuk pembentukan koperasi berbasis sektor unggulan seperti koperasi digital maritim, koperasi energi terbarukan, serta koperasi ekspor UMKM, dengan fokus pada pelatihan manajemen bisnis digital, logistik laut, ekspor-impor, dan sertifikasi mutu.



**The journey of a thousand
miles begins with a single
step.**

-Lau Tzu



List of Reference”

Daftar Pustaka

Peraturan

Kementerian Sekretariat Negara. 2022. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

-----, 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016*. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1181. Jakarta:Kementerian Keuangan.

-----, 2014.Surat Edaran Nomor SE-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Keputusan Direktur Jenderal Perbandaharaan Nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan UMKM Lingkup DJPb

Laporan dan Buku

Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2021. *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2021. *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pusat Statistik. 2024. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2024. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2025. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2024. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi



List of Reference”

Daftar Pustaka

Kepulauan Riau.

- , 2025. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Februari 2025*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2025. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2025. *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan I 2025*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2025. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2025. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2025. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2025. *Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau September 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2025. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2025. *Perkembangan Nilai Tukar Petani Kepulauan Riau Maret 2025*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2025. *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Maret 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2025. *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Februari 2025*. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2025. *Laporan Survei Konsumen Maret 2025*. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

Report

- Haryono, S., & P. Wardoyo. 2012. *Struktural Equation Modelling Untuk Penelitian Manajemen Menggunakan Amos 18.00*. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.
- Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford Publications.
- Cahyo, R. D. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 95 Dan Rata-Rata Lama Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009-2014*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2).
- Narotama MR. *Small islands in a large archipelago state: Examining small islands' peripherality and governance relations in Riau Islands Province, Indonesia [Doctoral dissertation]*. University of Birmingham; 2022. Available from: <https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/12603/>



List of Reference”

Daftar Pustaka

Berita

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2024, Mei). *PDRB Kepri setara Brasil, Kepala BPS RI: Kepri punya potensi luar biasa, tumbuh di atas 5 persen*. <https://www.kepriprov.go.id/berita/gubernur/pdrb-kepri-setara-brasil-kepala-bps-ri-kepri-punya-potensi-luar-biasa-tumbuh-di-atas-5-persen>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2021). *RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021–2026*. https://ppid.kepriprov.go.id/resources/informasi_publik/43/RPJMD_KEPRI.pdf

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. (2025). *Disdik Kepri rilis juknis SPMB 2025–2026*. <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id/berita/disdik/disdik-kepri-rilis-juknis-spmb-2025-2026>

Kesbangpol Kepri. (2025, Januari 17). *Program pengentasan kemiskinan Gubernur Ansar berhasil, angka penduduk miskin turun signifikan*. <https://kesbangpol.kepriprov.go.id/2025/01/17/program-pengentasan-kemiskinan-gubernur-ansar-berhasil-angka-penduduk-miskin-turun-siginifikan/>

Antara News Kepri. (2024, Februari 29). *BI: Energi terbarukan diperkirakan jadi penopang baru bagi ekonomi Kepri*. <https://kepri.antaranews.com/berita/221277/bi-energi-terbarukan-diperkirakan-jadi-penopang-baru-bagi-ekonomi-kepri>

Pikiran Rakyat. (2024, Mei 20). *Bangun pabrik Apple, Batam akui ada peran Malaysia dan Singapura, investasi tetap bertahan*. <https://kepri.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2689327820/bangun-pabrik-apple-batam-akui-ada-peran-malaysia-dan-singapura-investasi-tetap-bertahan>

Harian Kepri. (2024, Desember 10). *Butuh anggaran Rp 25 miliar, Disdik Kepri akan bangun 58 RKB di tahun 2025*. <https://www.hariankepri.com/butuh-anggaran-rp-25-miliar-disdik-kepri-akan-bangun-58-rkb-di-tahun-2025/>

Sumber Lain

SIKRI (Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia)

Aplikasi MEBE dan SINTESA <https://ditpa.kemenkeu.go.id/>

Aplikasi OMSPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Aplikasi SIMTRADA <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada>

Data Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Kepri

Aplikasi SIKP-KUR

Aplikasi SIKP-UMi





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kajian Fiskal Regional

Provinsi Kepulauan Riau

Triwulan I
2025



Kanwil DJPb Kepulauan Riau



@djpbbkepri



@djpbbkepri

Konten Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I 2025 dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Kanwil DJPb Kepri. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin dari Kanwil DJPb Provinsi Kepri.

